



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno - Hatta No. 59 Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122

Kota Mungkid 56511 www.magelangkab.go.id

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Pemerintah Kabupaten Magelang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

LKjIP ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Magelang sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan wujud kerja keras seluruh aparatur pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Magelang, dan dukungan serta partisipasi berbagai elemen masyarakat, dunia usaha dan dunia pendidikan yang telah memberikan sumbangsihnya untuk kemajuan Kabupaten Magelang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja guna perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, Maret 2019

 **BUPATI MAGELANG**

ZAENAL ARIFIN, S.I.P.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan berdasarkan tingkat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2018. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut, selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran. Penyusunan Dokumen LKjIP mengacu pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja tahun 2018 dilakukan pada indikator makro dengan 6 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja serta indikator mikro berjumlah 31 sasaran strategis dengan 166 indikator kinerja.

Capaian kinerja sasaran pada indikator makro Kepala Daerah tahun 2018 rata-rata kinerja sasaran telah tercapai yaitu sebesar 113,32% (Sangat Tinggi), demikian juga jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 capaian kinerja sasaran telah tercapai sebesar 111,45% (Sangat Tinggi), hal itu menunjukkan target pembangunan yang diukur pada indikator makro telah tercapai bahkan terlampaui, baik pada target tahun 2018 maupun target akhir periode RPJMD pada tahun 2019.

Capaian kinerja sasaran pada indikator mikro Kepala Daerah tahun 2018 telah tercapai 122,91% (Sangat Tinggi), jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 tidak terlalu jauh dengan capaian kinerja sasaran telah tercapai 116,55% (Sangat Tinggi), hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator mikro sasaran strategis telah tercapai bahkan terlampaui pada target tahun 2018 dan target akhir periode RPJMD pada tahun 2019.

Realisasi anggaran Kabupaten Magelang pada tahun 2018 mencapai 78,45% (Tinggi), dengan tingkat efisiensi kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya sebesar 6,53%.

DARTAR ISI

Kata Pengantar	I
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Aspek Strategi Organisasi	3
1. Visi dan Misi	3
2. Kondisi Geografi dan Demografi	6
3. Pembagian Wilayah	8
4. Organisasi Perangkat Daerah	9
E. Isu Strategis Organisasi	14
F. Sistematika	15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Ikhtisan Perjanjian Kinerja	17
--------------------------------	----

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Organisasi	56
1. Rumus Pengukuran	56
2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	57
B. Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018	82
C. Prestasi	195

BAB IV PENUTUP

196

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2018 (jiwa).	7
Tabel 1.2	Luas Daerah, Jarak Terdekat/Termudah dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Laut se-Kabupaten Magelang .	8
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2018 pada Indikator Makro.	17
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2018 pada Indikator Mikro.	19
Tabel 2.3	Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.	27
Tabel 2.4	Dukungan Program dan Pendanaan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018.	35
Tabel 3.1	Interval Nilai, Predikat Penilaian dan Kode warna	57
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Pada Indikator Makro.	60
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Pada Indikator Mikro.	63
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Per Program Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018.	75
Tabel 3.5	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Program Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun anggaran 2018.	83
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018.	83
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018.	85
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018.	86
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018.	88

Tabel 3.10	Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018.	90
Tabel 3.11	Penghitungan Opini BPK 'WTP' Kabupaten Magelang Tahun 2018.	92
Tabel 3.12	Penghitungan Nilai AKIP Kabupaten Magelang Tahun 2018.	93
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Sasaran Strategis VI Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018.	94
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Strategis Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2018.	95
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Dan Terkontrol Kabupaten Magelang Tahun 2018.	98
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kualitas Pembangunan Manusia Yang Semakin Meningkatkan, Dengan Pemerataan Pendidikan Yang Layak, Mutu Pendidikan, Dan Akses Terhadap Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2018.	99
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga Kabupaten Magelang Tahun 2018.	102
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca Kabupaten Magelang Tahun 2018.	103
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2018	105
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Magelang Tahun 2018.	107
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Kabupaten Magelang Tahun 2018.	109
Tabel 3.22	Sasaran Strategis Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan Kab. Magelang Tahun 2018.	110

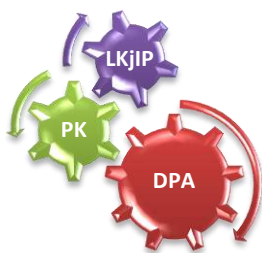
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2018.	112
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Membaiknya Struktur Perkonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal Kabupaten Magelang Tahun 2018.	114
Tabel 3.25	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018.	116
Tabel 3.26	Sasaran Strategis Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat Magelang Tahun 2018.	117
Tabel 3.27	Sasaran Strategis Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2018	119
Tabel 3.28	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2018.	121
Tabel 3.29	Sasaran Strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Magelang Tahun 2018	122
Tabel 3.30	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018.	124
Tabel 3.31	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018.	125
Tabel 3.32	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Aksesibilitas Antar Daerah Meningkat dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru Kabupaten Magelang Tahun 2018.	127

Tabel 3.33	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung	129
Tabel 3.34	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan Kabupaten Magelang Tahun 2018.	131
Tabel 3.35	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2018.	131
Tabel 3.36	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Yang Berorientasi Tata Ruang, Serta Mengurangi Resiko Bencana Alam Kabupaten Magelang Tahun 2018.	133
Tabel 3.37	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2018.	135
Tabel 3.38	Capaian Kinerja Sasaran Srategis Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018.	138
Tabel 3.39	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018.	139
Tabel 3.40	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Magelang Tahun 2018.	141
Tabel 3.41	Sasaran Strategis Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak Kabupaten Magelang Tahun 2018.	145
Tabel 3.42	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2018.	147

Tabel 3.43	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat dan Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2018.	150
Tabel 3.44	Analisa Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.	171

DAFTAR GAMBAR

Gambar : 1.1	Peta Kabupaten Magelang.	6
Gambar : 3.1	Penghargaan Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori “Baik Dengan Catatan” Tahun 2018	96
Gambar : 3.2	Penghargaan Kabupaten Layah Anak (KLA) Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018	105
Gambar : 3.3	Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018	106
Gambar : 3.4	Penerimaan Penghargaan Pembina Proklam Tingkat Nasional Pemerintah Kabupaten Magelang.	136
Gambar : 3.5	Penerimaan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia	149
Gambar : 3.6	Penganugerahan BPBD Kabupaten/Kota Tahun 2018 Predikat Terbaik II Tingkat BPBD Kabupaten/Kota Wilayah Barat	151
Gambar : 3.7	Top 10 Kompetisi Inovasi elayanan Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018	152



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah khususnya atas penggunaan anggaran wajib dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), penyusunan LKjIP merupakan bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai sasaran strategis daerah. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana arah pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Nawacita diamanatkan pemerintah daerah untuk tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Hal terpenting yang

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Letak Geografi
 - 3. Pembagian Wilayah
 - 4. Organisasi Perangkat Daerah
- E. Isu Strategis Organisasi
- F. Sistematika

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016

Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);

8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP adalah:

1. Menilai tingkat capaian kinerja sasaran strategis dari program yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2018.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis melalui pelaksanaan program.
3. Menyusun strategi agar mencapai tingkat capaian kinerja yang optimal terhadap pelaksanaan program yang akan datang.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk peningkatan kinerja.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

D. Aspek Strategi Organisasi

1. Visi dan Misi

Berpedoman pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 yaitu: “Kabupaten Magelang Yang Maju, Sejahtera Dan Madani“, serta mengingat pesan wasiat Bung Karno tentang doktrin TRI SAKTI Bung Karno, yaitu (1) Berdaulat di bidang politik, (2) Berdikari di bidang ekonomi, dan (3) Berkepribadian di bidang kebudayaan, serta dengan tetap memperhatikan *motto* Kabupaten Magelang yaitu “Gemah Ripah Iman Cemerlang” atau MAGELANG GEMILANG maka ditetapkan Visi Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Magelang Yang Semakin Semanah”
(Sejahtera, Maju dan Amanah)**

Semanah semakna dengan “sehati”, sehingga makna semanah dimaksudkan adanya kebersamaan di Kabupaten Magelang antar dan inter pimpinan pemerintahan daerah dan jajarannya beserta segenap komponen masyarakatnya untuk mewujudkan Kabupaten Magelang yang semakin Sejahtera, Maju dan Amanah. Oleh karena itu pernyataan visi tersebut memiliki makna filosofis yang akan dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun.

Sejahtera, konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera secara sederhana menurut terminologi jawa adalah *wareg, wutuh, waras dan wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir-batin, jasmani-rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas. Adapun secara akademis indikator sejahtera adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin; terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan; tersedianya infrastruktur yang memadai; meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan daerah. Visi Sejahtera ini

akan dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama, serta membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.

Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan di dukung kondusivitas daerah. Visi Maju akan dicapai melalui misi meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah serta memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

Amanah, konsep amanah secara garis besar adalah menciptakan kerja sama yang baik dengan semua elemen masyarakat. Amanah merupakan kunci kemakmuran masyarakat yang menjadi perekat sosial yang mampu membentuk solidaritas dan jaringan antara lapisan masyarakat. Amanah harus memberikan insiatif konsep moral, variatif, argumentatif yang bermanfaat dan aktual bagi kehidupan manusia mencakup aspek agama, sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya, sehingga dapat diwujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang menegakkan amanah (*high trust society*). Amanah mengandung pesan kesetiaan, kepercayaan dan kejujuran. Visi Amanah akan dicapai dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan

demokratis, serta meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi merupakan rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi, sehingga secara substansi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan secara administratif tidak menyulitkan pelaksanaannya.

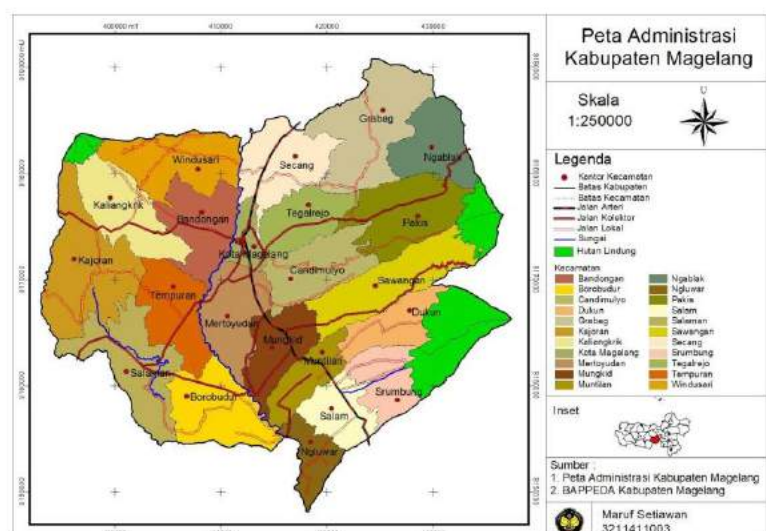
Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
4. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

2. Kondisi Geografi dan Demografi

Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak di antara $110^{\circ} 01' 51''$ dan $110^{\circ} 26' 58''$ Bujur Timur dan diantara $7^{\circ} 19' 13''$ dan $7^{\circ} 42' 16''$ Lintang Selatan.

Berdasarkan letak ini menjadikan Kabupaten Magelang memiliki posisi yang strategis karena keberadaannya di tengah-tengah Provinsi Jawa



Gambar : 1.1. Peta Kabupaten Magelang

Tengah sehingga mudah dicapai dari berbagai arah. Disamping itu Kabupaten Magelang merupakan daerah perlintasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah penduduk Kabupaten Magelang tahun 2017 berdasarkan estimasi Sensus Penduduk tahun 2015 dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Magelang sebanyak:

1.268.396 jiwa, laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 – 2016 sebesar 7,32% sedangkan pada tahun 2016-2017 sebesar 0,90%, secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Magelang tahun 2010, 2016 dan 2017

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Jumlah Penduduk <i>Population</i>			Laju Penduduk per Tahun <i>Annual Population Rate (%)</i>	
	2010	2016	2017	2010-2017	2016-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Salaman	65 852	69 901	70 497	7,05	0,85
2 Borobudur	55 602	58 599	59 039	6,18	0,75
3 Ngluwar	29 857	31 187	31 371	5,07	0,59
4 Sa l a m	44 455	47 126	47 513	6,88	0,82
5 Srumbung	44 782	48 509	49 080	9,60	1,18
6 D u k u n	42 960	45 619	46 018	7,12	0,87
7 Muntilan	74 839	79 475	80 161	7,11	0,86
8 Mungkid	68 669	74 219	75 076	9,33	1,15
9 Sawangan	53 705	57 086	57 602	7,26	0,90
10 Candimulyo	45 341	48 386	48 840	7,72	0,94
11 Mertoyudan	104 761	114 212	115 670	10,41	1,28
12 Tempuran	46 395	49 394	49 834	7,41	0,89
13 Kajoran	51 477	53 088	53 285	3,51	0,37
14 Kaliangkrik	52 345	55 233	55 658	6,33	0,77
15 Bandongan	54 539	57 562	58 002	6,35	0,76
16 Windusari	46 298	49 813	50 351	8,75	1,08
17 Secang	74 921	81 497	82 565	10,20	1,31
18 Tegalrejo	53 200	57 279	57 907	8,85	1,10
19 Pakis	52 242	54 188	54 443	4,21	0,47
20 Grabag	81 749	85 895	86 526	5,84	0,73
21 Ngablak	37 927	38 855	38 958	2,72	0,27
Kab. Magelang	1 181 916	1 257 123	1 268 396	7,32	0,90

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Magelang, “Kabupaten Magelang Dalam Angka 2018”



3. Pembagian Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Magelang adalah 1.085,73 Km² atau 108.573 Ha kurang lebih 3,34% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS Tahun 2018, alokasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang mencakup luas 86.405 Ha lahan pertanian, yang terdiri dari lahan sawah (*wetland*) seluas 36.862 Ha dan lahan kering seluas 49.543 Ha, adapun peruntukan lahan sawah diantaranya adalah sawah irigasi seluas 27.898 Ha dan tadah hujan (*reservation*) seluas 8.964 Ha.

Wilayah Kabupaten Magelang yang paling luas yaitu Kecamatan Kajoran sebesar 83,41 kilometer persegi. Sedangkan wilayah yang luasnya paling kecil yaitu Kecamatan Ngluwar sebesar 22,44 Km², secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Tabel 2.1.

Luas Daerah, Jarak Terdekat/Termudah dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Laut se-Kab. Magelang

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase Luas	Jarak dari Ibu Kota Kabupaten (Km)	Ketinggian dari Permukaan Laut (mdpl)
1.	Salaman	68,87	6,34	15	208
2.	Borobudur	54,55	5,02	4	235
3.	Ngluwar	22,44	2,07	22	202
4.	S a l a m	31,63	2,91	19	336
5.	Srumbung	53,18	4,90	19	501
6.	D u k u n	53,40	4,92	21	578
7.	Muntilan	28,61	2,64	17	348
8.	Mungkid	37,40	3,44	7	320
9.	Sawangan	72,37	6,67	15	575
10.	Candimulyo	46,95	4,32	17	437
11.	Mertoyudan	45,35	4,18	6	347
12.	Tempuran	49,04	4,52	8	210
13.	Kajoran	83,41	7,68	31	578
14.	Kaliangkrik	57,34	5,28	34	823
15.	Bandongan	45,79	4,22	20	431
16.	Windusari	61,65	5,68	25	525
17.	Secang	47,34	4,36	22	470
18.	Tegalrejo	35,89	3,31	22	478
19.	Pakis	69,56	6,41	29	841
20.	Grabag	77,16	7,11	33	680
21.	Ngablak	43,80	4,03	37	1.378
Total :		1.085,73	100.00		

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, 2018*

Kabupaten Magelang secara administratif dibagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan dengan dusun 2.379 dusun dan Rukun Tetangga (RT) 10.966 RT

4. Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksanaan, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam badan daerah, dan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam inspektorat.

Perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan mempunyai intensitas tinggi dibentuk kecamatan dan kelurahan.

Dalam rangka membentuk Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas.

Sebagaimana dimatkan dalam Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah dan diamanatkan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Magelang, susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang meliputi :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah berjumlah 18 (delapan belas) terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran;
 6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
 8. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 15. Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub Peternakan dan bidang Kelautan dan Perikanan;
 16. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 17. Dinas Pertanian dan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan; dan
 18. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
- e. Badan Daerah berjumlah 3 (tiga) terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan.
- f. Kecamatan berjumlah 21 (dua puluh satu) terdiri dari:
1. Kecamatan Salaman;
 2. Kecamatan Borobudur;

3. Kecamatan Ngluwar;
4. Kecamatan Salam;
5. Kecamatan Srumbung;
6. Kecamatan Dukun;
7. Kecamatan Sawangan;
8. Kecamatan Muntilan;
9. Kecamatan Mungkid;
10. Kecamatan Mertoyudan;
11. Kecamatan Tempuran;
12. Kecamatan Kajoran;
13. Kecamatan Kaliangkrik;
14. Kecamatan Bandongan;
15. Kecamatan Candimulyo;
16. Kecamatan Pakis;
17. Kecamatan Ngablak;
18. Kecamatan Grabag;
19. Kecamatan Tegalrejo;
20. Kecamatan Secang; dan
21. Kecamatan Windusari.

Selain Perangkat Daerah sebagaimana diatas, dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan berjumlah 5 (lima) terdiri dari:

- a. Kelurahan Muntilan pada Kecamatan Muntilan;
- b. Kelurahan Mendut pada Kecamatan Mungkid;
- c. Kelurahan Sawitan pada Kecamatan Mungkid;
- d. Kelurahan Sumberrejo pada Kecamatan Mertoyudan; dan
- e. Kelurahan Secang pada Kecamatan Secang.

Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Magelang adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh Bupati dibantu oleh perangkat-perangkat Pemerintah Kabupaten Magelang yaitu:

- a. Tugas Sekretariat Daerah adalah membantu tugas Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dengan fungsinya:
 - 1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah daerah;
 - 2) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

- 3) Pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah;
 - 4) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Tugas Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, dengan fungsinya:
- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - 3) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.
- c. Tugas Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidangnya dengan fungsinya:
- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2) Penyediaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Tugas Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan dengan fungsinya:
- 1) Perumusan kebijakan pemerintah Kecamatan;
 - 2) Penyelenggaraan administrasi pemerintah kecamatan;
 - 3) Pengendalian sumberdaya aparatur, prasarana dan sarana pemerintah Kecamatan;
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Isu Strategis Organisasi

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magelang terdapat 6 (enam) isu strategis yang terdiri dari :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) dan kehidupan beragama
 - a. Perlunya peningkatan kualitas SDM melalui pemberian pendidikan setara dan layak serta peningkatan kompetensi para pendidik;
 - b. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan serta pemenuhan prasarana pelayanan kesehatan;

- c. Perlunya pemberdayaan rakyat miskin untuk meningkatkan kemandirian masyarakat;
 - d. Perlunya penguatan modal sosial dan budaya lokal;
 - e. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana keagamaan;
 - f. Perlunya pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
2. Perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing
- a. Perlunya peningkatan pendapatan masyarakat berbasis Usaha Menengah Kecil Mikro;
 - b. Perlunya peningkatan kemandirian perekonomian daerah yang mampu berdaya saing;
 - c. Perlunya peningkatan pengembangan pertanian (termasuk peternakan dan perikanan), pariwisata dan industri kecil/menengah sebagai sektor unggulan daerah;
 - d. Perlunya revitalisasi pasar tradisional, membangun pusat perdagangan bersama bagi hasil pertanian, peternakan dan produk UMKM, dan membangun jejaring kemitraan dengan pihak lain;
 - e. Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh.
3. Pembangunan prasarana dan sarana daerah
- a. Perlunya pembangunan sarana prasarana jalan, jembatan dan irigasi guna menunjang peningkatan ekonomi masyarakat;
 - b. Perlunya peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang layak dan bantuan stimulan guna peningkatan angka rumah layak huni;
 - c. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan guna peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
 - d. Perlunya upaya pengembangan sumber energi alternatif berupa energi baru terbarukan seperti mikro hidro, *solar cell*, dan panas bumi guna memenuhi layanan pasokan listrik.
4. permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup
- a. Perlunya pelestarian lingkungan hidup dengan adanya perencanaan pembangunan berkelanjutan;
 - b. Perlunya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. Perlunya 'pencegahan' dan pengendalian pencemaran lingkungan.

5. Tata kelola pemerintahan
 - a. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik dengan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b. Perlunya percepatan reformasi birokrasi dalam upaya menuju *Good Governance*;
 - c. Perlu peningkatan partisipasi masyarakat melalui optimalisasi pelaksanaan Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten.
6. Keamanan dan ketenteraman masyarakat
 - a. Perlunya optimalisasi penegakan hukum oleh aparaturnya yang dibantu masyarakat;
 - b. Perlunya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sinergitas pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat.

F. Sistematika

Sistematika penulisan dokumen LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, peta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2018 .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini diuraikan anggaran jumlah dan realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2018 .

C. Prestasi

Sub Bab ini berisi prestasi yang diarah oleh Kabupaten Magelang.

BAB IV PENUTUP

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan keinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran berisikan data pendukung berupa Struktur organisasi, Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja, Realisasi Anggaran Tahun anggaran 2018 dan dokumentasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2018 dan ditetapkan dalam bentuk Dokumen

PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun bersangkutan. Perjanjian Kinerja ini hakikatnya merupakan komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2018 .

Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2018 telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang
Tahun 2018 pada Indikator Makro

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
INDIKATOR MAKRO KEPALA DAERAH					
A.	MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama				
	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Agama Yang Semakin Meningkat	1.	Angka Usia Harapan Hidup	70,50	tahun
		2.	Indeks Gini	0,300	indeks
		3.	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,4056	indeks
		4.	Persentase penduduk miskin	9,00	persen
		5.	IPM	75,54	indeks

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
B.	MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing				
	Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah yang berdaya Saing dan Berbasis Pada Potensi Lokal Daerah	6.	Pertumbuhan PDRB	6,2 – 6,7	persen
		7.	PDRB per kapita	13,75	Juta Rp
		8.	Laju inflansi	4±1	persen
		9.	Rasio penduduk yang bekerja	97,57	persen
		10.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	35,30	Rp.(juta)
		11.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	36,56	persen
		12.	Nilai tukar petani	106,85	
C	MISI III : Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah				
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Daerah	13.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,0019	
D	MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup				
	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Maksimal dengan Berbasis Kelestarian Lingkungan	14.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	76,60	persen
		15.	Luas Wilayah Industri	0,37	persen
E	MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis				
	Meningkatnya Manajemen Sistem Pemerintahan Daerah yang Baik, Modern dan Demokratis	16.	Lama Proses Perijinan (Hari)	9	hari
		17.	Opini BPK 'WTP'	WTP	
		18.	Nilai AKIP	B	
F	MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat				
	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Serta Kesadaran dan Kepatuhan Hukum	19.	Angka kriminalitas	1,82	indek

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah tahun 2018, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2018

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2018 pada Indikator Makro terdapat 6 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja. Selain Indikator makro terdapat indikator mikro yang diukur sebagai kinerja Kepala Daerah. Jumlah sasaran strategis pada indikator

mikro berjumlah 31 sasaran strategis dengan 166 indikator kinerja sasaran strategis, secara terinci sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang
Tahun 2018 pada Indikator Mikro

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
Indikator Mikro					
A.	MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama				
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan	1	Kasus Kematian Ibu Melahirkan ^{*)}	11	kasus
		2	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran ^{*)}	6,50	kasus
		3	Persentase Balita Gizi Buruk ^{*)}	0,15	persen
		4	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup ^{*)}	8,00	Permil
		5	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	persen
		6	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100	persen
		7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	persen
		8	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	90,00	persen
		9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	persen
		10	Cakupan Kunjungan Bayi	95,00	persen
2	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol	11	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1,60	persen
		12	Rasio Akseptor KB	81,45	persen
		13	Cakupan Peserta KB Aktif	80,84	persen
		14	Keluarga Pra Sejahtera	21,28	persen
		15	Keluarga Sejahtera I	14,88	persen
3	Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkatkan, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan	16	APK PAUD	54,39	persen
		17	Angka melek huruf	93,85	persen
		18	Angka rata-rata lama sekolah	9,00	persen
			Angka Partisipasi Murni :		
		19	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,79	persen
		20	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	81,96	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		21	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	64,06	persen
			<i>Angka partisipasi kasar</i>		
		22	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	101,94	persen
		23	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	97,06	persen
		24	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	75,10	persen
			<i>Angka Putus Sekolah:</i>		
		25	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,14	persen
		26	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,59	persen
		27	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,81	persen
			<i>Angka Kelulusan:</i>		
		28	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,98	persen
		29	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,99	persen
		30	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,98	persen
			<i>Rerata Nilai UN :</i>		
		31	Rerata Nilai UN SD/MI	7,72	nilai
		32	Rerata Nilai UN SMP/MTs	6,48	nilai
		33	Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK	7,16	nilai
		34	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	86,00	persen
			<i>Angka Melanjutkan :</i>		
		35	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	89,62	persen
		36	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA	70,70	persen
		37	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	84,68	persen
		38	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	90,00	persen
4	Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga	39	Jumlah Organisasi Pemuda	26	organisasi
		40	Jumlah Organisasi Olah Raga	35	organisasi
		41	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	18	kegiatan
		42	Jumlah Kegiatan Olah Raga	24	kegiatan
		43	Lapangan Olah Raga	1,50	permil
5	Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui	44	Jumlah Perpustakaan	794	unit
		45	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	44.447	orang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
	Peningkatan Budaya Baca	46	Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	2,20	persen
6	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	47	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2,54	persen
		48	Rasio KDRT	0,025	persen
		49	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	100	persen
7	Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	50	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	34	unit
		51	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	18,50	persen
8	Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila	52	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	38	kali
		53	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	18	unit
		54	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	66,95	persen
9	Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan	55	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	17,00	persen
		56	Cakupan Kelompok Binaan PKK	33,87	persen
		57	Jumlah LSM	4	LSM
B.	MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing				
1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja	58	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	75,65	persen
		59	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	1,28	persen
		60	Pencari Kerja yang Ditempatkan	48,32	persen
		61	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,10	persen
		62	Keselamatan dan Perlindungan	77,00	persen
		63	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	100	persen
2	Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal	64	Persentase Koperasi Aktif	77,95	persen
		65	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	106.387	UKM non BPR/LKM UKM
		66	Jumlah BPR/LKM	379	BPR/LKM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		67	Usaha Mikro dan Kecil	0,37	persen
3	Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah	68	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1.085	investor
		69	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	665.163	Juta rupiah
		70	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	28,19	persen
		71	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	164	milyar rupiah
4	Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat	72	Ketersediaan Pangan Utama Beras	188,06	persen
		73	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	93,1	
5	Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar			
		74	Produktivitas Padi	60,09	Kw/ha
		75	Produksi Padi	355.617	Ton/th
		76	Produktivitas Jagung	59,28	Kw/ha
		77	Produksi Jagung	74.307	Ton/th
		78	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	20,89	persen
		79	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)	72,22	persen
		80	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB	7,60	persen
		81	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	12,86	persen
		82	Cakupan Bina Kelompok Petani	2,5	persen
			Produksi Hewan ternak		
		83	Sapi potong	1.825.656	kg
		84	Kerbau	530	kg
		85	Kambing	777.711	kg
		86	Domba	1.093.751	kg
			Produksi Hewan Unggas		
		87	Ayam Pedaging	9.761,9	ton
88	Ayam Ras Petelur	999,59	ton		
89	Ayam Buras	1.215,67	ton		
90	Itik	92,260	ton		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		91	Sapi Perah	731,528	liter
			Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari)		
		92	Daging	5,95	gr/kap/hr
		93	Telur	4,35	gr/kap/hr
		94	Susu	0,08	gr/kap/hr
6	Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan	95	Produksi Perikanan (Benih)	1.750	juta ekor
		96	Produksi Perikanan Budidaya	16.800	ton
		97	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	253,43	ton
		98	Konsumsi Ikan	15,30	Kg/kap/tahun
		99	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian (%)	2,62	persen
7	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	100	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	10,01	persen
		101	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	88,8	Juta US\$
		102	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	1,79	persen
8	Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah	103	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	2,81	persen
		104	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	18,03	persen
		105	Pertumbuhan Industri.	3,76	persen
9	Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah	106	Kunjungan Wisata Manca Negara	723.151	orang
		107	Kunjungan Wisata Nusantara	5.963.149	orang
		108	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	6,63	persen
C. MISI III: Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah					
1	Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru	109	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	69,49	persen
		110	Rasio Jaringan Irigasi	30,57	persen
		111	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	64,60	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
2	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat	112	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	83,00	persen
		113	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	2,50	persen
		114	Rumah Layak Huni (%)	80,00	persen
3	Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan	115	Persentase Pertambahan Berijin	40	persen
		116	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	2,64	persen
4	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan	117	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	3.705.271	orang
		118	Jumlah Ijin Trayek	1.057	ijin
		119	Rasio Uji Kir Kendaraan	96,3	persen
		120	Jumlah Terminal Bis	8	terminal
		121	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	32	menit
		122	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji	ada	
		123	Pemasangan Rambu-Rambu	79,00	persen
D.	MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup				
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam	124	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	>30	persen
		125	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	3,85	persen
		126	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	0	persen
		127	Luas Kawasan Lindung (ha)	25,886	ha
		128	Luas Kawasan Budidaya (ha)	8,2687	Ha
		129	Jumlah IMB yang Dikeluarkan	645	IMB
		130	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	56,00	persen
2	Terciptanya Pengelolaan	131	Persentase Penanganan Sampah	29,00	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
	Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya	132	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	1,90	persen
		133	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	30	persen
		134	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	1,78	persen
		135	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	2.300.000	m ³
3	Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana	136	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	2.680	ha
		137	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	4,70	persen
E.	MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis				
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah	138	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada	
		139	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	
		140	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	
		141	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100	persen
2	Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	142	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	0,44	
		143	Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	99,64	
		144	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah	4	
		145	Penegakan PERDA	75	persen
		146	Persentase Peningkatan PAD	12,02	persen
		147	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	ada	
		148	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	ada	
		149	Buku "PDRB Kabupaten"	ada	
		150	Pengelolaan Arsip Secara Baku	89,61	persen
151	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	89,61	orang		
3	Meningkatnya Hubungan Kerjasama	152	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	6/0	penyiaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
	yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak	153	Web Site Milik Pemerintah Daerah	Ada	
		154	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	9/3	
4	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Cakil	155	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	91,81	persen
		156	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	98,77	persen
		157	Rasio Pasangan Berakte Nikah	1,80	persen
		158	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	
		159	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	33,80	persen
		160	Penyelesaian Izin Lokasi	100	persen
F.	MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat				
1	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat	161	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	12	kegiatan
		162	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	12	kegiatan
2	Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat	163	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	100	persen
		164	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100	persen
		165	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	90	persen
		166	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	100	persen

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2018, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2018

Catatan : *) Indikator Negatif

Perjanjian Kinerja Tahun anggaran 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang juga memuat besaran anggaran dalam melaksanakan perjanjian kinerja. Jumlah anggaran pada pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2018 mengacu pada jumlah perubahan anggaran tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2018
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
	Urusan Pendidikan		
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.011.476.000	- Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak - Pendapatan Asli Daerah - Hibah - SILPA
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	137.987.468.074	
3	Program Pendidikan Non Formal	1.684.000.000	
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.862.760.000	
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	31.096.400.250	
	Urusan Kesehatan		
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	8.483.159.800	
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	16.918.768.500	
8	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	665.851.000	
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	365.490.000	
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	397.743.000	
11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	191.672.000	
12	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	22.876.807.680	
13	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	23.069.380.010	
14	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	23.455.000	
15	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2.148.918.000	
16	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	186.373.768.848	
17	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata	105.015.249.070	
18	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	165.000.000	
19	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	3.000.000	
20	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	3.000.000	
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
21	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	94.650.557.715	
22	Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong	7.294.629.700	
23	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan	62.376.706.500	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
24	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	50.000.000	
25	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	599.400.000	
26	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi.Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	19.397.311.359	
27	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya	150.000.000	
28	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5.464.459.890	
29	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	830.638.800	
30	Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	320.066.699	
31	Program Perencanaan Tata Ruang	125.000.000	
32	Program Pemanfaatan Ruang	150.000.000	
33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	600.000.000	
34	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1.406.000.000	
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
35	Program Pengembangan Perumahan	1.417.419.900	
36	Program Lingkungan Sehat Perumahan	2.645.542.125	
37	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	5.365.244.000	
38	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	23.772.425.000	
	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
39	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.896.643.500	
40	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.153.941.000	
41	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	121.780.000	
42	Program pengembangan wawasan kebangsaan	444.561.000	
43	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	232.788.000	
44	Program pendidikan politik masyarakat	162.900.000	
45	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	5.022.199.960	
46	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	24.157.500	
	Urusan Sosial		
47	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.510.952.000	
48	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	426.356.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
49	Program pembinaan anak terlantar	100.000.000	
50	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	195.000.000	
51	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	35.923.000	
52	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	2.002.284.000	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
Urusan Tenaga Kerja			
53	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.265.000.000	
54	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.059.675.000	
55	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	202.840.000	
56	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	267.819.000	
57	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	210.000.000	
58	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	205.820.000	
59	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	767.045.750	
Urusan Pangan			
60	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	935.908.075	
Urusan Pertanahan			
61	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	98.325.000	
62	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	42.496.000	
Urusan Lingkungan Hidup			
63	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	3.630.005.837	
64	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	10.472.302.200	
65	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.746.222.000	
66	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	265.000.000	
67	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	118.696.101	
68	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	650.000.000	
69	Program Pengembangan Kapasitas dan kemampuan Laboratorium lingkungan	121.452.000	
70	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan.	2.745.997.000	
Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil			
71	Program Penataan Administrasi Kependudukan	5.468.598.500	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
72	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	6.119.403.450	
73	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	619.866.900	
74	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	611.037.000	
75	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.647.504.250	
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
76	Program Keluarga Berencana	7.402.160.000	
77	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	47.500.000	
78	Program pelayanan Kontrasepsi	420.000.000	
79	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	256.644.000	
80	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	30.000.000	
	Urusan Perhubungan		
81	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	444.403.000	
82	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	270.109.000	
83	Program peningkatan pelayanan angkutan	1.661.711.000	
84	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	170.000.000	
85	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	818.525.000	
	Urusan Komunikasi dan Informatika		
86	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	4.244.702.000	
87	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	2.640.571.000	
88	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	176.915.000	
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
89	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	162.680.000	
90	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	756.588.000	
91	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	638.064.000	
92	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	247.601.250	
	Urusan Penanaman Modal		
93	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	525.981.800	
94	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	390.840.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
95	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	78.165.000	
	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
96	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	457.599.000	
97	Program peningkatan peran serta kepemudaan	578.326.500	
98	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	3.802.853.494	
99	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	89.720.000	
100	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	126.910.000	
101	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	5.196.470.000	
	Urusan Statistik		
102	Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	402.205.000	
	Urusan Kebudayaan		
103	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.468.118.000	
104	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	330.473.000	
105	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.165.191.000	
	Urusan Perpustakaan		
106	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.044.487.500	
	Urusan Kearsipan		
107	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	41.050.000	
108	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	226.000.000	
109	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	45.000.000	
110	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	243.021.000	
	Urusan Pilihan		
	Urusan Kelautan dan Perikanan		
111	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.432.254.349	
112	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	441.030.000	
113	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	45.105.000	
	Urusan Pariwisata		
114	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.445.945.000	
115	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	19.218.103.920	
116	Program Pengembangan Kemitraan	325.601.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
	Urusan Pertanian		
117	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	617.572.100	
118	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	368.291.975	
119	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan	266.615.650	
120	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	17.264.886.000	
121	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	737.143.900	
122	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	353.060.850	
123	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3.128.684.000	
124	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	9.366.279.125	
125	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan	48.026.000	
	Urusan Perdagangan		
126	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	116.351.710.436	
127	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	497.533.000	
128	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	182.552.000	
129	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	507.815.000	
130	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan	217.263.000	
	Urusan Perindustrian		
131	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	849.500.000	
132	Program Penataan Struktur Industri	705.245.000	
133	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	25.986.000	
	Urusan Transmigrasi		
134	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	194.000.000	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
	Urusan Administrasi Pemerintahan		
135	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.115.570.000	
136	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	553.446.500	
137	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	44.600.000	
138	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1.707.515.600	
139	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	81.312.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
140	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	39.861.000	
141	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	19.959.606.500	
142	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.418.619.850	
	Urusan Pengawasan		
143	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	636.364.800	
144	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	90.000.000	
	Urusan Perencanaan		
145	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.293.039.950	
146	Program Pengembangan Data /Informasi	939.808.000	
147	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	155.364.500	
148	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	801.446.900	
149	Program Kerjasama Pembangunan	157.000.000	
150	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	289.705.000	
151	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	351.396.000	
152	Urusan Keuangan		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	16.837.848.915	
	Urusan Kepegawaian		
153	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.940.888.500	
154	Peningkatan Manajemen Kepegawaian	649.395.650	
155	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	5.169.213.360	
	Urusan Penelitian dan Pengembangan		
156	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.357.257.500	
	JUMLAH :	1.091.339.317.317	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, 2018

Untuk mendukung pelaksanaan urusan anggaran APBD Kabupaten Magelang setelah perubahan anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 1.091.339.317.317 (*Satu trilyun sembilan puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus tiga belas rupiah*), anggaran tersebut terdiri dari 156 program untuk mendukung pencapaian kinerja pada 31 sasaran strategis dengan 166 Indikator

Kinerja. Sumber pendanaan terdiri dari : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Hibah dan SILPA.

Jumlah anggaran tersebut merupakan anggaran untuk mendukung program di tiap urusan, sedangkan 4 program (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan) yang merupakan urusan seluruh SKPD tidak dimasukkan dan Perjanjian Kinerja, dengan jumlah anggaran Rp. 84.575.026.683 (*Delapan puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*). Selingga keseluruhan total APBD Kabupaten Magelang sebesar Rp. 1.175.914.344.000 (*Satu triliyun seratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah*).

Untuk mengetahui dukungan program dan pendanaan dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja, maka dilakukan pemetaan program dan sasaran strategis terhadap capaian indikator strategis pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4.
Dukungan Program dan Pendanaan Sasaran Strategis
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	8
A. MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama								
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan	1	Kasus Kematian Ibu Melahirkan*)	11	kasus	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2.148.918.000	0,1969
						Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	186.373.768.848	17,0775
						Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan RS mata	105.015.249.070	9,6226
						Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	3.000.000	0,0003
		2	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran *)	6.50	kasus	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	3,000,000	0,0003
						Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	191.672.000	0,0176
		3	Persentase Balita Gizi Buruk *)	0.15	persen	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	665.851.000	0,0610
						Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	23.455.000	0,0021
		4	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup *)	8,00	Permil	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	165.000.000	0,0151
		5	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	persen	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	365.490.000	0,0335

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	8
		6	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100	persen	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	8.483.159.800	0,7773
		7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	persen	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	16.918.768.500	1,5503
		8	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	90	persen	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	397.743.000	0,0364
		9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	persen	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	22.876.807.680	2,0962
		10	Cakupan Kunjungan Bayi	95	persen	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan praspuskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	23.069.380.010	2,1139
2	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol	11	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1,60	persen	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	256.644.000	0,0235
		12	Rasio Akseptor KB	81,45	persen	Program Keluarga Berencana	7.402.160.000	0,6783
		13	Cakupan Peserta KB Aktif	80,84	persen	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	47.500.000	0,0044
		14	Keluarga Pra Sejahtera	21,28	persen	Program pelayanan Kontrasepsi	420.000.000	0,0385
		15	Keluarga Sejahtera I	14,88	persen			
3	Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkatkan,	16	APK PAUD	54,39	persen	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.011.476.000	0,0927
		17	Angka melek huruf	93,85	persen	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	31.096.400.250	2,8494

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	8
	dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan	18	Angka rata-rata lama sekolah	9,00	Tahun	Program Pendidikan Non Formal	1.684.000.000	0,1543
			Angka Partisipasi Murni :					
		19	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,79	persen			
		20	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	81,96	persen			
		21	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	64,06	persen			
			Angka partisipasi kasar					
		22	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	101,94	persen	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	137.987.468.074	12,6439
		23	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	97,06	persen			
		24	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	75,10	persen			
			Angka Putus Sekolah:					
		25	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,14	persen			
		26	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,59	persen			
		27	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,81	persen			
			Angka Kelulusan:					
	28	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,98	persen				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	8
		29	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,99	persen	Program Pendidikan Menengah	0	0.00
		30	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,98	persen			
			<i>Rerata Nilai UN :</i>					
		31	Rerata Nilai UN SD/MI	7,72	nilai			
		32	Rerata Nilai UN SMP/MTs	6,48	nilai			
		33	Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK	7,16	nilai			
		34	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	86,00	persen	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.862.760.000	0,1707
			<i>Angka Melanjutkan :</i>					
		35	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	89,62	persen			
		36	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA	70,70	persen			
37	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	84,68	persen					
	38	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	90,00	persen				
4	Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga	39	Jumlah Organisasi Pemuda	26	organisasi	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	457.599.000	0,0419
						Program peningkatan peran serta kepemudaan	578.326.500	0,0530
						Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan	89.720.000	0,0082

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					kecakapan hidup pemuda			
		40	Jumlah Organisasi Olah Raga	35	organisasi	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	3.802.853.494	0,3485
		41	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	18	kegiatan	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	126.910.000	0,0116
		42	Jumlah Kegiatan Olah Raga	24	kegiatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	5.196.470.000	0,4762
		43	Lapangan Olah Raga	1,50	permil			
5	Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca	44	Jumlah Perpustakaan	794	unit	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.044.487.500	0,0957
		45	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	44.447	orang			
		46	Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	2,20	persen			
6	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	47	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2,54	persen	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	210.000.000	0,0192
		48	Rasio KDRT	0,025	persen	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	267.819.000	0,0245
		49	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	100	persen	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	205.820.000	0,0189
						Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	30.000.000	0,0027
					Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam	767.045.750	0,0703	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	8
						pembangunan		
7	Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	50	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	34	unit	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.510.952.000	0,1384
		51	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	18,50	persen	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	426.356.000	0,0391
						Program pembinaan anak terlantar	100.000.000	0,0092
						Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	195.000.000	0,0179
						Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	35.923.000	0,0033
						Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	35.923.000	0,0033
						Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	2.002.284.000	0,1835
8	Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila	52	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	38	kali	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.165.191.000	0,1068
		53	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	18	unit	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.468.118.000	0,1345
		54	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	66,95	persen	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	330.473.000	0,0303

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	8
9	Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan	55	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	17,00	persen	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	7.781.114.450	0,7130
		56	Cakupan Kelompok Binaan PKK	33,87	persen	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.647.504.250	0,1510
		57	Jumlah LSM	4	LSM	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	611.037.000	0,0560
						Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	619.866.900	0,0568
B.	MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing							
1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja	58	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	75,65	persen	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.265.000.000	0,1159
						Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	194.000.000	0,0178
		59	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	1,28	persen	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.059.675.000	0,0000
		60	Pencari Kerja yang Ditempatkan	48,32	persen	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	202.840.000	0,0971
		61	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,10	persen			
62	Keselamatan dan Perlindungan	77,00	persen					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	8
		63	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	100	persen			
2	Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal	64	Persentase Koperasi Aktif	77,95	persen	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	638.064.000	0,0585
		65	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	106.387	UKM non BPR/ LKM UKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	162.680.000	0,0149
		66	Jumlah BPR/LKM	379	BPR/LKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	756.588.000	0,0693
		67	Usaha Mikro dan Kecil	0,37	persen	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	247.601.250	0,0227
3	Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah	68	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1.085	investor	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	525.981.800	0,0482
		69	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	665.163	Juta rupiah	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	507.815.000	0,0465
		70	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	28,19	persen	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	390.840.000	0,0358
		71	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	164	milyar rupiah	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	78.165.000	0,0072

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	8
4	Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat	72	Ketersediaan Pangan Utama Beras	188,06	persen	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	935.908.075	0,0858
		73	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	93,1				
5	Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.		Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar					
		74	Produktivitas Padi	60,09	Kw/ha	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	17.264.886.000	1,5820
		75	Produksi Padi	355.617	Ton/th	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	617.572.100	0,0566
		76	Produktivitas Jagung	59,28	Kw/ha	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	368.291.975	0,0337
		77	Produksi Jagung	74.307	Ton/th	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan	266.615.650	0,0244
		78	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	20,89	Persen	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	737.143.900	0,0675
		79	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)	72,22	Persen			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	8
		80	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB	7,60	Persen			
		81	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	12,86	Persen			
		82	Cakupan Bina Kelompok Petani	2,5	Persen			
			Produksi Hewan ternak					
		83	Sapi potong	1.825.656	Kg	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	353.060.850	0,0324
		84	Kerbau	530	Kg	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3.128.684.000	0,2867
		85	Kambing	777.711	Kg			
		86	Domba	1.093.751	Kg			
			Produksi Hewan Unggas					
		87	Ayam Pedaging	9.761,90	Ton	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	9.366.279.125	0,8582
		88	Ayam Ras Petelur	999,59	Ton	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan	48.026.000	0,0044
		89	Ayam Buras	1.215,67	Ton			
		90	Itik	92,260	Ton			
		91	Sapi Perah	731,528	Liter			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	8
			Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari)					
		92	Daging	5,95	gr/kap/hr			
		93	Telur	4,35	gr/kap/hr			
		94	Susu	0,08	gr/kap/hr			
6	Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan	95	Produksi Perikanan (Benih)	1.750	juta ekor	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	441.030.000	0,0404
		96	Produksi Perikanan Budidaya	16.800	Ton	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.432.254.349	0,1312
		97	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	253,43	Ton			
		98	Konsumsi Ikan	15,30	Kg/kap/tahun			
		99	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian (%)	2,62	Persen			
7	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	100	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	10,01	Persen	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	116.351.710.436	9,8946
		101	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	88,8	Juta US\$	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	497.533.000	0,0423
		102	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	1,79	Persen	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	182.552.000	10,6614
						Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan	217.263.000	0,0456

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	8
8	Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah	103	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	2,81	Persen	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	25.986.000	0,0167
		104	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	18,03	Persen			
		105	Pertumbuhan Industri.	3,76	Persen	Program Penataan Struktur Industri	705.245.000	0,0646
						Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	849.500.000	0,0778
9	Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah	106	Kunjungan Wisata Manca Negara	723.151	Orang	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	19.218.103.920	1,7610
		107	Kunjungan Wisata Nusantara	5.963.149	Orang	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.445.945.000	0,1325
		108	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	6,63	Persen	Program Pengembangan Kemitraan	325.601.000	0,0298
C.	MISI III: Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah							
1	Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru	109	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	69,49	Persen	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	94.650.557.715	8,6729
						Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan	62.376.706.500	5,7156
						Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	50.000.000	0,0046
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	599.400.000	0,0549
						Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1.406.000.000	0,1288
						Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	830.638.800	0,0761

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	8
		110	Rasio Jaringan Irigasi	30,57	Persen	Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong	7.294.629.700	0,6684
		111	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	64,60	Persen	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi.Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	19.397.311.359	1,7774
						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5.464.459.890	0,5007
						Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	320.066.699	0,0293
2	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat	112	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	83,00	Persen	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	23.772.425.000	2,1783
		113	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	2,50	Persen	Program Pengembangan Perumahan	1.417.419.900	0,1299
		114	Rumah Layak Huni (%)	80	Persen	Program Lingkungan Sehat Perumahan	2.645.542.125	0,2424
3	Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan	115	Persentase Pertambangan Berijin	40	Persen			
		116	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	2,64	Persen			
4	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang	117	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	3.705.271	Orang	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	444.403.000	0,0407

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	8
	Perhubungan	118	Jumlah Ijin Trayek	1.057	Ijin			
		119	Rasio Uji Kir Kendaraan	96,3	Persen			
		120	Jumlah Terminal Bis	8	terminal	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	170.000.000	0,0156
		121	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	32	Menit	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	818.525.000	0,0750
		122	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji	Ada				
		123	Pemasangan Rambu-Rambu	79,00	Persen	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	270.109.000	0,0248
D.	MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup							
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam	124	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	>30	Persen	Program Perencanaan Tata Ruang	125.000.000	0,0115
		125	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	3,85	Persen			
		126	Ruang Publik yang Berubah	0	Persen	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	600.000.000	0,0550

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peruntukannya			Program Pemanfaatan Ruang	150.000.000	0,0137
		127 Luas Kawasan Lindung (ha)	25.886	Ha			
		128 Luas Kawasan Budidaya (ha)	82,687	Ha			
		129 Jumlah IMB yang Dikeluarkan	645	IMB			
		130 Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	38	Persen			
2	Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya	131 Persentase Penanganan Sampah	29	Persen	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	10.472.302.200	0,9596
		132 Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	1,90	Persen	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	3.630.005.837	0,3326
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	265.000.000	0,0243
		133 Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	30	Persen	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.746.222.000	0,1600

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	8
		134	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	1,78	Persen	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan	2.745.997.000	0,2516
		135	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	2.300.000	m ³	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	118.696.101	0,0109
						Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	650.000.000	0,0596
						Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	45.105.000	0,0041
						Program Pengembangan Kapasitas dan kemampuan Laboratorium lingkungan	121.452.000	0,0111
3	Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana	136	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	2.680	Ha			
		137	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	4,70	Persen			
E.	MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis							
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya	138	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada		Program Pengembangan Data /Informasi	939.808.000	0,0799

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	8
	Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah	139	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.293.039.950	0,0861
		140	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada		Program Kerjasama Pembangunan	157.000.000	0,2101
		141	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100	persen	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	289.705.000	0,0144
						Program Perencanaan Sosial dan Budaya	801.446.900	0,0265
						Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	351.396.000	0,0734
						Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	402.205.000	0,0369
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	155.364.500	0,0142						
2	Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya	142	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	0.44		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.940.888.500	0,1778
						Peningkatan Manajemen Kepegawaian	649.395.650	0,0595
						Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	5.169.213.360	0,4737

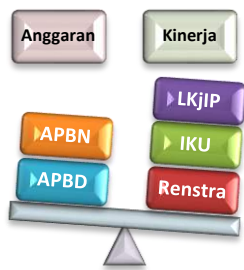
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	8
	Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	143	Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	99,64		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	44.600.000	0,0038
		144	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah	4		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.418.619.850	0,0041
						Program Penataan Daerah Otonomi Baru	39.861.000	0,2216
						Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	19.959.606.500	0,0037
						Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	81.312.000	1,8289
		145	Penegakan PERDA	75	persen	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1.707.515.600	0,0075
						Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.115.570.000	0,1565
		146	Persentase Peningkatan PAD	12,02	persen	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	16.837.848.915	0,1022
						Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	553.446.500	1,5429
		147	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	ada		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	636.364.800	0,0507
						Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	90.000.000	0,0583

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	8
		148	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	ada		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.357.257.500	0,2160
		149	Buku "PDRB Kabupaten"	ada				
		150	Pengelolaan Arsip Secara Baku	89,61	persen	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	226.000.000	0,0207
						Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	45.000.000	0,0041
		151	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	282	orang	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	41.050.000	0,0038
						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	243.021.000	0,0223
3	Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak	152	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	6/0	penyiaran	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	4.244.702.000	0,3889
		153	Web Site Milik Pemerintah Daerah	Ada		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	176.915.000	0,0162
		154	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	9/3		Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	2.640.571.000	0,2420
4	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Capil	155	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	91,81	persen	Program Penataan Administrasi Kependudukan	5.468.598.500	0,5011
		156	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	98,77	persen			
		157	Rasio Pasangan Berakte Nikah	1,80	persen			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	8
		158	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah				
		159	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	33,80	persen	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	98.325.000	0,0090
		160	Penyelesaian Izin Lokasi	100	persen	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	42.496.000	0,0039
F.	MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat							
1	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat	161	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	12	kegiatan	Program pengembangan wawasan kebangsaan	444.561.000	0,0407
		162	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	12	kegiatan	Program pendidikan politik masyarakat	162.900.000	0,0149
						Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.153.941.000	0,1057
						Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	232.788.000	0,0213
						Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.896.643.500	0,3571
						Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	121.780.000	0,0112
						Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	24.157.500	0,0022
2	Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat	163	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	100	persen	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	5.022.199.960	0,4602

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	7	8
		164	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100	persen	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	5.365.244.000	0,4916
		165	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	90	persen			
		166	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	100	persen			
Jumlah :							1.091.339.317.317	100.00

Sumber : BPPKAD dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2018, data diolah



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Kepala

Daerah Kabupaten Magelang merupakan wujud kewajiban Kepala Daerah Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang untuk tahun 2018 . Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang berusaha konsisten dalam hal pelaporan akuntabilitas, sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang dilaksanakan dan diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis, sedangkan apa yang ditulis merupakan apa yang direncanakan.

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja Organisasi.
- B. Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja
- C. Prestasi

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

A. Pengukuran Kinerja Organisasi

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 dan dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran strategis, dan juga dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD.

Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis indikator, yaitu : indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

➤ Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja, dengan rumus:






$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi tanda bintang (*) pada indikator kinerja yang dinilai, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Negatif)} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1.
Interval Nilai, Predikat Penilaian dan Kode warna

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Pemendagri 86 tahun 2018, diolah

2. Capaian Kinerja Sasaran

Capaian kinerja per sasaran strategis pada tahun 2018 dilakukan analisis dengan dilakukan perbandingan antar capaian kinerja dan target kinerja tahun 2018 dan target kinerja hingga akhir periode RPJMD pada tahun 2019, hasil analisa sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Pada Indikator Makro

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	Capaian 2018			Akhir RPJMD (2019)	
					Target	Kinerja	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Agama Yang Semakin Meningkatkan	1 Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	73,27	70,50	73,39	104,10	70,56	104,01
		2 Indeks Gini *)	Indeks	0,31	0,300	0,316	94,67	0,295	92,88
		3 Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,41	0,4056	0,4057	99,98	0,4046	99,73
		4 Persentase penduduk miskin *)	Persen	12,42	9,00	11,23	75,22	8,00	59,63
		5 IPM	Indeks	74,74	75,54	74,17	98,19	75,94	97,67
2	Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah yang berdaya Saing dan Berbasis Pada Potensi Lokal Daerah	6 Pertumbuhan PDRB	Persen	5,43	6,2-6,7	5,06	81,61	6,4 - 7,1	79,06
		7 PDRB per kapita	Juta Rp	22,35	13,75	25,92	188,51	15,06	172,11
		8 Laju inflansi	Persen	3,47	4±1	2,66	111,33	4±1	111,33
		9 Rasio penduduk yang bekerja	persen	96,79	97,57	96,79	99,20	97,97	98,80
		10 Pengeluaran konsumsi rumah tangga	Rp,(juta)	51,74	35,30	44,72	126,69	38,38	116,52
		11 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	persen	55,80	36,56	47,03	128,64	37,03	127,01
		12 Nilai tukar petani		106,70	106,85	103,31	96,69	106,99	96,56
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Daerah	13 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan		0,0029	0,0019	0,0029	152,63	0,0017	170,59
4	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Maksimal dengan Berbasis Kelestarian Lingkungan	14 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	persen	83,09	76,60	84,61	110,46	76,8	110,17
		15 Luas Wilayah Industri	persen	0,34	0,37	0,37	100,00	0,37	100,00
5	Meningkatkan Manajemen Sistem Pemerintahan Daerah yang Baik, Modern dan Demokratis	16 Lama Proses Perijinan (Hari)	hari	9	9	9	100	9	100,00
		17 Opini BPK 'WTP'		WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
		18 Nilai AKIP		CC	B	CC	50,00	B	50,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian 2017	Capaian 2018			Akhir RPJMD (2019)	
						Target	Kinerja	%	Target	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
6	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Serta Kesadaran dan Kepatuhan Hukum	19	Angka kriminalitas *)	indek	0,26	1,82	0,26	185,71	1,45	182,07
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran :								113,32		111,45

Sumber : Bappeda dan Litbangda 2018, data diolah.

Keterangan : *) Indikator negatif

Berdasarkan tabel di atas dalam capaian kinerja sasaran pada indikator makro kepala daerah tahun 2018 rata-rata kinerja sasaran telah tercapai **113,32%** dengan kriteria sangat tinggi, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 tidak terlalu jauh dimana capaian kinerja sasaran telah tercapai **111,45%** dengan kriteria sangat tinggi, hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator makro sasaran strategis telah tercapai bahkan terlampaui, baik pada target tahun 2018 maupun target akhir periode RPJMD pada tahun 2019. Akan tetapi target capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 masih terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu: Presentase penduduk miskin, Pertumbuhan PDRB dan Nilai AKIP memiliki capaian kinerja sangat rendah dengan kinerja $\leq 50\%$.

Pada capaian kinerja tahun 2018 jika dibandingkan dengan target yang akhir masa RPJMD pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu : Presentase penduduk miskin, Pertumbuhan PDRB dan Nilai AKIP memiliki kinerja capaian sangat rendah dengan kinerja $\leq 50\%$.

Secara umum capaian kinerja sasaran Kepala Daerah Kabupaten Magelang pada 6 Sasaran dan 19 indikator Kinerja telah mencapai target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2018 maupun pada target kinerja akhir periode RPJMD pada tahun 2019, kriteria capaian kinerja dengan katagori sangat tinggi dengan skor $91\% \leq 100\%$.

Capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang tahun Anggaran 2018 pada indikator mikro dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Pada Indikator Mikro

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)		
					Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
A.	MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama									
		Urusan : Kesehatan								
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan	1	Kasus Kematian Ibu Melahirkan*)	kasus	8,00	11,00	6,00	145,45	11,00	145,45
		2	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran *)	kasus	6,63	6,50	5,72	112,00	6,50	112,00
		3	Persentase Balita Gizi Buruk *)	persen	0,02	0,15	0,02	186,67	0,15	186,67
		4	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup *)	Permil	7,50	8,00	6,70	116,25	8,00	116,25
		5	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		6	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		8	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	persen	49,51	90,00	41,00	45,56	90,00	45,56
		9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	persen	100,00	100,00	88,30	88,30	100,00	88,30
		10	Cakupan Kunjungan Bayi	persen	99,68	95,00	98,89	104,09	95,00	104,09
Capaian Rata-rata Sasaran :							109,83		109,83	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)		
					Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol	Urusan: Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
		11	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga *)	persen	1,13	1,6	1,14	128,75	1,57	127,39
		12	Rasio Akseptor KB	persen	79,71	81,45	73,08	89,72	81,5	89,67
		13	Cakupan Peserta KB Aktif	persen	79,71	80,84	73,08	90,40	80,89	90,34
		14	Keluarga Pra Sejahtera *)	persen	22,33	21,28	21,23	100,23	20,18	94,80
		15	Keluarga Sejahtera I *)	persen	16,39	14,88	15,29	97,24	14,38	93,67
Capaian Rata-rata Sasaran :							101,27		99,17	
3	Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkat, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan	Urusan: Pendidikan								
		16	APK PAUD	persen	62,64	54,39	62,64	115,17	54,54	114,85
		17	Angka melek huruf	persen	94,63	93,85	94,63	100,83	93,95	100,72
		18	Angka rata-rata lama sekolah	persen	7,40	9,00	7,40	82,22	10,00	74,00
			Angka Partisipasi Murni :							
		19	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	persen	92,66	96,79	92,66	95,73	97,09	95,44
		20	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	persen	67,76	81,96	67,76	82,67	82,65	81,98
		21	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	persen	46,88	64,06	NA	NA	66,56	NA
			Angka partisipasi kasar							
		22	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	persen	105,87	101,94	105,87	103,86	101,84	103,96
		23	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	persen	88,38	97,06	88,38	91,06	97,56	90,59
		24	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	persen	64,23	75,10	NA	NA	80,00	NA
			Angka Putus Sekolah:							
25	Angka Putus Sekolah SD/MI *)	persen	0,05	0,14	0,05	164,29	0,14	164,29		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)		
					Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		26	Angka Putus Sekolah SMP/MTs *)	persen	0,24	0,59	0,24	159,32	0,57	157,89
		27	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA *)	persen	0,13	0,81	NA	NA	0,81	NA
			<i>Angka Kelulusan:</i>							
		28	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	persen	99,99	99,98	100,00	100,02	99,98	100,02
		29	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	persen	99,77	99,99	99,91	99,92	99,99	99,92
		30	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	persen	99,90	99,98	NA	NA	99,98	NA
			<i>Rerata Nilai UN :</i>							
		31	Rerata Nilai UN SD/MI	nilai	7,58	7,72	7,03	91,06	7,75	90,71
		32	Rerata Nilai UN SMP/MTs	nilai	5,78	6,48	5,98	92,28	6,49	92,14
		33	Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK	nilai	5,77	7,16	NA	NA	7,18	NA
		34	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	87,42	86,00	87,42	101,65	88,00	99,34
			<i>Angka Melanjutkan :</i>							
		35	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	persen	91,78	89,62	90,72	101,23	89,62	101,23
		36	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA	persen	79,18	70,70	79,18	111,99	71,55	110,66
		37	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	persen	73,20	84,68	73,20	86,44	86,74	84,39
		38	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	persen	78,28	90,00	78,28	86,98	91,43	85,62
Capaian Rata-rata Sasaran :							105,23		104,56	
4	Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga	Urusan: Kepemudaan dan Olah Raga								
		39	Jumlah Organisasi Pemuda	organisasi	26	26	27,00	103,85	27	100,00
		40	Jumlah Organisasi Olah Raga	organisasi	29	35	35,00	100,00	36	97,22
		41	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	kegiatan	17	18	20,00	111,11	19	105,26
		42	Jumlah Kegiatan Olah Raga	kegiatan	24	24	24,00	100,00	24	100,00
		43	Lapangan Olah Raga	permil	0,20	1,5	1,25	83,33	2	62,50

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)		
					Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Capaian Rata-rata Sasaran :							99,66		93,00	
5	Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca	Urusan : Perpustakaan								
		44	Jumlah Perpustakaan	unit	793	794	797	100,38	815	97,79
		45	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	39.967	44.447	76.548	172,22	45335	168,85
		46	Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	persen	2,16	2,20	2,24	101,82	2,24	100,00
Capaian Rata-rata Sasaran :							124,81		122,21	
6	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
		47	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	persen	1,88	2,54	1,98	77,95	2,56	77,34
		48	Rasio KDRT *)	persen	0,02	0,025	0,023	108,00	0,02	104,17
		49	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	persen	75,00	100,00	75,51	75,51	100,00	75,51
Capaian Rata-rata Sasaran :							87,15		85,67	
7	Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	Urusan : Sosial								
		50	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	unit	39,00	34,00	39,00	114,71	34,00	114,71
		51	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	persen	28,95	18,50	46,32	250,38	20,00	231,60
Capaian Rata-rata Sasaran :							182,54		173,15	
8	Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila	Urusan : Kebudayaan								
		52	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	kali	38	38	38,00	100,00	38	100,00
		53	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	unit	27	18	18,00	100,00	18	100,00
		54	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	persen	100	66,95	100,00	149,37	70,00	142,86
Capaian Rata-rata Sasaran :							116,46		114,29	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
					Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan	Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
55		Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	persen	20	17	20,00	117,65	19,00	105,26
56		Cakupan Kelompok Binaan PKK	persen	28,24	33,87	24,82	73,28	39,52	62,80
57		Jumlah LSM (Bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat)	LSM	4	4	4,00	100,00	6	66,67
Capaian Rata-rata Sasaran :							96,98		78,24
B.	MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing								
1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja	Urusan: Ketenagakerjaan							
58		Angka Partisipasi Angkatan Kerja	persen	74,49	75,65	71,28	105,78	76,65	92,99
59		Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun*)	persen	1,34	1,28	2,70	-10,94	1,28	-10,94
60		Pencari Kerja yang Ditempatkan	persen	55,35	48,32	42,86	88,70	54,27	78,98
61		Tingkat Pengangguran Terbuka*)	persen	2,44	3,10	2,91	106,13	3,02	103,64
62		Keselamatan dan Perlindungan	persen	77,11	77,00	0,00	0,00	79,00	0,00
63		Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	persen	100	100	100,00	100,00	100	100,00
Capaian Rata-rata Sasaran :							64,94		60,78
2	Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal	Urusan : Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
64		Persentase Koperasi Aktif	persen	82,76	77,95	94,00	120,59	78,18	120,24
65		Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	UKM non BPR/LKM UKM	106.200	106.387	106.600,00	100,20	106384	100,20
66		Jumlah BPR/LKM	BPR/LKM	297	379	297,00	78,36	382	77,75
67		Usaha Mikro dan Kecil	persen	1,017	0,37	1,15	310,81	0,38	302,63
Capaian Rata-rata Sasaran :							152,49		150,20

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)		
					Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah	Urusan: Penanaman Modal								
		68	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	investor	730	1.085	1.194,00	110,05	1.164	102,58
		69	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Juta rupiah	1.030.689	665.163	1.976.374,00	297,13	724.647	272,74
		70	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	persen	11,37	28,19	31,43	111,49	31,19	100,77
		71	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	milyar rupiah	539,75	164	945,69	576,64	359	263,42
Capaian Rata-rata Sasaran :							273,83		184,88	
4	Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat	Urusan: Ketahanan Pangan								
		72	Ketersediaan Pangan Utama Beras	persen	287,17	188,06	220,23	117,11	188,10	117,08
		73	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah		87,10	87	87,90	101,03	93,10	94,41
Capaian Rata-rata Sasaran :							109,07		105,75	
5	Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	Urusan: Pertanian								
			Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar							
		74	Produktivitas Padi	Kw/ha	62,9	60,09	63,70	106,01	60,1	105,99
		75	Produksi Padi	Ton/th	483.331	355.617	478.266,00	134,49	355.676	134,47
		76	Produktivitas Jagung	Kw/ha	58,73	59,28	63,53	107,17	59,3	107,13
		77	Produksi Jagung	Ton/th	55.083	74.307	51.446,00	69,23	74.337	69,21
		78	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	persen	21,78	20,89	21,78	104,26	20,03	108,74
		79	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)	persen	72,11	72,22	72,11	99,85	71,84	100,38

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
						Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		80	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB	persen	5,25	7,60	5,68	74,74	7,73	73,48
		81	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	persen	17,65	12,86	17,65	137,25	13,09	134,84
		82	Cakupan Bina Kelompok Petani	persen	26	2,5	12,42	496,80	2,7	460,00
			Produksi Hewan ternak							
		83	Sapi potong	kg	1.791.694	1.825.656	1.826.011,00	100,02	1.862.169	98,06
		84	Kerbau	kg	520	530	693,20	130,79	541	128,13
		85	Kambing	kg	749.957	777.711	737.749,00	94,86	793.265	93,00
		86	Domba	kg	1.053.911	1.093.751	1.043.219,00	95,38	1.115.626	93,51
			Produksi Hewan Unggas							
		87	Ayam Pedaging	ton	9.417,335	9.761,90	9.762,02	100,00	9.957,10	98,04
		88	Ayam Ras Petelur	ton	968	999,59	991,59	99,20	1.019,50	97,26
		89	Ayam Buras	ton	1.170.022	1.215,67	1.168,78	96,14	1.239,98	94,26
		90	Itik	ton	90,445	92,260	92,30	100,05	94,11	98,09
		91	Sapi Perah	liter	725.679	731.528	731.634,00	100,01	746.158	98,05
			Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari)							
		92	Daging	gr/kap/hr	5,87	5,95	5,96	100,17	6,2	96,13
		93	Telur	gr/kap/hr	3,97	4,35	4,00	91,95	4,65	86,02
		94	Susu	gr/kap/hr	0,02	0,08	0,04	50,00	0,11	36,36
Capaian Rata-rata Sasaran :								118,49		114,82
6	Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan	Urusan: Kelautan dan Perikanan								
		95	Produksi Perikanan (Benih)	juta ekor	1,717550	1,750	2,01	114,75	2,00	100,40
		96	Produksi Perikanan Budidaya	ton	21.058,46	16.800	23.097,01	137,48	18.000,00	128,32
		97	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	ton	275,9	253,43	278,14	109,75	263,57	105,53

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
						Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		98	Konsumsi Ikan	Kg/kap/tahun	18,61	15,30	19,60	128,10	15,75	124,44
		99	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian (%)	persen	2,82	2,62	2,29	87,40	2,68	85,45
Capaian Rata-rata Sasaran :								115,50		108,83
7	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	Urusan: Perdagangan								
		100	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	persen	13,45	10,01	10,85	108,39	9,98	108,72
		101	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	Juta US\$	99,89	88,80	50,87	57,29	89,00	57,16
		102	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	persen	11,42	1,79	3,90	217,88	1,74	224,14
Capaian Rata-rata Sasaran :								127,85		130,00
8	Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah	Urusan: Perindustrian								
		103	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	persen	0,72	2,81	2,95	104,98	2,81	104,98
		104	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	persen	22,66	18,03	19,55	108,43	17,95	108,91
		105	Pertumbuhan Industri.	persen	2,88	3,76	3,70	98,40	3,76	98,40
Capaian Rata-rata Sasaran :								103,94		104,10
9	Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah	Urusan: Pariwisata								
		106	Kunjungan Wisata Manca Negara	orang	337.515	723.151	358.673,00	49,60	860.549	41,68
		107	Kunjungan Wisata Nusantara	orang	5.064.569	5.963.149	5.977.422,00	100,24	6.594.051	90,65
		108	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	persen	4,6	6,63	5,10	76,92	6,89	74,02
Capaian Rata-rata Sasaran :								75,59		68,78

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)		
					Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
C.	MISI III: Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah									
1	Aksesibilitas Antar Daerah Meningkat dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru	Urusan: Pekerjaan Umum								
		109	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	persen	73,63	69,49	74,17	106,73	69,73	106,37
		110	Rasio Jaringan Irigasi	persen	41,31	30,57	43,68	142,89	30,57	142,89
		111	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	persen	64,55	64,6	65,93	102,06	67,40	97,82
Capaian Rata-rata Sasaran :							117,23		115,69	
2	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat	Urusan: Perumahan								
		112	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	persen	81,42	83	82,80	99,76	84,20	98,34
		113	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%) *	persen	2,24	2,50	2,00	120,00	2,45	77,50
		114	Rumah Layak Huni (%)	persen	56,7	80	80,00	100,00	85	94,12
Capaian Rata-rata Sasaran :							106,59		89,98	
3	Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan	Urusan: Energi dan Sumber Daya Mineral								
		115	Persentase Pertambangan Berijin	persen	NA	40	NA	NA	50	NA
		116	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	persen	4,35	2,64	NA	NA	2,64	NA
Capaian Rata-rata Sasaran :							NA		NA	
4	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan	Urusan: Perhubungan								
		117	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	orang	2.794.562	3.705.271	3.121.745,00	84,25	3.705.271	84,25
		118	Jumlah Ijin Trayek	ijin	1089	1.057	976,00	92,34	1069	91,30
		119	Rasio Uji Kir Kendaraan	persen	98,39	96,3	88,10	91,48	96,7	91,11

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
						Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		120	Jumlah Terminal Bis	terminal	6	8	6,00	75,00	8	75,00
		121	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	menit	32	32	32,00	100,00	32	100,00
		122	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji		Ada	ada	ada	100,00	ada	100,00
		123	Pemasangan Rambu-Rambu	persen	106,36	79	111,72	141,42	94,00	118,85
Capaian Rata-rata Sasaran :								97,78		94,36
D.	MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup									
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam	Urusan: Penataan Ruang								
		124	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	persen	31	>30	31,00	103,33	>30	103,33
		125	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	persen	3,6	3,85	3,60	93,51	4,00	90,00
		126	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	persen	0	0	0,00	100,00	0	100,00
		127	Luas Kawasan Lindung (ha)	ha	25.886	25.886	25.886,00	100,00	25.886	100,00
		128	Luas Kawasan Budidaya (ha)	Ha	82,687	82,687	82,69	100,00	82,687	100,00
		129	Jumlah IMB yang Dikeluarkan	IMB	577	645	346	53,64	676	51,18
		130	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	persen	35	38	32,00	84,21	38	84,21
Capaian Rata-rata Sasaran :								90,67		89,82
2	Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya	Urusan: Lingkungan Hidup								
		131	Persentase Penanganan Sampah	persen	28,14	29	33,60	115,85	31	108,37

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)		
					Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya	132	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	persen	2,85	1,90	4,10	215,96	2,10	195,39
		133	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	persen	33,06	30	38,84	129,48	30,00	129,48
		134	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	persen	0,99	1,78	2,32	130,41	1,76	131,90
		135	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	m ³	186.585	2.300.000	297.475	12,93	2.300.000	12,93
Capaian Rata-rata Sasaran :							120,93		115,61	
3	Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana	Urusan: Kehutanan								
		136	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	ha	NA	2.680	NA	NA	2,822	NA
		137	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	persen	3,92	4,70	NA	NA	4,66	NA
Capaian Rata-rata Sasaran :							NA		NA	
E.	MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis									
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah	Urusan: Perencanaan Pembangunan								
		138	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
		139	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
		140	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
		141	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	persen	89,19	100	94,57	94,57	100	94,57
Capaian Rata-rata Sasaran :							98,64		98,64	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)			
					Target	Capaian	%	Target	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
		142	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk		0,39	0,44	0,69	157,02	0,44	157,02	
		143	Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk		91,32	99,64	88,13	88,45	100,87	87,37	
		144	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah		2	4	4,00	100,00	4	100,00	
		145	Penegakan PERDA	persen	80,45	75	95,29	127,06	75	127,06	
		146	Persentase Peningkatan PAD	persen	7,42	12,02	17,89	148,84	12,02	148,84	
		147	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		Ada	ada	Ada	100	Ada	100,00	
		Capaian Rata-rata Urusan :							120,23		120,05
		Urusan : Statistik									
		148	Buku "Kabupaten Dalam Angka"		Ada	ada	Ada	100	Ada	100	
		149	Buku "PDRB Kabupaten"		Ada	ada	Ada	100	Ada	100	
		Capaian Rata-rata Urusan :							100,00		100,00
		Urusan : Kearsipan									
		150	Pengelolaan Arsip Secara Baku	persen	73,02	89,61	89,77	100,18	100	89,77	
		151	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	orang	791	282	901,00	319,50	329	273,86	
Capaian Rata-rata Urusan :							209,84		181,82		
Capaian Rata-rata Sasaran :							143,36		133,95		
3	Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak	Urusan : Komunikasi dan Informatika									
		152	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	penyiaran	8/10	6	8,00	133,33	6	133,33	
		153	Web Site Milik Pemerintah Daerah		Ada	Ada	Ada	100	Ada	100	
		154	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal		9/3	9/3	9/3	100	9/3	100	
Capaian Rata-rata Sasaran :							111,11		111,11		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)		
					Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Capil	Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil								
		155	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	persen	92,92	91,81	96,13	104,71	91,87	104,64
		156	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	persen	60,52	98,77	94,29	95,46	100	94,29
		157	Rasio Pasangan Berakte Nikah	persen	40,12	1,8	34,26	1.903,33	1,8	1.903,33
		158	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	100	Sudah	100,00
		Capaian Rata-rata Urusan :						550,88		550,57
		Urusan : Pertanahan								
		159	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	persen	54,8	33,8	53,41	158,02	33,83	157,88
		160	Penyelesaian Izin Lokasi	persen	100	100	100,00	100,00	100	100,00
		Capaian Rata-rata Urusan :						129,01		128,94
Capaian Rata-rata Sasaran :						339,94		339,75		
F.	MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat									
1	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat	Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
		161	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	kegiatan	12	12	12,00	100,00	12	100,00
		162	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	kegiatan	7	12	12,00	100,00	12	100,00
Capaian Rata-rata Sasaran :						100,00		100,00		
2	Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat	Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
		163	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	persen	70	100	100,00	100,00	100	100,00
		164	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	persen	100	100	100,00	100,00	100	100,00
165	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	persen	70	90	86,25	95,83	100	86,25		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
						Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		166	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	persen	100	100	96,66	96,66	100	96,66
Capaian Rata-rata Sasaran :								98,12		95,73
Rata-Rata Capaian Indikator Mikro :								122,91		116,55

Sumber : SKPD terkait dan Bagian Organisasi 2018, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas dalam capaian kinerja sasaran pada indikator mikro Kepala Daerah tahun 2018 telah melampaui target dengan rata-rata kinerja sasaran telah tercapai 122,91% dengan kriteria sangat tinggi jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 tidak terlalu jauh dimana capaian kinerja sasaran telah tercapai 116,65% dengan kriteria sangat tinggi, hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator mikro sasaran startegis telah tercapai bahkan terlampaui pada target tahun 2018 dan target akhir periode RPJMD pada tahun 2019 telah terlampaui.

Realisasi anggaran per program Pemerintah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2018 secara detail pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Per Program
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
A	Pelaksanaan Urusan			
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.011.476.000	722.211.845	71,40
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	137.987.468.074	37.532.691.908	27,20
3	Program Pendidikan Non Formal	1.684.000.000	1.594.440.600	94,68
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.862.760.000	1.838.201.150	98,68
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	31.096.400.250	30.583.867.105	98,35
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	8.483.159.800	6.395.668.416	75,39
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	16.918.768.500	14.572.905.316	86,13
8	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	665.851.000	621.958.688	93,41
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	365.490.000	344.764.975	94,33
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	397.743.000	336.460.098	84,59
11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	191.672.000	185.963.400	97,02
12	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	22.876.807.680	22.389.405.634	97,87
13	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan pras.puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	23.069.380.010	20.413.374.771	88,49
14	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	23.455.000	23.328.100	99,46
15	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2.148.918.000	947.589.763	44,10

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
16	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	186.373.768.848	120.675.026.901	64,75
17	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata	105.015.249.070	100.467.427.786	95,67
18	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	165.000.000	164.957.650	99,97
19	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	3.000.000	1.228.500	40,95
20	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	3.000.000	1.228.000	40,93
21	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	94.650.557.715	84.661.813.604	89,45
22	Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong	7.294.629.700	6.622.283.114	90,78
23	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan	62.376.706.500	56.655.008.041	90,83
24	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	50.000.000	26.632.000	53,26
25	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	599.400.000	576.507.380	96,18
26	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi.Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	19.397.311.359	16.456.227.873	84,84
27	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya	150.000.000	145.679.150	97,12
28	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5.464.459.890	4.921.854.841	90,07
29	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	830.638.800	743.315.044	89,49
30	Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	320.066.699	309.466.575	96,69
31	Program Perencanaan Tata Ruang	125.000.000	94.416.856	75,53
32	Program Pemanfaatan Ruang	150.000.000	140.550.000	93,70
33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	600.000.000	562.027.097	93,67
34	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1.406.000.000	1.224.994.025	87,13
35	Program Pengembangan Perumahan	1.417.419.900	1.167.217.018	82,35
36	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	5.365.244.000	5.297.532.497	98,74
37	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	23.772.425.000	21.642.806.478	91,04
38	Program Lingkungan Sehat Perumahan	2.645.542.125	2.207.017.564	83,42
39	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.896.643.500	3.717.091.920	95,39
40	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.153.941.000	1.141.758.055	98,94

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
41	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	121.780.000	120.469.825	98,92
42	Program pengembangan wawasan kebangsaan	444.561.000	432.208.930	97,22
43	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	232.788.000	231.308.340	99,36
44	Program pendidikan politik masyarakat	162.900.000	162.900.000	100,00
45	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	5.022.199.960	4.503.795.906	89,68
46	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	24.157.500	24.157.400	100,00
47	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.510.952.000	1.441.089.783	95,38
48	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	426.356.000	380.752.810	89,30
49	Program pembinaan anak terlantar	100.000.000	97.901.530	97,90
50	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	195.000.000	184.698.485	94,72
51	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	35.923.000	29.386.055	81,80
52	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	2.002.284.000	1.987.522.770	99,26
53	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.265.000.000	1.105.334.425	87,38
54	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.059.675.000	923.037.225	87,11
55	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	202.840.000	202.584.070	99,87
56	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	267.819.000	254.063.470	94,86
57	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	210.000.000	200.897.375	95,67
58	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	205.820.000	205.447.665	99,82
59	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	767.045.750	749.885.048	97,76
60	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	935.908.075	905.875.835	96,79
61	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	98.325.000	81.580.790	82,97
62	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	42.496.000	40.164.460	94,51
63	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	3.630.005.837	3.313.640.227	91,28
64	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	10.472.302.200	9.883.267.869	94,38

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
65	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.746.222.000	1.719.130.894	98,45
66	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	265.000.000	262.544.770	99,07
67	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	118.696.101	117.878.601	99,31
68	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	650.000.000	645.987.800	99,38
69	Program Pengembangan Kapasitas dan kemampuan Laboratorium lingkungan	121.452.000	99.670.475	82,07
70	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan.	2.745.997.000	2.722.252.075	99,14
71	Program Penataan Administrasi Kependudukan	5.468.598.500	5.130.430.040	93,82
72	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	6.119.403.450	5.525.096.597	90,29
73	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	611.037.000	595.848.170	97,51
74	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	619.866.900	588.427.449	94,93
75	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.647.504.250	1.554.134.965	94,33
76	Program Keluarga Berencana	7.402.160.000	6.318.708.159	85,36
77	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	47.500.000	47.499.645	100,00
78	Program pelayanan Kontrasepsi	420.000.000	406.183.925	96,71
79	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	256.644.000	256.042.570	99,77
80	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	30.000.000	29.894.975	99,65
81	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	444.403.000	424.547.106	95,53
82	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	270.109.000	262.757.775	97,28
83	Program peningkatan pelayanan angkutan	1.661.711.000	1.406.805.970	84,66
84	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	170.000.000	156.528.500	92,08
85	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	818.525.000	766.120.090	93,60
86	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	4.244.702.000	4.090.287.001	96,36
87	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	2.640.571.000	2.318.823.960	87,82
88	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	176.915.000	173.284.925	97,95
89	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	638.064.000	504.704.861	79,10

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
90	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	162.680.000	144.869.900	89,05
91	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	756.588.000	737.008.625	97,41
92	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	247.601.250	243.488.905	98,34
93	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	525.981.800	297.024.560	56,47
94	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	390.840.000	374.557.940	95,83
95	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	78.165.000	77.606.300	99,29
96	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	3.802.853.494	3.342.071.513	87,88
97	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	457.599.000	443.647.455	96,95
98	Program peningkatan peran serta kepemudaan	578.326.500	478.180.530	82,68
99	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	89.720.000	89.694.770	99,97
100	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	126.910.000	126.755.760	99,88
101	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	5.196.470.000	4.931.330.420	94,90
102	Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	402.205.000	399.567.275	99,34
103	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.468.118.000	1.396.464.030	95,12
104	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	330.473.000	325.633.960	98,54
105	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.165.191.000	1.144.369.480	98,21
106	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.044.487.500	956.596.890	91,59
107	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	41.050.000	36.238.975	88,28
108	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	226.000.000	218.363.330	96,62
109	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	45.000.000	43.683.900	97,08
110	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	243.021.000	226.763.975	93,31
111	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.432.254.349	1.396.467.717	97,50
112	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	441.030.000	438.508.000	99,43
113	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	45.105.000	41.463.180	91,93
114	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.445.945.000	1.442.899.392	99,79
115	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	19.218.103.920	16.920.652.942	88,05

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
116	Program Pengembangan Kemitraan	325.601.000	310.231.965	95,28
117	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	617.572.100	576.683.180	93,38
118	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	368.291.975	366.452.940	99,50
119	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan	266.615.650	262.809.470	98,57
120	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	17.264.886.000	14.861.053.662	86,08
121	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	737.143.900	732.490.680	99,37
122	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	353.060.850	341.371.025	96,69
123	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3.128.684.000	2.905.971.516	92,88
124	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	9.366.279.125	9.147.185.870	97,66
125	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan	48.026.000	47.216.750	98,31
126	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	497.533.000	491.907.662	98,87
127	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	182.552.000	176.841.100	96,87
128	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	507.815.000	498.589.503	98,18
129	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan	217.263.000	210.143.650	96,72
130	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	116.351.710.436	92.056.176.587	79,12
131	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	849.500.000	826.177.338	97,25
132	Program Penataan Struktur Industri	705.245.000	663.329.800	94,06
133	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	25.986.000	22.545.125	86,76
134	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	194.000.000	193.734.425	99,86
135	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.115.570.000	980.776.726	87,92
136	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	553.446.500	530.000.150	95,76
137	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.357.257.500	2.197.245.063	93,21
138	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	44.600.000	41.779.050	93,68
139	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1.707.515.600	1.609.826.368	94,28
140	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	81.312.000	72.561.035	89,24

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
141	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	39.861.000	1.832.948	4,60
142	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	16.837.848.915	14.912.642.069	88,57
143	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	19.959.606.500	18.093.487.737	90,65
144	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.418.619.850	2.278.712.225	94,22
145	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	636.364.800	600.387.400	94,35
146	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	90.000.000	87.596.685	97,33
147	Program Pengembangan Data /Informasi	939.808.000	802.159.821	85,35
148	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.293.039.950	2.225.951.402	97,07
149	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	155.364.500	147.118.594	94,69
150	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	801.446.900	776.118.387	96,84
151	Program Kerjasama Pembangunan	157.000.000	156.596.885	99,74
152	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	289.705.000	260.116.919	89,79
153	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	351.396.000	335.670.806	95,52
154	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.940.888.500	1.498.791.002	77,22
155	Peningkatan Manajemen Kepegawaian	649.395.650	422.067.395	64,99
156	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.169.213.360	4.877.562.695	94,36
	Sub Total Pelaksanaan Urusan	1.091.339.317.317	845.586.284.663	77,48
B	Pelaksanaan Non Urusan (eks BAU)			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	22.092.520.938	20.349.366.766	92,11
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60.931.715.045	55.057.058.279	90,36
3	Program peningkatan disiplin aparatur	713.599.000	644.498.575	90,32
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	837.191.700	812.000.073	96,99
	Pelaksanaan Non Urusan (eks BAU)	84.575.026.683	76.862.923.693	90,88
	Totak Anggaran	1.175.914.344.000	922.449.208.356	78,45

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang 2018, data realisasi keuangan unaudited diolah.

Realisasi anggaran Kabupaten Magelang pada tahun 2018 mencapai rata-rata 78,45% dengan kriteria Tinggi. Tingkat capaian terbanyak adalah kriteria Sangat Tinggi (91% ≤ 100%) dengan jumlah program 105 (66,46%) indikator dan yang paling sedikit pada katagori capaian sedang (66 % ≤ 75%) sebanyak 1 (0,63%) indikator, secara detail rekapitulasi realisasi anggaran per program Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Program
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun anggaran 2018

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Jumlah Program
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	105 (66,46%)
2	76% ≤ 90%	Tinggi	43 (27,22%)
3	66 % ≤ 75%	Sedang	1 (0,63%)
4	51% ≤ 65%	Rendah	4 (2,53%)
5	≤ 50	Sangat Rendah	5 (3,16%)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang 2018, data diolah.

B. Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Magelang Tahun 2018, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2018 terhadap indikator makro sejumlah 6 (enam) sasaran strategis dan 19 (Sembilan belas) indikator kinerja serta indikator mikro sejumlah 31 (tiga puluh satu) sasaran strategis dan 166 (seratus enam puluh enam) indikator kinerja. Perjanjian Kinerja didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bupati Magelang Tahun 2018 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Magelang. LKjIP ini merupakan laporan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan target pada tahun IV (keempat) dari RPJMD Kabupaten Megelang 2014-2019.

Capaian kinerja Bupati Magelang tahun 2018 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan, evaluasi kinerja dipilah-pilah berdasarkan sasaran strategis pada indikator makro dan indikator mikro.

Evaluasi pencapaian kinerja pada indikator makro per-sasaran strategis tahun 2018 pada data kinerja masih menggunakan data

penghitungan/estimasi dari Bappeda dan Litbangda, hal ini dilakukan karena data belum secara lengkap dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang sampai batas periode pelaporan, hasil analisa capaian indikator strategis sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis I** : Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Agama Yang Semakin Meningkatkan

Capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan kehidupan Agama Yang Semakin Meningkatkan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Kepala Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2018 .

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	Capaian 2018			Akhir RPJMD (2019)		
			Target	Kinerja	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	73,27	70,50	73,39	104,10	70,56	104,01
2	Indeks Gini *)	indeks	0,31	0,300	0,316	94,67	0,295	92,88
3	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	indeks	0,41	0,4056	0,4057	99,98	0,4046	99,73
4	Persentase penduduk miskin *)	persen	12,42	9,00	11,23	75,22	8,00	59,63
5	IPM	indeks	74,74	75,54	74,17	98,19	75,94	97,67
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						94,43		90,78

Sumber : Bappeda dan litbangda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang 2018, data diolah

Rata-rata capaian kinerja sasaran pada sasaran strategis terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan kehidupan agama yang semakin meningkat terhadap 5 indikator kinerja hampir mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2018 sebesar 94,43 % dengan capaian sangat tinggi, demikian juga terhadap target akhir RPJMD di tahun 2019 sebesar 90,78% dengan capaian tinggi.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Agama Yang Semakin Meningkat ini didorong oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien;
- b. Ketersediaan dana yang dimanfaatkan secara optimal
- c. Iklim sosial, ekonomi dan politik yang cukup kondusif
- d. Partisipasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder.

Pada pencapaian target kinerja sasaran terdapat satu indikator yaitu indikator persentase penduduk miskin masuk katagori sedang nilai capaian kinerja 75,22% (Tinggi) terhadap target kinerja tahun 2018, sedangkan terhadap target kinerja akhir RPJMD pada tahun 2019 masuk katagori sangat rendah dengan capaian indikator 59,63% (Rendah).

Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja persentase penduduk miskin adalah:

- a. Data base kemiskinan belum sepenuhnya digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.
- b. Penanggulangan kemiskinan belum memaksimalkan integrasi berbagai sektor dan stakeholder yang terkait, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal
- c. Kenaikan biaya hidup masyarakat seperti kenaikan BBM, listrik, pajak, tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat khususnya kaum petani yang merupakan masyarakat penyumbang penduduk miskin terbesar di Kabupaten Magelang.

Upaya untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magelang adalah :

1. Program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar diarahkan pada sasaran dan lokasi prioritas desa tertinggal.
2. Masih tingginya kemiskinan di daerah perdesaan, sehingga program penanggulangan kemiskinan agar diarahkan di perdesaan khususnya pemberdayaan di sektor pertanian (*On Farm dan Off Farm Oriented*)
3. OPD Provinsi diharapkan sinergis dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya penanggulangan kemiskinan
4. Tahun 2018 merupakan tahap akhir RPJMD 2014-2019, diharapkan program/kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan HITS (holistik, integratif, tematik, spasial).

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang telah disusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dengan menetapkan strategi: kebijakan ekonomi makro, pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar, pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, dan pembangunan

sarana prasarana wilayah. Pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar dimaksud meliputi:

1. Penyediaan dan perluasan akses pangan
2. Perluasan akses kesehatan
3. Perluasan akses layanan pendidikan
4. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha
5. Perluasan akses layanan perumahan
6. Penyediaan air bersih dan sanitasi
7. Perluasan akses layanan tanah
8. Perluasan akses layanan SDA dan lingkungan hidup
9. Peningkatan rasa aman
10. Perluasan akses partisipasi.

Dalam perluasan akses berpartisipasi ini terkandung maksud program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa untuk memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat miskin mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program dan kegiatan pembangunan.

2. **Sasaran Strategis II** : Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah yang berdaya Saing dan Berbasis Pada Potensi Lokal Daerah
- Capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis pada potensi lokal daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Kepala Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2018 .

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	Capaian 2018			Akhir RPJMD (2019)		
			Target	Kinerja	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
6	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,43	6,2-6,7	5,6	81,61	6,4 - 7,1	79,06
7	PDRB per kapita	Juta Rp	22,35	13,75	25,92	188,51	15,06	172,11
8	Laju inflansi	Persen	3,47	4±1	2,66	111,33	4±1	111,33
9	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	96,79	97,57	96,79	99,20	97,97	98,80
10	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	Rp.(juta)	51,74	35,30	44,72	126,69	38,38	116,52
11	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persen	55,80	36,56	47,03	128,64	37,03	127,01
12	Nilai tukar petani		106,70	106,85	103,31	96,69	106,99	65,56
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						118,95		114,48

Sumber : Bappeda dan Litbangda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang 2018, data diolah.

Rata-rata capaian kinerja sasaran pada sasaran strategis terwujudnya peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis pada potensi lokal daerah terhadap 7 indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2018 sebesar 118,95% % dengan capaian sangat tinggi, demikian juga terhadap target akhir RPJMD di tahun 2019 sebesar 114,48 % dengan capaian sangat tinggi.

Pada pencapaian target kinerja sasaran terdapat satu indikator yaitu pertumbuhan PDRB masuk katagori tinggi nilai capaian kinerja 81,61% terhadap target kinerja tahun 2018, demikian pula terhadap target kinerja akhir RPJMD pada tahun 2019 masuk katagori tinggi dengan capaian indikator 79,06%.

Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro, yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat kemajuan ekonomi pada suatu wilayah. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi, semakin baik perekonomian.

3. **Sasaran Strategis III** : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Daerah

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 .

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	Capaian			Akhir RPJMD (2019)	
			Target	Kinerja	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
13 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan		0,0029	0,0019	0,0029	152,63	0.0017	170,59
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :					152,63		170,59

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2018

Rata-rata capaian kinerja sasaran pada sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana daerah

terhadap 1 indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan di tahun 2018 sebesar 152,63 % dengan capaian sangat tinggi, demikian juga terhadap target akhir RPJMD di tahun 2019 sebesar 170,59 % dengan capaian sangat tinggi.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2018 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai 0,0029 (138,10%) dimana target yang ditetapkan adalah 0,0021. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 dengan target rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 0,0017, maka capaian kinerja tahun 2018 melampaui target yang ditetapkan mencapai 170,59%.

Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana dasar bagi warga masyarakat meliputi pembangunan dan peningkatan jalan, jaringan irigasi, bendung, penyediaan air bersih, perumahan layak huni dan sebagainya.

Kinerja makro Sasaran Strategis Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, rasio permukiman layak huni, panjang jalan dilalui roda empat, jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase, sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar, sempadan sungai yang dipakai bangunan liar, drainase dalam kondisi baik, pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan lingkungan permukiman.

4. **Sasaran Strategis IV** : Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Maksimal dengan Berbasis Kelestarian Lingkungan

Capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal dengan berbasis kelestarian lingkungan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9.
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Kepala Daerah
 Kabupaten Magelang Tahun 2018 .

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	Capaian 2018			Akhir RPJMD (2019)		
			Target	Kinerja	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
14	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	persen	83,09	76,60	84,61	110,46	95,66	110,17
15	Luas Wilayah Industri	persen	0,34	0,37	0,37	100,00	0,37	100,00
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						105,23		105,08

Sumber : Bappeda dan Litbangda 2018, data diolah.

Rata-rata capaian kinerja sasaran pada sasaran strategis terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal dengan berbasis kelestarian lingkungan terhadap 2 indikator kinerja, telah mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2018 sebesar 100,23 % dengan capaian sangat tinggi, demikian juga terhadap target akhir RPJMD di tahun 2019 sebesar 105,08 % dengan capaian tinggi.

Wilayah Kabupaten Magelang memiliki cukup banyak sumber air dari mata air yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Pemanfaatannya selama ini dilakukan oleh institusi maupun masyarakat sebagai sumber air bersih yang digunakan masyarakat sehari-hari maupun untuk keperluan pertanian dan peternakan.

Peningkatan cakupan air minum di wilayah perkotaan disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang pelayanan air minum/bersih. Kualitas air secara rutin dibawah pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang sehingga aman untuk konsumen karena memenuhi baku mutu standar kualitas air minum dari Kementerian Kesehatan sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 492/Menkes/Per/IV/2010.

Peningkatan cakupan layanan air minum di wilayah perdesaan banyak dikelola oleh masyarakat baik melalui perpipaan maupun bukan perpipaan, pelayanan air minum perpipaan di wilayah perdesaan dibangun melalui program PAMSIMAS dan SPAM DAK.

Kegiatan industri di Kabupaten Magelang terdiri dari beraneka macam dan tersebar di banyak kecamatan. Industri kecil dan menengah terbanyak adalah jenis industri kimia, agro dan hasil hutan. Sementara itu, untuk industri besar dan sedang yang terbanyak adalah industri makanan, minuman jadi dan tembakau serta industri macam-macam perhiasan, mainan anak-anak, cinderamata.

Secara spasial, potensi industri berbahan baku batu ada di Kecamatan Muntilan. potensi industri berbahan baku bambu ada di Kecamatan Borobudur, potensi industri sapu rayung ada di Kecamatan Mungkid, dan potensi industri kaleng bekas ada di Kecamatan Salaman. Sementara itu industri berbahan baku ketela berpotensi dikembangkan di Kecamatan Grabag, Mungkid dan Candimulyo dan industri gula kelapa potensial dikembangkan di Kecamatan Candimulyo.

Di Kabupaten Magelang juga terdapat beberapa sentra industri. Sentra industri yang menonjol di antaranya sentra industri kecil, kerajinan pahat batu di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan, sentra industri makanan dari ketela (slondok) di Desa Sumurarum Kecamatan Grabag, sentra industri makanan jenang dodol krasikan di Desa Gulon Kecamatan Salam, sentra industri makanan dari beras ketan (tape ketan dan wajik) di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan dan Desa Salaman Kecamatan Salaman, industri kerajinan tanduk di Desa Pucang Kecamatan Secang, genting Desa Sidomulyo Kecamatan Salaman, kaleng bekas di Desa Tirtosari Kecamatan Sawangan dan Desa Ngadirejo Kecamatan Salaman, industri mainan anak-anak di Desa Kalijoso Kecamatan Secang, industri kerajinan perak di Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik dan industri kerajinan sangkar burung di Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran.

Peningkatan persaingan dunia industri menuntut peningkatan mutu produk serta fasilitasi pengenalan produk-produk Kabupaten Magelang ke pasar nasional maupun internasional. Oleh karena itu pemerintah daerah harus senantiasa memberikan pembinaan kepada para pelaku industri dan memberikan fasilitas promosi keluar daerah, Selain itu, kendala lainnya adalah masih terbatasnya teknologi, desain, akses permodalan serta pemasaran

IKM. Guna meningkatkan pengembangan usaha kecil pemerintah daerah harus meningkatkan komitmen untuk memfasilitasi industri dan IKM secara optimal. Untuk lebih mengembangkan industri perlu strategi pengembangan lokalitas, sektor, sub sektor dan komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif, antara lain melalui percepatan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

5. **Sasaran Strategis V** : Meningkatkan Manajemen Sistem Pemerintahan Daerah yang Baik, Modern dan Demokratis

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatkan manajemen sistem pemerintahan daerah yang baik, modern dan demokratis, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 .

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	Capaian 2018			Akhir RPJMD (2019)	
			Target	Kinerja	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Lama Proses Perijinan (Hari)	9	9	9	100,00	9	100,00
17	Opini BPK 'WTP'	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
18	Nilai AKIP	CC	B	CC	50,00	B	50,00
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :					83,33		83,33

Sumber : Pemerintah Kabupaten Magelang 2018, data diolah.

Rata-rata capaian kinerja sasaran pada sasaran strategis meningkatkan manajemen sistem pemerintahan daerah yang baik, modern dan demokratis terhadap 3 indikator kinerja, telah mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2018 sebesar 83,33 % dengan capaian sangat tinggi, demikian juga terhadap target akhir RPJMD di tahun 2019 sebesar 83,33 % dengan capaian sangat tinggi.

Pada pencapaian target kinerja sasaran terdapat satu indikator yaitu capaian nilai AKIP masih masuk katagori sedang nilai capaian kinerja 50% sedang terhadap target kinerja tahun 2018 , maupun target kinerja akhir RPJMD pada tahun 2019. Secara detail penjelasan capaian kinerja sasaran pada masing-masing indikator sebagai berikut:

Investasi adalah penanaman modal atau penanaman uang dalam proses produksi dengan membeli gedung-gedung, mesin-

mesin, bahan- bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya.

Bank Dunia menetapkan 10 indikator tingkat kemudahan berusaha/investasi. masing-masing adalah memulai usaha (*starting business*), perizinan terkait pendirian bangunan (*dealing with construction permit*), pembayaran pajak (*paying taxes*), akses perkreditan (*getting credit*), penegakan kontrak (*enforcing contract*), penyambungan listrik (*getting electricity*), perdagangan lintas negara (*trading across borders*), penyelesaian perkara kepailitan (*resolving insolvency*), dan perlindungan terhadap investor minoritas (*protecting minority investors*).

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi yang relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudahan itu antara lain prosedur dan persyaratan, lamanya waktu dan biaya. Terkait kepastian biaya adalah tidak adanya pungutan diluar tarif yang resmi atau tidak ada pungli.

Kemudahan perijinan ini diwadahi dengan pembentukan PTSP (pelayanan perijinan satu pintu), yang diampu oleh DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu). DPM-PTSP diberi tugas untuk melakukan pembenahan seperti kemudahan perizinan, administrasi birokrasi pusat dan daerah, serta sinkronisasi kebijakan. Sinkronisasi perlu dilakukan karena saat ini masih terdapat berbagai regulasi daerah yang masih belum sejalan dengan kebijakan atau regulasi pemerintah pusat.

Persentase lama proses perijinan pada tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 9 hari (100%) dimana target yang ditetapkan adalah 9 hari. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 dengan target lama proses perijinan sebesar 9 hari, maka capaian kinerja tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 100%.

Opini BPK 'WTP' pada tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai WTP (100%) dimana target yang ditetapkan adalah Opini BPK 'WTP'. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 dengan target Opini BPK 'WTP', maka capaian kinerja tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 100%.

Penghitungan Opini BPK 'WTP' untuk pengukuran indikator kinerja kualitatif dikonversi menjadi kuantitatif dengan pemberian bobot nilai sebagai berikut :

Tabel 3.11
Penghitungan Opini BPK 'WTP' Kabupaten Magelang
Tahun 2018 .

No.	Kategori Opini	Bobot Nilai
1.	<i>Wajar Tanpa Pengecualian</i>	3
2.	<i>Wajar Dengan Pengecualian</i>	2
3.	<i>Tidak Wajar</i>	1
4.	<i>Tidak Menyatakan Pendapat</i>	0

Penghitungan capaian kinerja : Target = WTP; Realisasi = WTP

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Jumlah bobot nilai Realisasi} \times 100}{\text{Jumlah bobot nilai target}} \\
 &= \text{WTP} / \text{WTP} \times 100 \\
 &= (3+2+1+0) / (3+2+1+0) \times 100 \\
 &= 6/6 \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Upaya dalam pengelolaan aset daerah dilakukan melalui optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, *up dating* data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Perwujudan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Magelang dengan diundangkannya PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (mencabut PP Nomor 6 Tahun 2006 jo PP Nomor 38 Tahun 2008), maka Perda Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2011), dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 1037) akan disesuaikan dengan PP dimaksud.

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Magelang diarahkan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magelang serta salah satu faktor dalam pendukung pencapaian Opini BPK menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2016 indikator opini BPK “WTP” belum tercapai mulai tahun 2017 dan 2018 ini opini BPK “WTP” dapat tercapai. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah daerah dalam mencapai indikator ini adalah:

- Melakukan pelatihan secara berkala bagi petugas penyimpan barang di setiap SKPD, dan mengupayakan agar petugas yang sudah terlatih tidak terlalu sering di mutasi.
- Menindaklanjuti Rekomendasi BPK RI,
- Melaksanakan *Action Plan* yang telah dibuat oleh masing-masing bidang berdasarkan hasil rekomendasi BPK RI.

Nilai AKIP Kabupaten Magelang pada tahun 2018 sebesar 59,05 dengan katagori CC, dibandingkan dengan tahun 2016 dengan nilai 58,82 dengan katagori CC mengalami peningkatan sebesar 0,23 point, tetapi tidak mengalami peningkatan katagori, target nilai AKIP pada RPJMD adalah diatas 60 dengan katagori B.

Pengukuran indikator kinerja kualitatif dikonversi menjadi kuantitatif dengan pemberian bobot nilai sebagai berikut :

Tabel 3.12
Penghitungan Nilai AKIP Kabupaten Magelang Tahun 2018 .

No.	Nilai SAKIP	Bobot Nilai
1	AA	6
2	A	5
3	BB	4
4	B	3
5	CC	2
6	C	1
7	D	0

Penghitungan capaian kinerja : Target B, Realisasi CC

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Jumlah bobot nilai Realisasi} \times 100}{\text{Jumlah bobot nilai target}} \\
 &= \frac{CC}{B} \times 100 \\
 &= \frac{(2+1+0)}{(3+2+1+0)} \times 100 \\
 &= \frac{3}{6} \times 100 \\
 &= 50\%
 \end{aligned}$$

5. **Sasaran Strategis VI** : Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Serta Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sasaran Strategis VI Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 .

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	Capaian			Akhir RPJMD (2019)		
			Target	Kinerja	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
19	Angka kriminalitas *)	Indek	0,26	1,82	0,26	185,71	1,45	182,07
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						185,71		182,07

Sumber : Badan Pusat Statistik 2018, data diolah.

Rata-rata capaian kinerja sasaran pada sasaran strategis meningkatnya kondusifitas dan keamanan terhadap satu indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2018 sebesar 185,71 % dengan capaian sangat tinggi, demikian juga terhadap target akhir RPJMD di tahun 2019 sebesar 182,07 % dengan capaian sangat tinggi.

Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan kewaspadaan dini masyarakat. Indikator capaian untuk meningkatkan kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum adalah angka kriminalitas. Angka kriminalitas tercermin dari banyaknya perkara pidana yang masuk di Polres Magelang.

Evaluasi pencapaian kinerja pada indikator mikro persasaran strategis tahun 2018 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan

Dalam rangka memperbaiki akses, pemerataan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Magelang diukur dalam 10 (sepuluh) indikator kinerja dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Strategis Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses,
dan Pemerataan Layanan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kasus Kematian Ibu Melahirkan*)	kasus	8,00	11,00	6,00	145,45	11,00	145,45
2	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran *)	kasus	6,63	6,50	5,72	112,00	6,50	112,00
3	Persentase Balita Gizi Buruk *)	persen	0,02	0,15	0,02	186,67	0,15	186,67
4	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup *)	Permil	7,50	8,00	6,70	116,25	8,00	116,25
5	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	persen	49,51	90,00	41,00	45,56	90,00	45,56
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	persen	100,00	100,00	88,30	88,30	100,00	88,30
10	Cakupan Kunjungan Bayi	persen	99,68	95,00	98,89	104,09	95,00	104,09
Capaian Rata-rata Sasaran :						109,83		109,83

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Target Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya mutu pelayanan, akses, dan pemerataan layanan kesehatan pada tahun 2018 telah tercapai dengan capaian 109,83% (Sangat tinggi), demikian juga dibandingkan dengan akhir masa periode RPJMD (2019) Persentase Capaian Kinerja Urusan Kesehatan sudah diatas target yaitu 109,83% (Sangat tinggi).

Beberapa indikator kinerja berhasil memenuhi target dalam RPJMD tahun 2018, di antaranya: Kasus Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Persentase Balita Gizi Buruk, dan Cakupan Kunjungan Bayi. Pada Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI), dan Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan telah mencapai target yang ditetapkan sedangkan pada Indikator Cakupan penemuan dan penanganan penyakit TBC BTA dan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin masih dibawah target yang ditetapkan baik pada tahun 2018 maupun target pada akhir periode RPJMD.

Anggaran pada Sasaran Meningkatnya mutu pelayanan, akses, dan pemerataan layanan kesehatan sebesar Rp. 369.689.877.303,00 (tiga

ratus enam puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 296.285.227.371,00 (dua ratus sembilan puluh enam milyar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 80,14%.

Penghargaan Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori “Baik Dengan Catatan” Tahun 2018. Merupakan penghargaan tingkat nasional dalam Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Evaluasi dilakukan di 34 Unit Pelayanan



Gambar 3.1. Penghargaan Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori “Baik Dengan Catatan” Tahun 2018

Publik tingkat provinsi dan 208 Unit Pelayanan Publik tingkat Kabupaten, salah satunya RSUD Muntilan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya mutu pelayanan, akses, dan pemerataan layanan kesehatan antara lain:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, khususnya untuk pelayanan rujukan berjenjang.
- b. Belum optimalnya peningkatan kompetensi SDM kesehatan untuk mendukung pelayanan pada sarana pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan rujukan.
- c. Masih kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat dan masih rendahnya peran dan dukungan masyarakat dalam pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut antara lain:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan melalui penggalan potensi penganggaran dari berbagai sumber anggaran, untuk peningkatan cakupan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar mutu pelayanan kesehatan;

- b. Pengembangan kualitas sumber daya kesehatan melalui peningkatan kompetensi sesuai dengan profesi dan kompetensinya serta peningkatan jumlah sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui perekrutan sebagai pegawai BLUD Puskesmas;
- c. Peningkatan promosi kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat dan revitalisasi fungsi forum kesehatan desa dalam pengembangan Desa Siaga.

Program-program yang dilaksanakan untuk mewujudkan Sasaran Meningkatnya mutu pelayanan, akses, dan pemerataan layanan kesehatan adalah:

- a. Obat dan Perbekalan Kesehatan
- b. Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Pengawasan Obat Dan Makanan
- d. Promosi pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- e. Perbaikan gizi masyarakat
- f. Pengembangan Lingkungan Sehat
- g. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- h. Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- i. Pelayanan kesehatan penduduk miskin
- j. Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
- k. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Jiwa/ Paru-Paru dan RS Mata
- l. Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan
- m. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
- n. Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- o. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- 2. Sasaran Strategis Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol

Sasaran Strategis Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya penambahan penduduk. Sedangkan Keluarga Sejahtera (KS) adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi,

dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Tolok ukur keberhasilan sasaran strategis terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Dan Terkontrol Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga *)	persen	1,13	1,6	1,14	128,75	1,57	127,39
2	Rasio Akseptor KB	persen	79,71	81,45	73,08	89,72	81,5	89,67
3	Cakupan Peserta KB Aktif	persen	79,71	80,84	73,08	90,40	80,89	90,34
4	Keluarga Pra Sejahtera *)	persen	22,33	21,28	21,23	100,23	20,18	94,80
5	Keluarga Sejahtera I *)	persen	16,39	14,88	15,29	97,24	14,38	93,67
Capaian Rata-rata Sasaran :						101,27		99,17

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2018

Target capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol pada tahun 2018 telah tercapai yaitu sebesar 101,27% (sangat baik) sedangkan dibandingkan dengan target RPJMD telah mendekati target capaian dengan hasil 99,17% (sangat baik).

Anggaran Sasaran Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 8.156.304.000,00 (delapan milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.058.329.274,00 (tujuh milyar lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) atau sebesar 86,54%.

Penunjang keberhasilan dalam menjalankan Sasaran Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol adalah adanya kerjasama lintas program dan lintas sector, seperti dengan Dinas Kesehatan dan jajarannya, TNI, Organisasi Muslimat NU, Aisyiah.

Permasalahan yang dihadapi Sasaran Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol adalah Rasio akseptor KB belum mencapai target karena adanya Pasangan Usia Subur Droup Out (PUS DO) yang ingin mempunyai anak lagi, juga adanya tambahan PUS dari pasangan pengantin baru, juga ada instruksi dari BKKBN untuk melakukan validasi data.

Alternatif Solusi yang dilakukan : Meningkatkan mutu pelayanan KB, melaksanakan tertib Recording Reporting (RR), mengoptimalkan kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) program KKBPK, memfasilitasi penyediaan sarana prasarana pelayanan KB

Program-program yang mendukung pelaksanaan Sasaran Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol adalah:

- a. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;
- b. Program Keluarga Berencana;
- c. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
- d. Program pelayanan Kontrasepsi;
- e. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR.

3. Sasaran Strategis Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkat, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan

Sasaran Strategis kualitas pembangunan manusia yang semakin meningkat, dengan pemerataan pendidikan yang layak, mutu pendidikan, dan akses terhadap pendidikan dalam mencapai keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis terdiri dari 23 (dua puluh tiga) indikator, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Secara keseluruhan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.16

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kualitas Pembangunan Manusia Yang Semakin Meningkat, Dengan Pemerataan Pendidikan Yang Layak, Mutu Pendidikan, Dan Akses Terhadap Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	APK PAUD	persen	62,64	54,39	62,64	115,17	54,54	114,85
2	Angka melek huruf	persen	94,63	93,85	94,63	100,83	93,95	100,72
3	Angka rata-rata lama sekolah	persen	7,40	9,00	7,40	82,22	10,00	74,00
4	Angka Partisipasi Murni :							
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	persen	92,66	96,79	92,66	95,73	97,09	95,44
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	persen	67,76	81,96	67,76	82,67	82,65	81,98
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	persen	46,88	64,06	NA	NA	66,56	NA
	<i>Angka partisipasi kasar</i>							
8	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	persen	105,87	101,94	105,87	103,86	101,84	103,96
9	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	persen	88,38	97,06	88,38	91,06	97,56	90,59
10	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	persen	64,23	75,10	NA	NA	80,00	NA

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Angka Putus Sekolah SD/MI *)	persen	0,05	0,14	0,05	164,29	0,14	164,29
12	Angka Putus Sekolah SMP/MTs *)	persen	0,24	0,59	0,24	159,32	0,57	157,89
13	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA *)	persen	0,13	0,81	NA	NA	0,81	NA
	<i>Angka Kelulusan:</i>							
14	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	persen	99,99	99,98	100,00	100,02	99,98	100,02
15	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	persen	99,77	99,99	99,91	99,92	99,99	99,92
16	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	persen	99,90	99,98	NA	NA	99,98	NA
	<i>Rerata Nilai UN :</i>							
17	Rerata Nilai UN SD/MI	nilai	7,58	7,72	7,03	91,06	7,75	90,71
18	Rerata Nilai UN SMP/MTs	nilai	5,78	6,48	5,98	92,28	6,49	92,14
19	Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK	nilai	5,77	7,16	NA	NA	7,18	NA
20	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	87,42	86,00	87,42	101,65	88,00	99,34
	<i>Angka Melanjutkan :</i>							
21	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	persen	91,78	89,62	90,72	101,23	89,62	101,23
22	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA	persen	79,18	70,70	79,18	111,99	71,55	110,66
23	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	persen	73,20	84,68	73,20	86,44	86,74	84,39
24	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	persen	78,28	90,00	78,28	86,98	91,43	85,62
Capaian Rata-rata Sasaran :						103,71		102,65

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Target Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kualitas Pembangunan Manusia Yang Semakin Meningkatkan, Dengan Pemerataan Pendidikan Yang Layak, Mutu Pendidikan, Dan Akses Terhadap Pendidikan pada tahun 2018 telah tercapai, dengan capaian sebesar 103,71% (Sangat tinggi) demikian juga pada capaian dibandingkan target akhir RPMD sebesar 102,65% (Sangat tinggi). Dari indikator - indikator tersebut, tercatat 8 (delapan) indikator yang capaian kinerja tahunannya telah berhasil melampaui target. Pada indikator yang mengukur tingkat keberhasilan pendidikan pada sekolah SMA/SMK/MA tidak dilakukan pengukuran karena berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan SMA/SMK/MA dilimpahkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi.

Anggaran pada Kinerja Sasaran Strategis Kualitas Pembangunan Manusia Yang Semakin Meningkatkan, Dengan Pemerataan Pendidikan Yang Layak, Mutu Pendidikan, Dan Akses Terhadap Pendidikan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.177.022.585.234,00 (seratus tujuh puluh

tujuh milyar dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.164.278.551.797,71,00 (seratus enam puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh satu rupiah) atau 92,80%.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis Kualitas Pembangunan Manusia Yang Semakin Meningkat, Dengan Pemerataan Pendidikan Yang Layak, Mutu Pendidikan, Dan Akses Terhadap Pendidikan antara lain:

- a. Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan,
- b. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Kurangnya sarana prasarana pendidikan;
- d. Perubahan peraturan dari pusat yang mempengaruhi teknis pelaksanaan pada tingkat SKPD.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut antara lain:

- a. Peningkatan kualitas (mutu), relevansi, dan daya saing pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan yang ada;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Peningkatan perluasan dan akses layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal dan informal;
- d. Penyesuaian dan keselarasan dengan peraturan dari pusat.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada Sasaran Strategis Kualitas Pembangunan Manusia Yang Semakin Meningkat, Dengan Pemerataan Pendidikan Yang Layak, Mutu Pendidikan, Dan Akses Terhadap Pendidikan untuk mencapai target-target indikator kinerja di atas adalah:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- c. Program Pendidikan Menengah;
- d. Program Pendidikan Non Formal;
- e. Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

4. Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga

Sasaran Strategis terwujudnya pengembangan pemuda yang berkarakter serta berkesempatan berolahraga memiliki tolok ukur capaian keberhasilannya sebanyak 5 (lima) indikator kinerja dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Organisasi Pemuda	organisasi	26	26	27,00	103,85	27	100,00
2	Jumlah Organisasi Olah Raga	organisasi	29	35	35,00	100,00	36	97,22
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	kegiatan	17	18	20,00	111,11	19	105,26
4	Jumlah Kegiatan Olah Raga	kegiatan	24	24	24,00	100,00	24	100,00
5	Lapangan Olah Raga	permil	0,20	1,5	1,25	83,33	2	62,50
Capaian Rata-rata Sasaran :						99,66		93,00

Sumber: Dinas Parawisata dan Olah Raga Kabupaten Magelang, 2018

Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga pada tahun 2018 hampir tercapai dengan capaian sebesar 99,66% (Sangat tinggi), demikian juga untuk target akhir RPJMD hamper tercapai dengan capaian sebesar 93,00% (Sangat tinggi).

Anggaran pada Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga sebesar Rp. 11.180.556.994,00 (sebelas milyar seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 10.259.068.503,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah) atau 91,76%.

Permasalahan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga Kepemudaan dan Olahraga adalah Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga di wilayah kecamatan.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga diwilayah kecamatan.

Peningkatan kinerja pada Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga dilaksanakan melalui program-program pendukung sebagai berikut:

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
 2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
 3. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
 4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
5. Sasaran Strategis Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca

Perhatian pemerintah terhadap keberadaan perpustakaan diharapkan akan semakin meningkat. Ke depan, perpustakaan bukan hanya sebagai tempat untuk menyimpan koleksi buku dan majalah, namun perpustakaan lebih sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut atau tidak. Dalam perpustakaan, selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam perpustakaan digital, dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer. Sasaran strategis Meningkatnya penguasaan Iptek, dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca memiliki tolok ukur capaian keberhasilan terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Perpustakaan	unit	793	794	797,00	100,38	815	97,79
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	39.967	44.447	76.548,00	172,22	45335	168,85
3	Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	persen	2,16	2,20	2,24	101,82	2,24	100,00
Capaian Rata-rata Sasaran :						124,81		122,21

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, 2018

Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca pada tahun 2018 adalah sebesar 124,81% (Sangat tinggi) hal ini telah diatas target, demikian juga capaian terhadap target akhir RPJMD telah diatas target sebesar 122,21% (Sangat tinggi).

Anggaran untuk mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.193.018.100,00 (dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta delapan belas ribu seratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.771.887.636,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau 80,80%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam mendukung capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca adalah:

- a. Masih rendahnya minat baca masyarakat;
- b. Keterbatasan sarana prasarana perpustakaan daerah, khususnya gedung perpustakaan dan unit armada perpusling;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal;
- d. Keterbatasan tenaga *supporting staff*.

Alternatif solusi dari permasalahan di atas adalah:

- a. Peningkatan minat baca masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan perpustakaan sebagai wahana fungsi penelitian, informasi, pelestarian dan rekreasi;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan daerah, khususnya gedung perpustakaan yang lebih representatif;
- c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan;
- d. Penambahan tenaga *supporting staf* di perpustakaan.

Program yang mendukung untuk pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

6. Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan

Sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan memiliki tolok ukur capaian keberhasilan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.19.
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan
 dan Peran Perempuan dalam Pembangunan
 Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	persen	1,88	2,54	1,98	77,95	2,56	77,34
2	Rasio KDRT *)	persen	0,02	0,025	0,02	108,00	0,02	104,17
3	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	persen	75,00	100,00	75,51	75,51	100,00	75,51
Capaian Rata-rata Sasaran :						87,15		85,67

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2018

Target capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan pada tahun 2018 belum tercapai dengan capaian 87,15% (Tinggi) demikian juga terhadap target capaian terhadap akhir RPJMD adalah 85,67% (Tinggi).

Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.450.684.750,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.410.293.558,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) atau 97,22%.

Penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan selama ini adalah: Keberhasilan



Gambar 3.2. Penghargaan Kabupaten Layah Anak (KLA) Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018



Keberhasilan penanganan kasus KDRT di Kabupaten karena sudah ada kerjasama dengan lintas sector, khususnya lembaga hukum yaitu Kepolisian yang menangani P2TP2A.

Penghargaan Kabupaten Layah Anak (KLA) merupakan penghargaan dari Kementerian PPPA kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) se Indonesia atas komitmennya bersama masyarakat dan dunia usaha dalam rangka Pemenuhan Hak-hak Anak (PHA). Penghargaan KLA untuk Kabupaten Magelang pada tahun 2018 merupakan penghargaan yang ke 5 (Lima). Bupati Magelang, Bapak Zaenal Arifin, S.IP menerima penghargaan tersebut pada puncak acara Peringatan Hari Anak Tahun 2018.

Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penghargaan APE merupakan penghargaan dari kementerian PPPA kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/kota) se Indonesia atas komitmennya dalam rangka Pengarusutamaan Gender.



Gambar 3.3. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018

Kabupaten Magelang telah memperoleh penghargaan APE yang kedua. Bapak Bupati menerima penghargaan tersebut pada rangkaian Peringatan Hari Ibu Tahun 2018 pada tanggal 19 Desember 2018 di Jakarta.

Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan selama ini adalah: Belum adanya UPT P2TP2A di setiap Kecamatan sehingga kasus yang bisa ditangani adalah yang sudah dilaporkan langsung ke Kantor Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, sedangkan penemuan kasus secara aktif belum dapat dilaksanakan.

Alternatif solusi untuk permasalahan di atas adalah: Pengusulan UPT P2TP2A untuk setiap Kecamatan, sehingga penjangkauan dan penemuan

kasus dapat lebih mudah dalam penjangkauan sosialisasi sampai ke tingkat desa.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan adalah :

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
7. Sasaran Strategis Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti pembangunan kehidupan beragama. Target pembangunan sosial diarahkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Berkurangnya kualitas dan kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	unit	39,00	34,00	39,00	114,71	34,00	114,71
2	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	persen	28,95	18,50	46,32	250,38	20,00	231,60
Capaian Rata-rata Sasaran :						182,54		173,15

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Target capaian Kinerja Sasaran Strategis Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin pada tahun 2018 adalah telah melebihi dari target yang ditetapkan dengan capaian 182,54% (Sangat tinggi) demikian juga dengan terhadap target akhir RPJMD telah mencapai 173,15% (Sangat tinggi).

Anggaran Sasaran Strategis Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 7.318.235.000,00 (tujuh milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 6.588.177.338,00 (enam milyar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) atau 90,02%.

Penunjang keberhasilan dalam menjalankan Sasaran Strategis Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin adalah Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan.

Permasalahan yang dihadapi berupa validasi data dilakukan setelah tahun berjalan.

Solusi yang dilakukan pentertiban Pencatatan, pendataan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada Sasaran Strategis Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin adalah:

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- c. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya);
- d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
- e. Program Peningkatan Kehidupan Sosial/ Keagamaan.

8. Sasaran Strategis Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Terwujudnya karakter masyarakat yang berbudaya, beragama serta bermoral berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.21

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	kali	38	38	38,00	100,00	38	100,00
2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	unit	27	18	18,00	100,00	18	100,00
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	persen	100	66,95	100,00	149,37	70,00	142,86

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa target capaian kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila pada tahun 2018 telah tercapai yaitu sebesar 116,46% (Sangat tinggi) demikian juga terhadap capaian akhir RPJMD sebesar 114,29% (Sangat tinggi).

Anggaran kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.963.782.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.866.467.470,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) atau 96,72%.

Permasalahan dan kendala dalam melaksanakan Sasaran Strategis Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila adalah Kesadaran masyarakat di dalam ikut memelihara dan mempertahankan benda, situs, dan kawasan cagar budaya masih rendah.

Alternatif solusinya adalah pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya memelihara dan mempertahankan benda, situs, dan kawasan cagar budaya.

Program-program yang mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila adalah:

1. Program Pengembangan Nilai Budaya;
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
9. Sasaran Strategis Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan

Sasaran strategis terwujudnya masyarakat yang sejahtera mandiri dan berperan serta dalam pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk memberi peluang kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan secara partisipatif dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten. Selain itu pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya peningkatan kemampuan untuk membangun diri dan lingkungannya, serta meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan, agar kondisi kehidupannya mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.

Tabel 3.22.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	persen	20	17	20,00	117,65	19,00	105,26
2	Cakupan Kelompok Binaan PKK	persen	28,24	33,87	24,82	73,28	39,52	62,80
3	Jumlah LSM (Bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat)	LSM	4	4	4,00	100,00	6	66,67
Capaian Rata-rata Sasaran :						96,98		78,24

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan pada Tahun 2018 hampir tercapai sebesar 96,98 % (sangat Tinggi), sedangkan terhadap capaian akhir RPJMD masih jauh tingkat capaiannya yaitu sebesar 78,24% (Tinggi).

Anggaran untuk mendukung sasaran strategis terwujudnya masyarakat yang sejahtera mandiri dan berperan serta dalam pembangunan pada tahun 2018 mencapai Rp. 9.331.684.300,00 (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.8.636.069.775,00 (delapan milyar enam ratus tiga puluh enam juta enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 92,55%.

Permasalahan dan kendala pencapaian sasaran strategis terwujudnya masyarakat yang sejahtera mandiri dan berperan serta dalam pembangunan antara lain:

- a. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pedesaan;
- b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program dan kegiatan pembangunan terkait dengan pengentasan kemiskinan;
- c. Belum optimalnya daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan;
- d. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Alternatif solusi terhadap permasalahan - permasalahan di atas antara lain:

- a. Peningkatan peran masyarakat dan pemberdayaan dalam pembangunan;
- b. Peningkatan lembaga perekonomian masyarakat desa melalui pembentukan BUMDesa, mengadvokasi seluruh Kepala desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- c. Advokasi kepada seluruh kepala desa dan lembaga desa untuk meningkatkan kreativitas dan memunculkan inovasi yang mengarah pada perwujudan kesejahteraan masyarakat desa;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang bersifat kemitraan, swadaya, dan gotong - royong.

Program-program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;

- b. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- d. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

10. Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja

Sasaran strategis meningkatnya tingkat kesejahteraan dan partisipasi angkatan kerja dilaksanakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan partisipasi angkatan kerja. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.23.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	persen	74,49	75,65	71,28	105,78	76,65	92,99
2	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun*)	persen	1,34	1,28	2,70	-10,94	1,28	-10,94
3	Pencari Kerja yang Ditempatkan	persen	55,35	48,32	42,86	88,70	54,27	78,98
4	Tingkat Pengangguran Terbuka*)	persen	2,44	3,10	2,91	106,13	3,02	103,64
5	Keselamatan dan Perlindungan	persen	77,11	77,00	0,00	0,00	79,00	0,00
6	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	persen	100	100	100,00	100,00	100	100,00
Capaian Rata-rata Sasaran :						64,94		60,78

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa target capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2018 belum tercapai dengan capaian sebesar 63,02% (Rendah) demikian juga dengan capaian terhadap target akhir RPJMD mencapai 60,78 (Rendah). Indikator Kinerja “Keselamatan dan Perlindungan” bernilai 0 (nol), hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja yang menjadi Tupoksi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan beralih dari Pemda Kabupaten/Kota ke Provinsi Jateng efektif sejak tahun Januari 2017.

Indikator Kinerja "Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun" sebagai indikator negatif jauh dibawah dari target. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 terdapat banyak permasalahan hubungan industrial di perusahaan yang memicu sengketa antara pengusaha dengan pekerja. Namun tetap bisa diselesaikan tingginya angka sengketa itu dengan melakukan penyelesaian baik dengan bipartit (penyelesaian di level perusahaan) maupun tripartit (penyelesaian melalui mediasi dinas).

Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.708.821.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.274.847.619,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah) atau sebesar 88,30%.

Hambatan dan kendala pada Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja antara lain:

- a. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- b. Keterbatasan anggaran untuk pelatihan kerja calon tenaga kerja;
- c. Belum optimalnya usaha kerja sama penempatan dan kesempatan kerja.

Alternatif solusi dari permasalahan di atas adalah:

- a. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja;
- b. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;
- c. Penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

Program-program pembangunan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja yang dilaksanakan adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
- c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

11. Sasaran Strategis Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal

Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Sedangkan Usaha Kecil Menengah adalah istilah yang mengacu pada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perludilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Sasaran Strategis Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal

dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi lokal. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.24.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Koperasi Aktif	persen	82,76	77,95	94,00	120,59	78,18	120,24
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	UKM non BPR/LKM UKM	106.200	106.387	106.600	100,20	106.384	100,20
3	Jumlah BPR/LKM	BPR/LKM	297	379	297,00	78,36	382	77,75
4	Usaha Mikro dan Kecil	persen	1,017	0,37	1,15	310,81	0,38	302,63
Capaian Rata-rata Sasaran :						152,49		150,20

Sumber: Disdagkop UKM Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan target capaian kinerja Sasaran Strategis Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal pada tahun 2018 telah diatas target yang ditetapkan sebesar 152,49% (Sangat tinggi) demikian juga dengan capaian terhadap target RPJMD 150,20 (Sangat tinggi), pada indikator Jumlah UKM non BPR/LKM UKM capaian masih sangat rendah.

Anggaran Sasaran Strategis Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 4.193.555.250,00 (empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu

dua ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.621.818.856,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) atau 86,37%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Masih rendahnya pengelolaan manajemen koperasi;
- b. Kurangnya akses permodalan;
- c. Terbatasnya akses dan informasi pasar;
- d. Belum adanya pusat perdagangan bersama/ UMKM Center.

Alternatif solusi dari permasalahan - permasalahan di atas, antara lain:

- a. Pemberian pelatihan administrasi dan manajemen koperasi;
- b. Kemudahan akses ke perbankan;
- c. Bantuan pemerintah untuk mendapatkan akses dan informasi pasar secara lebih luas;
- d. Dibangunnya pusat perdagangan bersama/ UMKM Center.

Program-program yang dilaksanakan Sasaran Strategis Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal adalah:

- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
- d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

12. Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah

Sasaran strategis meningkatnya perekonomian daerah melalui tingkat investasi di daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya perekonomian daerah melalui tingkat investasi di daerah. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.25.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	investor	730	1.085	1.194	110,05	1.164	102,58
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Juta rupiah	1.030.689	665.163	1.976.374	297,13	724.647	272,74
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	persen	11,37	28,19	31,43	111,49	31,19	100,77
4	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	milyar rupiah	539,75	164	945,69	576,64	359	263,42
Capaian Rata-rata Sasaran :						273,83		739,50

Sumber: BPMPTSP Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa target capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi pada tahun 2018 telah melampaui target yang ditetapkan adalah sebesar 273,83% (Sangat tinggi) demikian pula pada target akhir RPJMD telah dilampaui sebesar 184,88% (Sangat tinggi).

Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.906.571.300,00 (satu milyar sembilan ratus enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.572.048.334,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) atau 82,45%. Permasalahan dan kendala pada pelaksanaan Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi antara lain:

- a. Belum optimalnya kewenangan pelayanan perijinan penanaman modal;
- b. Belum optimalnya jumlah dan nilai investasi berskala nasional/ PMDN;
- c. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Alternatif solusi terhadap permasalahan - permasalahan di atas antara lain:

- a. Penyusunan regulasi di bidang pelayanan perijinan penanaman modal yang ramah investor;
- b. Peningkatan iklim investasi di daerah;
- c. Peningkatan pelayanan administrasi investasi.

Program-program pembangunan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
- c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah.

13. Sasaran Strategis Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat

Sasaran strategis Makin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.26.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ketersediaan Pangan Utama Berpersen	persen	287,17	188,06	220,23	117,11	188,10	117,08
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah		87,10	93,1	87,90	94,41	93,10	94,41
Capaian Rata-rata Sasaran :						105,76		105,75

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat pada tahun 2018 telah terlampaui yaitu sebesar 109,07% (Sangat baik) demikian juga terhadap target capaian RPJMD sebesar 108,77% (Sangat tinggi).

Anggaran untuk mendukung ketercapaian Sasaran Strategis Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.816.037.075,00 (dua milyar delapan ratus enam belas juta tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah)

dengan realisasi sebesar Rp. 2.233.377.250,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau 79,31%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Kesulitan dalam mengubah pola konsumsi masyarakat, dari beras ke non beras;
- b. Belum optimalnya upaya - upaya pengamanan pangan.

Alternatif solusinya adalah:

- a. Kampanye dan sosialisasi tentang diversifikasi pangan secara lebih intensif;
- b. Mengoptimalkan upaya-upaya pengamanan pangan, seperti uji kandungan gizi pangan.

Program yang mendukung ketercapaian Sasaran Strategis Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

14. Sasaran Strategis Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan budidaya hayati termasuk bercocok tanam dan pembesaran hewan ternak. Kabupaten Magelang ditinjau dari keadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sangat potensial dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di bidang pertanian. Dengan kondisi topografi dan jenis tanah yang beragam memberikan beragam pula pilihan jenis komoditas pertanian yang dapat dikembangkan. Sasaran strategis menguatnya kontribusi pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja, dengan pengukuran - pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.27
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menguatnya Kontribusi Pertanian
 Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
 Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan							
1	Produktivitas Padi	Kw/ha	62,9	60,09	63,70	106,01	60,1	105,99
2	Produksi Padi	Ton/th	483.331	355.617	478.266	134,49	355.676	134,47
3	Produktivitas Jagung	Kw/ha	58,73	59,28	63,53	107,17	59,3	107,13
4	Produksi Jagung	Ton/th	55.083	74.307	51.446,00	69,23	74.337	69,21
5	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	persen	21,78	20,89	21,78	104,26	20,03	108,74
6	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)	persen	72,11	72,22	72,11	99,85	71,84	100,38
7	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB	persen	5,25	7,60	5,68	74,74	7,73	73,48
8	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	persen	17,65	12,86	17,65	137,25	13,09	134,84
9	Cakupan Bina Kelompok Petani	persen	26	2,5	12,42	496,80	2,7	460,00
	Produksi Hewan ternak							
10	Sapi potong	kg	1.791.694	1.825.656	1.826.011	100,02	1.862.169	98,06
11	Kerbau	kg	520	530	693,20	130,79	541	128,13
12	Kambing	kg	749.957	777.711	737.749	94,86	793.265	93,00
13	Domba	kg	1.053.911	1.093.751	1.043.219	95,38	1.115.626	93,51
	Produksi Hewan Unggas							
14	Ayam Pedaging	ton	9.417,335	9.761,90	9.762,02	100,00	9.957,10	98,04
15	Ayam Ras Petelur	ton	968	999,59	991,59	99,20	1.019,50	97,26
16	Ayam Buras	ton	1.170.022	1.215,67	1.168,78	96,14	1.239,98	94,26
17	Itik	ton	90,445	92,260	92,30	100,05	94,11	98,09
18	Sapi Perah	liter	725.679	731.528	731.634	100,01	746.158	98,05
	Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari)							
19	Daging	gr/kap/hr	5,87	5,95	5,96	100,17	6,2	96,13
20	Telur	gr/kap/hr	3,97	4,35	4,00	91,95	4,65	86,02
21	Susu	gr/kap/hr	0,02	0,08	0,04	50,00	0,11	36,36
Capaian Rata-rata Sasaran :						118,49		114,82

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada tahun 2018 telah melampaui target yaitu sebesar 118,49% (Sangat tinggi) sedangkan capaian terhadap akhir masa RPJMD sebesar 79,04% (Tinggi) belum tercapai.

Anggaran pada Sasaran Strategis Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di tahun 2018 adalah sebesar Rp 32.150.559.600,00 (tiga puluh dua milyar seratus lima puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan

realisasi sebesar Rp 29.241.235.093,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah) atau sebesar 90,95%. Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada Sasaran Strategis Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat adalah:

- a. Semakin meningkatnya kebutuhan pemenuhan pangan masyarakat;
- b. Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan ke non pertanian;
- c. Rendahnya daya saing produk-produk pertanian;
- d. Rendahnya akses pasar komoditas pertanian bagi petani dan kelompok tani;
- e. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani;
- f. Belum optimalnya pengembangan potensi peternakan.

Alternatif solusi untuk permasalahan-permasalahan di atas antara lain:

- a. Diversifikasi pangan;
- b. Pengetatan aturan/ kebijakan yang terkait dengan izin pengeringan lahan;
- c. Peningkatan kualitas produk-produk pertanian;
- d. Fasilitasi akses pasar untuk komoditas pertanian bagi petani dan kelompok petani;
- e. Penguatan kelembagaan petani;
- f. Mengoptimalkan pengembangan potensi peternakan.

Program - program yang mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan;
- e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan;
- f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
- g. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- h. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
- i. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.

15. Sasaran Strategis Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan

Sumber daya alam berupa air cukup melimpah di wilayah Kabupaten Magelang sehingga sangat berpotensi untuk pengembangan perikanan darat. Kabupaten Magelang mempunyai potensi besar sebagai sentra benih ikan. Jumlah rumah pembenihan ada 5 (lima) Balai Benih Ikan (BBI), yang terdiri dari 3 (tiga) BBI Lokal dan 2 (dua) BBI milik Pemerintah Provinsi dengan didukung 2 (dua) Pasar Ikan Pemerintah Kabupaten dan 10 (sepuluh) pasar desa/ kelompok.

Sasaran strategis Menguatnya struktur ekonomi masyarakat melalui tingkat produksi perikanan memiliki tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.28.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Produksi Perikanan (Benih)	juta ekor	1,717550	1,750	2,01	114,75	2,00	100,40
2	Produksi Perikanan Budidaya	ton	21.058,46	16.800	23.097,01	137,48	18.000	128,32
3	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	ton	275,9	253,43	278,14	109,75	263,57	105,53
4	Konsumsi Ikan	Kg/kap/tahun	18,61	15,30	19,60	128,10	15,75	124,44
5	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian (%)	persen	2,82	2,62	2,29	87,40	2,68	85,45
Capaian Rata-rata Sasaran :						115,50		108,83

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan pada tahun 2018 telah tercapai dengan capaian sebesar 115,50% (Sangat tinggi) dan untuk capaian terhadap akhir masa RPJMD telah melalui target sebesar 108,83% (Sangat tinggi).

Anggaran untuk mendukung Sasaran Strategis Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan pada tahun 2018 sebesar Rp. 3.664.021.649,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.561.827.923,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) atau 97,21%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah:

- a. Kurang optimalnya usaha pembenihan ikan yang menyediakan benih ikan berkualitas dengan prinsip *Good Breeding Practice*;
- b. Kurangnya akses informasi, teknologi, modal dan pasar serta jaminan kelangsungan usaha perikanan;
- c. Belum dimanfaatkannya sumber daya perikanan secara optimal;
- d. Kurang berkualitasnya produk hasil perikanan karena lemahnya penerapan *Good Handling Practice* dan *Good Manufacturing Practice*.

Alternatif solusinya adalah :

- a. Penyediaan induk ikan berkualitas;
- b. Meningkatkan akses informasi, teknologi, modal dan pasar serta jaminan kelangsungan usaha perikanan;
- c. Mengoptimalkan sumber daya perikanan;
- d. Mengoptimalkan penerapan *Good Handling Practice* dan *Good Manufacturing Practice* untuk meningkatkan kualitas mutu produk hasil perikanan.

Program-program yang mendukung Sasaran Strategis Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan adalah:

- a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- b. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
- c. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar.

16. Sasaran Strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan
Sasaran strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan memiliki tolok ukur capaian keberhasilan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.29

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	persen	13,45	10,01	10,85	108,39	9,98	108,72
2	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	Juta US\$	99,89	88,80	50,87	57,29	89,00	57,16
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	persen	11,42	1,79	3,90	217,88	1,74	224,14
Capaian Rata-rata Sasaran :						127,85		130,00

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten dan Koperasi dan UKM Magelang, 2018

Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan pada tahun 2018 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 127,85% (Sangat tinggi), demikian juga pada target akhir tahun RPJMD sebesar 130,00 (Sangat tinggi)

Anggaran untuk mendukung Strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 117.756.873.436,00 (seratus tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 53.152.126.895,00 (lima puluh tiga milyar seratus lima puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sebesar 79,34%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai;
- b. Keterbatasan anggaran untuk mengikuti pameran perdagangan internasional di Jakarta;
- c. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan penataan dan pembinaan kepada kelompok pedagang/ usaha informal.

Solusi alternatifnya adalah:

- a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kegiatan ekonomi dan pengembangan perdagangan, terutama revitalisasi pasar tradisional, sehingga mendorong pertumbuhan produk unggulan lokal;
- b. Meningkatkan anggaran untuk mengikuti pameran perdagangan internasional di Jakarta sehingga produk-produk unggulan dari Kabupaten Magelang bisa dikenal;
- c. Meningkatkan anggaran untuk melaksanakan penataan dan pembinaan kepada kelompok pedagang/usaha informal sehingga cakupan pembinaan kelompok pedagang/ usaha informal bisa senantiasa meningkat.

Program-program untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
- c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
- d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan;
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan.

17. Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah

Industri merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Sektor industri memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Magelang. Sasaran strategis Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber - sumber kekayaan daerah. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.30

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	persen	0,72	2,81	2,95	104,98	2,81	104,98
2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	persen	22,66	18,03	19,55	108,43	17,95	108,91
3	Pertumbuhan Industri.	persen	2,88	3,76	3,70	98,40	3,76	98,40
Capaian Rata-rata Sasaran :						103,94		104,10

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah pada tahun 2018 telah tercapai yaitu sebesar 103,94% (Sangat tinggi), sedangkan pada target akhir tahun belum tercapai yaitu sebesar 74,95% (sedang).

Anggaran untuk mendukung Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.580.731.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 1.512.052.263,00 (satu milyar lima ratus dua belas juta lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) atau 82.26%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya kapasitas SDM di level manajerial dan menurunnya kualitas SDM terampil di level proses produksi;
- b. Kurangnya daya saing produk industri kecil;
- c. Kurang adanya keterkaitan antar rantai nilai (bahan baku, proses produksi, dan promosi/ pemasaran).

Alternatif solusi pada permasalahan di atas adalah dengan mengembangkan industri kecil berbasis potensi lokal (SDM, bahan baku, dan budaya) dengan pendekatan kearifan lokal.

Program-program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah antara lain adalah:

- a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
- d. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

18. Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah

Pariwisata menjadi salah satu penopang kegiatan ekonomi di Kabupaten Magelang. Sasaran strategis Makin optimalnya pemanfaatan dan pengembangan potensi pariwisata daerah memiliki tolok ukur capaian keberhasilannya sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kunjungan Wisata Manca Negara	orang	337.515	723.151	358.673	49,60	860.549	41,68
2	Kunjungan Wisata Nusantara	orang	5.064.569	5.963.149	5.977.422	100,24	6.594.051	90,65
3	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	persen	4,6	6,63	5,10	76,92	6,89	74,02
Capaian Rata-rata Sasaran :						75,59		68,78

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah pada tahun 2018 belum tercapai yaitu sebesar 75,59% (Tinggi) demikian juga terhadap capaian RPJMD sebesar 68,78% (Sedang).

Anggaran untuk mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 20.989.649.920,00 (dua puluh milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan realisasi Rp 18.673.784.299,00 (delapan belas milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 88,97%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah:

- a. Fasilitas yang masih terbatas di obyek wisata berupa sarana transportasi umum menuju obyek wisata;
- b. Minimnya atraksi wisata di obyek wisata.

Alternatif solusi untuk permasalahan di atas antara lain:

- a. Penambahan fasilitas di obyek wisata;
- b. Meningkatkan upaya promosi melalui website, media sosial, dan sejenisnya serta meningkatkan jumlah atraksi wisata

Program - program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah adalah:

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- c. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

19. Sasaran Strategis Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru

Sasaran strategis aksesibilitas antar daerah meningkat dengan dukungan infrastruktur wilayah yang baik serta berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan - kawasan pertumbuhan baru memiliki tolok ukur capaian keberhasilan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja, dengan capaian sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.32
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	persen	73,63	69,49	74,17	106,73	69,73	106,37
2	Rasio Jaringan Irigasi	persen	41,31	30,57	43,68	142,89	30,57	142,89
3	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	persen	64,55	64,6	65,93	102,06	67,40	97,82
Capaian Rata-rata Sasaran :						117,23		115,69

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Target Capaian Sasaran Strategis Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru pada tahun 2018 telah tercapai dengan capaian 117,23% (Sangat tinggi) demikian juga capaian pada akhir RPJMD juga telah tercapai dengan hasil 115,69% (Sangat tinggi).

Anggaran pada Sasaran Strategis Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru pada tahun 2018 sebesar Rp. 215.908.849.428,00 (dua ratus lima belas milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan empat ratus dua puluh delapan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 194.737.886.246,00 (seratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam dua ratus empat puluh enam rupiah) atau 90,19%. Anggaran urusan pekerjaan umum berdasarkan 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi satu dengan urusan penataan ruang, sehingga pada penganggaran tahun 2018 menjadi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian urusan pekerjaan umum antara lain:

- a. Masih terdapat sarana prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar akses perekonomian di perkotaan dan pedesaan baik secara kualitas dan kuantitas belum memenuhi syarat;
- b. Rawannya kerusakan jalan jalan dan jaringan irigasi akibat bencana alam, khususnya pada musim penghujan;
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan jalan serta irigasi.

Alternatif solusi pada Sasaran Strategis Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru, hendaknya diarahkan pada:

- a. Pembangunan, pemberdayaan, pemerataan, dan aksesibilitas pada infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi;
- b. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan akibat bencana alam;
- c. Peningkatan sosialisasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan jalan serta irigasi.

Program-program pembangunan dalam Sasaran Strategis Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru adalah:

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
- c. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- d. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- f. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- g. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- h. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- i. Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- j. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- k. Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi

1. Program Pengembangan Data/ Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air
20. Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat

Penyelenggaraan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan merupakan tanggung jawab pemerintah berdasarkan penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh perkotaan yang didahului proses pendataan dengan melibatkan peran masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengeluarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/498/KEP/25/2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Magelang. Sasaran strategis Terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni memiliki tolok ukur capaian kinerja terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.33.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPJMD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	persen	81,42	83	82,80	99,76	84,20	98,34
2	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%) *)	persen	2,24	2,50	2,00	120,00	2,45	197,96
3	Rumah Layak Huni (%)	persen	56,7	80	80,00	100,00	85	94,12
Capaian Rata-rata Sasaran :						106,59		130,14

Sumber: Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Target Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat pada tahun 2018 telah tercapai dengan capaian sebesar 106,59% (Sangat tinggi), demikian juga capaian akhir RPJMD telah mendekati target yang ditentukan yaitu mencapai 130,14% (Sangat tinggi).

Anggaran pada Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman

Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat pada tahun 2018 sebesar Rp. 33.647.745.175,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 30.698.829.512,00 (tiga puluh milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah) atau 91,24%.

Hambatan dan kendala pada Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat antara lain:

- a. Masih terdapat rumah tangga yang belum bisa mengakses air bersih yang layak dan berkelanjutan;
- b. Masih terdapat rumah tangga belum bisa mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
- c. Masih cukup tinggi angka rumah tidak layak huni.

Alternatif solusi kebijakan pada Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat hendaknya diarahkan pada pemenuhan sarana dan prasarana pemukiman di masyarakat khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, sarana sanitasi dan kebutuhan rumah layak huni dengan prioritas masyarakat miskin, perkotaan dengan padat penduduk dan di pedesaan.

Program-program pendukung yang dilaksanakan pada Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat meliputi:

- a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan;
- b. Program Pengembangan Perumahan;
- c. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- d. Program Perencanaan Tata Ruang.

21. Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan

Sumber daya mineral adalah endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber daya mineral di Kabupaten Magelang didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian (bahan galian golongan C). Sasaran strategis Terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat dan terkelolanya Sumber Daya Alam yang berbasis lingkungan memiliki tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 2 (dua) indikator, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.34.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Pertambangan Berijin	persen	NA	40	NA	NA	50	NA
2	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	persen	4,35	2,64	NA	NA	2,64	NA
Capaian Rata-rata Sasaran :						NA		NA

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan pada tahun 2018 tidak dilakukan analisa, karena sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

22. Sasaran Strategis Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan

Transportasi memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas penduduk maupun barang. Sarana transportasi berupa modal angkutan umum maupun kendaraan pribadi dapat menjangkau ke seluruh wilayah kabupaten. Sasaran strategis Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang perhubungan memiliki tolok ukur keberhasilan sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.35
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	orang	2.794.562	3.705.271	3.121.745	84,25	3.705.271	84,25
2	Jumlah Ijin Trayek	ijin	1.089	1.057	976	92,34	1.069	91,30
3	Rasio Uji Kir Kendaraan	persen	98,39	96,3	88,10	91,48	96,7	91,11
4	Jumlah Terminal Bis	terminal	6	8	6,00	75,00	8	75,00
5	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	menit	32	32	32	100,00	32	100,00
6	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji		Ada	ada	ada	100,00	ada	100,00
7	Pemasangan Rambu-Rambu	persen	106,36	79	111,72	141,42	94,00	118,85
Capaian Rata-rata Sasaran :						97,78		94,36

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa target Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan pada tahun 2018 hampir tercapai dengan capaian sebesar 97,78% (Sangat tinggi), demikian juga dengan capaian akhir RPJMD telah mencapai 94,36% (Sangat tinggi).

Anggaran pada Sasaran Strategis Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 4.941.785.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.413.808.103,00 (empat milyar empat ratus tiga belas juta delapan ratus delapan ribu seratus tiga rupiah) atau 89,32%. Permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang perhubungan, yang disebabkan karena keterbatasan anggaran.
- b. Terjadinya fenomena penurunan *loadfactor* penumpang pada penggunaan angkutan umum dan terjadi kecenderungan peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, serta banyaknya kendaraan angkutan umum yang tidak masuk terminal.
- c. Tidak tersedianya lahan untuk lokasi terminal di Kecamatan Kaliangkrik dan Kecamatan Sawangan.

Alternatif solusi dari permasalahan di atas adalah:

- a. Penambahan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan menggali sumber anggaran diluar ABD Kabupaten;
- b. Perbaiki kualitas pelayanan angkutan umum dan Peningkatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada Sasaran Strategis Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan adalah :

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
- f. Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

23. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam

Sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam memiliki tolok ukur capaian sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja, dengan hasil - hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.36
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Yang Berorientasi Tata Ruang, Serta Mengurangi Resiko Bencana Alam Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	persen	31	>30	31,00	103,33	>30	103,33
2	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	persen	3,6	3,85	3,60	93,51	4,00	90,00
3	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	persen	0	0	0,00	100,00	0	100,00
4	Luas Kawasan Lindung (ha)	ha	25.886	25.886	25.886,00	100,00	25.886	100,00
5	Luas Kawasan Budidaya (ha)	Ha	82,687	82,687	82,69	100,00	82,687	100,00
6	Jumlah IMB yang Dikeluarkan	IMB	577	645	346	53,64	676	51,18
7	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	persen	35	38	32,00	84,21	38	84,21
Capaian Rata-rata Sasaran :						90,67		89,82

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Yang Berorientasi Tata Ruang, Serta Mengurangi Resiko Bencana Alam pada tahun 2018 belum tercapai dengan capaian sebesar 86,80% (tinggi) demikian juga dengan target capaian akhir RPJMD 89,82% (tinggi).

Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Yang Berorientasi Tata Ruang, Serta Mengurangi Resiko Bencana Alam pada tahun 2018 sebesar Rp. 215.908.849.428,00 (dua ratus lima belas milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.194.737.886.246,00 (seratus sembilan puluh empat

milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) atau 90,19%. Anggaran urusan penataan ruang berdasarkan 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi satu dengan urusan pekerjaan umum, sehingga pada penganggaran tahun 2018 menjadi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Yang Berorientasi Tata Ruang, Serta Mengurangi Resiko Bencana Alam antara lain:

- a. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap kepemilikan IMB;
- b. Banyaknya alih fungsi lahan pertanian teknis ke non pertanian tidak berizin.

Solusi alternatif untuk permasalahan di atas, adalah:

- a. Pemberian sosialisasi dan informasi yang lebih intensif kepada masyarakat;
- b. Pentaatan terhadap pelaksanaan peraturan terkait alih fungsi lahan, yang melibatkan lintas SKPD terkait.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Yang Berorientasi Tata Ruang, Serta Mengurangi Resiko Bencana Alam adalah Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pemanfaatan Ruang, dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

24. Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya

Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi semua perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya Hidup dilaksanakan

untuk mencapai sasaran strategis Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari serta meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam yang berorientasi pada kesinambungan sumber daya.

Tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kesinambungan Sumber Daya terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja dengan pengukuran sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.37
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kesinambungan Sumber Daya Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Penanganan Sampah	persen	28,14	29	33,60	115,85	31	108,37
2	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	persen	2,85	1,90	4,10	215,96	2,10	195,39
3	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	persen	33,06	30	38,84	129,48	30,00	129,48
4	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	persen	0,99	1,78	2,32	130,41	1,76	131,90
5	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	m ³	186.585	2.300.000	297.475	12,93	2.300.000	12,93
Capaian Rata-rata Sasaran :						120,93		115,61

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa target Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kesinambungan Sumber Daya Hidup pada tahun 2018 telah tercapai yaitu sebesar 120,93% (Sangat tinggi), semua indikator kinerja capaiannya sesuai/ melebihi target demikian juga target capaian akhir RPJMD mencapai 132,22% (Sangat tinggi), tetapi masih terdapat 1 indikator yaitu Jumlah daya tampung TPS yang masih sangat rendah dengan capaian 12,93%. Hal tersebut karena pertimbangan tidak jadinya pembangunan TPA regional sebagai penampung akhir sampah. Selain hal tersebut, paradigma pengelolaan sampah juga mulai diarahkan dengan pengurangan dari sumbernya. Desa-desa diharapkan membuat TPS 3R sendiri untuk mengurangi sampah kawasannya.

Anggaran pada Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya Hidup pada tahun 2018 sebesar Rp. 20.495.264.138,00 (dua puluh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 19.481.922.383,00 (Sembilan belas milyar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) atau 95,06%.

Prestasi tingkat nasional yang dicapai oleh DLH adalah Program Kampung Iklim (Proklim) tingkat Nasional. Prestasi luar biasa diraih oleh Kabupaten Magelang karena mendapatkan penghargaan di 2 (dua) kampung sekaligus di tahun 2018 ini. Program Kampung Iklim (ProKlim)

adalah program berlingkup nasional yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim

dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Melalui pelaksanaan ProKlim, Pemerintah memberikan penghargaan terhadap masyarakat di lokasi tertentu yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Pelaksanaan Proklim mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19/2012 tentang Program Kampung Iklim.

ProKlim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah minimal setingkat Dusun/Dukuh/RW dan maksimal setingkat Desa/Kelurahan atau yang dipersamakan dengan itu. Proklim di Kabupaten Magelang pada Tahun 2018 diarahkan untuk memberi prototype contoh pengelolaan lingkungan hidup di Daerah Pedesaan dan



Gambar 3.4. Penerimaan Penghargaan Pembina Proklim Tingkat Nasional Pemerintah Kabupaten Magelang.

Perkotaan. Pada tahun 2018, 2 (dua) Desa di Kabupaten Magelang mendapatkan sertifikat proklam nasional. Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran sebagai Proklam pedesaan dan Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan sebagai Proklam Perkotaan.

Pada tahun 2018 ini, Kementerian Lingkungan Hidup juga memeberikan Penghargaan Pembina Proklam kepada Pemerintah Kabupaten Magelang. Penghargaan ini diberikan karena sudah terdapat 7 (tujuh) desa di Kabupaten Magelang yang mendapatkan anugerah proklam nasional.

Hambatan dan kendala pada Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya Hidup antara lain:

- a. Masih rendahnya cakupan wilayah pelayanan persampahan;
- b. Keterbatasan anggaran untuk pengelolaan sampah;
- c. Rasio TPS yang masih rendah.

Alternatif solusi terhadap permasalahan-permasalahan di atas adalah:

- a. Memperluas cakupan wilayah pelayanan persampahan;
- b. Meningkatkan anggaran untuk mengelola sampah;
- c. Memperbanyak jumlah TPS untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan TPA regional yang lebih terintegrasi.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya Hidup adalah :

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
- f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- g. Program Peningkatan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- h. Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan.

25. Sasaran Srategis Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana

Menurut Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak terpisahkan. Sedangkan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Sasaran strategis terciptanya pengelolaan kawasan hutan yang dapat mengurangi resiko bencana dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Terciptanya pengelolaan kawasan hutan yang dapat mengurangi resiko bencana. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%), dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.38.
Capaian Kinerja Sasaran Srategis Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	ha	NA	2.680	NA	NA	2,822	NA
2	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	persen	3,92	4,70	NA	NA	4,66	NA
Capaian Rata-rata Sasaran :						NA		NA

Tidak dilakukan analisa terhadap Sasaran Srategis Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana, karena sudah menjadi kewenangan provinsi.

26. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah

Sasaran strategis meningkatnya kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik, bebas KKN serta meningkatnya kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan daerah mempunyai tolok ukur capaian kinerja sasaran strategis sebanyak 4 (empat) indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.39

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas
Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
4	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPd	persen	89,19	100	94,57	94,57	100	94,57
Capaian Rata-rata Sasaran :						98,64		98,64

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa target Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah pada tahun 2018 hampir tercapai yaitu sebesar 98,74% (Sangat tinggi), Capaian yang sama untuk target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 98,74% (Sangat tinggi). Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Magelang telah patuh dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di tingkat atasnya serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan kerja tahunan. Pada 2018, dalam RPJMD direncanakan akan melaksanakan 184 program namun pada RKPd 2018 hanya terlaksana 174. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPd tidak mencapai 100% karena adanya program yang telah dialihkan kewenangannya ke pemerintah provinsi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPd). Program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2014-2019 telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD tahun 2014-

2019 merupakan indikator kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Pada tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2018 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 178 program dan seluruhnya sesuai dengan program RPJMD.

Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah sebesar Rp. 5.750.474.250,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 5.402.892.549,00 (lima milyar empat ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) atau 93,96%.

Pada pelaksanaan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah juga ditunjang dengan anggaran pada urusan penelitian dan pengembangan dengan anggaran sebesar Rp. 14.661.000,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi Rp. 14.251.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) atau 97,2%.

Kebijakan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas kelembagaan perencanaan pada setiap SKPD. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel.

Program-program pembangunan yang mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah Pembangunan adalah :

1. Program Pengembangan Data/ informasi;
2. Program Kerjasama Pembangunan;
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

6. Program Perencanaan Sosial dan Budaya;
 7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
 8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
27. Sasaran Strategis Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal
- sasaran strategis terwujudnya kemandirian dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan serta meningkatnya kualitas aparatur daerah, kualitas pelayanan publik dengan Standar Pelayanan Minimal memiliki tolok ukur capaian keberhasilannya sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.40
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk		0,39	0,44	0,69	157,02	0,44	157,02
2	Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk		91,32	99,64	88,13	88,45	100,87	87,37
3	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah		2	4	4,00	100,00	4	100,00
4	Penegakan PERDA	persen	80,45	75	95,29	127,06	75	127,06
5	Persentase Peningkatan PAD	persen	7,42	12,02	17,89	148,84	12,02	148,84
6	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		Ada	ada	Ada	100	Ada	100,00
Capaian Rata-rata Urusan :						120,23		120,05
Urusan : Statistik								
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"		Ada	ada	Ada	100	Ada	100
2	Buku "PDRB Kabupaten"		Ada	ada	Ada	100	Ada	100
Capaian Rata-rata Urusan :						100,00		100,00
Urusan : Kearsipan								
1	Pengelolaan Arsip Secara Baku	persen	73,02	89,61	73,02	81,49	100	73,02
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	orang	791	282	901,00	319,50	329	273,86
Capaian Rata-rata Urusan :						200,49		173,44
Capaian Rata-rata Sasaran :						140,24		131,16

Sumber: Sekretariat Daerah, Diskominfo dan Dispuspa Kabupaten Magelang, 2018

Sasaran Strategis Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal diampu oleh 3 urusan yaitu : Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Urusan Statistik dan Urusan Kearsipan. Capaian kinerja pada sasaran strategis pada tahun 2018 telah melampaui target sebesar 140,24% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target RPJMD telah mencapai 131,16% (Sangat tinggi).

Anggaran pada Sasaran Strategis Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal karena adanya perubahan nomenklatur pembagian urusan dalam pencapaian sasaran tersebut, maka pada tahun 2018 urusan tersebut dibagi menjadi 4 urusan dalam pengelolaan keuangan yang terdiri dari:

- a. Urusan Administrasi Pemerintahan Rp. 47.747.951.540,00 (empat puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 43.613.800.330,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau sebesar 91,34%
- b. Urusan Kepegawaian Rp. 6.769.433.510,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 6.024.704.317,00 (enam milyar dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) atau sebesar 89,00%
- c. Urusan Keuangan Rp. 30.352.275.100,00 (tiga puluh milyar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 27.098.920.507,00 (dua puluh milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 89,28%
- d. Urusan Pengawasan Rp. 3.550.503.650,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) sembilan ratus dua puluh ribu dengan realisasi sebesar Rp. 3.334.389.073,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta

tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga rupiah) atau sebesar 93,91%

Faktor penunjang keberhasilan Sasaran Strategis Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal adalah:

- a. Adanya koordinasi yang baik dengan para pemangku kepentingan
- b. Upaya tindakan represif non yustisi
- c. Mengutamakan perda prioritas (yang berpengaruh terhadap peningkatan PAD) dan adanya aduan masyarakat

Permasalahan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Sasaran Strategis Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal antara lain:

- a. Kurangnya Diklat SDM anggota Satpol PP dan Satlinmas;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana, seperti keterbatasan mobil patroli yang dimiliki.

Solusi alternatif untuk permasalahan-permasalahan pada Sasaran Strategis Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal, adalah:

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Diklat SDM anggota Satpol PP dan Satlinmas;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana, seperti keterbatasan mobil patroli yang dimiliki.
- c. Berupaya lebih baik untuk memperoleh data pendukung dari SKPD terkait
- d. Pada tahun mendatang akan lebih mengedepankan tindakan represif non yustisi
- e. Menindaklanjuti dengan upaya tindakan yustisial ke pengadilan
- f. Meningkatkan monitoring, pembinaan dan pengawasan terhadap pemilik usaha (perijinan)

Program-program pembangunan pada Sasaran Strategis Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik

dengan Standar Pelayanan Minimal, yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- e. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- f. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
- g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- h. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- i. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
- j. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- k. Program Penataan Daerah Otonomi Baru;
- l. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- m. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- n. Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian;
- o. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- p. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal;
- q. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan;
- r. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat);
- s. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan.

28. Sasaran Strategis Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak

Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih sehingga informasi yang diperoleh bisa dimengerti dan dipahami. Sedangkan informasi adalah segala sesuatu yang mempunyai arti dan nilai bagi penerima informasi. Proses penanganan komunikasi dan penyampaian informasi dilaksanakan melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sasaran Strategis Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak

memeiliki tolok ukur capaian keberhasilannya sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.41
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	penyiaran	8/10	6	8,00	133,33	6	133,33
2	Web Site Milik Pemerintah Daerah		Ada	Ada	Ada	100	Ada	100
3	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal		9/3	9/3	9/3	100	9/3	100
Capaian Rata-rata Sasaran :						111,11		111,11

Sumber: Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak pada tahun 2018 adalah telah melapui target sebesar 111,11% (Sangat tinggi) hal ini telah diatas target, demikian juga capaian terhadap target akhir RPJMD telah diatas target sebesar 111,11% (Sangat tinggi).

Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2018 Jumlah penyiaran Radio/ TV lokal yang sudah berizin berjumlah 9 penyiaran, yang terdiri dari 8 penyiaran radio dan 1 penyiaran TV lokal. Penyiaran radio yang berizin adalah Gemilang, Pop, Best, Merapi Indah, Fastabic, Unima, Walisongo dan Konco Deso. Sedangkan siaran TV lokal adalah Magelang TV. Untuk penyiaran radio/ tv lokal yang belum berizin masih banyak yang beroperasi, dalam hal ini diharapkan ke depan semua penyiaran radio /tv lokal tersebut bisa difasilitasi untuk memperoleh izin.

Website milik Pemerintah Daerah telah aktif sampai ke desa - desa melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Program pemberdayaan kontributor website dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan bidang IT setiap tahun secara bertahap. Jumlah Surat Kabar Lokal/ Nasional adalah 9/3, yang terdiri dari Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Jawa

Pos, Sindo, Wawasan, Magelang Ekspres, Suara Gemilang, Republika, Merapi, Tribun Yogya / Tempo, Kompas dan Metro.

Anggaran untuk mendukung Sasaran Strategis Meningkatkan Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 8.356.828.000,00 (delapan milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.778.591.635,00 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) atau 93,08%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah terbatasnya akses informasi yang didapat masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia pengelola komunikasi dan informasi.

Alternatif solusinya adalah peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan informasi dan komunikasi, serta penambahan kuantitas jumlah SDM pengelola komunikasi dan informasi.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak adalah:

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- b. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
- c. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa.

29. Sasaran Strategis Meningkatkan Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil

Sasaran strategis Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan capil memiliki tolok ukur capaian keberhasilannya dilaksanakan melalui beberapa indikator kinerja dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.42
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan
 dan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil pada Urusan
 Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil								
1	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	persen	92,92	91,81	96,13	104,71	91,87	104,64
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	persen	60,52	98,77	94,29	95,46	100	94,29
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	persen	40,12	1,8	34,26	1.903,33	1,8	1.903,33
4	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	100	Sudah	100,00
Capaian Rata-rata Urusan :						550,88		550,57
Urusan : Pertanahan								
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	persen	54,8	33,8	53,41	158,02	33,83	157,88
2	Penyelesaian Izin Lokasi	persen	100	100	100	100,00	100	100,00
Capaian Rata-rata Urusan :						129,01		128,94
Capaian Rata-rata Ssaaran :						339,94		339,75

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Sekretariat daerah Kabupaten Magelang, 2018

Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil diampu oleh 2 (dua) urusan yaitu urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Urusan Pertanahan, dengan capaian sasaran strategis pada pada tahun 2018 telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 339,94% (Sangat tinggi) demikian juga dengan capaian pada akhir RPJMD mencapai 339,75% (Sangat tinggi), Capaian yang Sangat tinggi tersebut dikarenakan indikator Rasio pasangan berakte nikah tingkat capaiannya mencapai 1.903,33%.

Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 6.407.842.850,00 (enam milyar empat ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 6.016.205.113,00 (enam milyar enam belas juta dua ratus lima ribu seratus tiga belas rupiah) atau 93,89%.

Penyebab keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah:

- a. Adanya kebijakan batas perekaman e-KTP pada akhir Desember 2018.
- b. Perekaman jemput bola dan informasi kepada masyarakat untuk perekaman pemula.

- c. Adanya Sosialisasi tentang Pencatatan Perkawinan dengan mengundang Pengurus Gereja, Pure, Wihara dan Penghayat Kepercayaan.
- d. Adanya Sosialisasi tentang Akta Kelahiran dan dampak perkawinan orang tua nya belum dicatat oleh negara.
- e. Mengadakan koordinasi dengan pengurus gereja untuk laporan perkawinan sehingga kita bisa mengarahkan umatnya untuk langsung mencatatkan perkawinan pada Disdukcapil.

Hambatan dan kendala Sasaran Strategis Meningkatkan Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah:

- a. Data yang dilaporkan adalah berdasarkan pada data base pelayanan, dan belum seluruh produk (dokumen) akta kelahiran sudah dimasukkan dalam data base, sehingga muncul selisih data yang belum sesuai dengan yang sebenarnya;
- b. Keterbatasan blanko e-KTP dari pusat, sehingga pencetakan e-KTP tidak sesuai standar waktu;
- c. Kesadaran masyarakat dalam membuat dokumen kependudukan yang masih rendah, dimana masyarakat biasanya membuat manakala dibutuhkan.

Alternatif solusi untuk permasalahan di atas adalah:

- a. Pencatatan data base pada dokumen akta kelahiran lebih awal.
- b. Pengadaan sarana dan prasarana piranti e-KTP pada tahun 2018 agar setiap kecamatan bisa melakukan cetak e-KTP;
- c. Sosialisasi intensif tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

Program yang mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Meningkatkan Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.

30. Sasaran Strategis Meningkatkan Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat dan Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat

Sasaran strategis Meningkatkan kondusifitas dan keamanan masyarakat, meningkatna kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, dan Berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada

masyarakat memiliki tolok ukur capaian kinerja sebanyak 6 (enam) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.43

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	kegiatan	12	12	12	100,00	12	100,00
2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	kegiatan	7	12	12	100,00	12	100,00
Capaian Rata-rata Sasaran :						100,00		100,00

Sumber: kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat d pada tahun 2018 pada focus urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri telah tercapai dengan capaian sebesar 100% (Sangat tinggi) demikian juga dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 100% (Sangat tinggi).

Dalam rangka meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, dan keamanan, serta ketertiban berdasarkan Pancasila dan



Gambar 3.5 Penerimaan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bagian Hukum telah melaksanakan Fasilitasi RANHAM berupa pengumpulan data HAM dan data Kabupaten/Kota peduli HAM. Berdasarkan data Kabupaten Kota Peduli HAM tersebut, pada Tahun 2018 Kabupaten Magelang telah mendapatkan anugerah penghargaan atas upaya

membina dan mengembangkan Kabupaten Magelang menjadi Kabupaten yang Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan HAM

Tabel 3.43
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian 2017	Tahun 2018			Akhir RPJMD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	persen	70	100	100,00	100,00	100	100,00
2	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	persen	100	100	100,00	100,00	100	100,00
3	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	persen	70	90	86,25	95,83	100	86,25
4	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	persen	100	100	96,66	96,66	100	96,66
Capaian Rata-rata Sasaran :						98,12		95,73

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat pada tahun 2018 pada fokus urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri hampir tercapai dengan capaian sebesar 98,12% (Sangat tinggi) demikian juga dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 95,73% (Sangat tinggi).

Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat dan Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat

pada tahun 2018 sebesar Rp. 12.193.764.860,00 (dua belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 11.370.012.190,00 (sebalas milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) atau 93,24%.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang kembali memperoleh penghargaan Bidang Penanggulangan Bencana kategori Penanganan Bencana Terbaik Tingkat II BPBD Kabupaten/Kota wilayah Barat dalam Penganugerahan BPBD

Kabupaten/Kota Tingkat Nasional 2018 yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center pada kegiatan Rakernas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan BPBD se-Indonesia, di Provinsi Bali pada hari Rabu-Kamis, 21-22 Februari 2018. BPBD Kabupaten Purworejo mengungguli BPBD kabupaten/kota lainnya bersama dengan BPBD kabupaten Magelang dan BPBD Kota Solo yang berada di peringkat kedua dan ketiga.



Penyebab Keberhasilan Sasaran Strategis Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat dan Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat adalah :

1. keberhasilan dalam manajemen penanggulangan bencana ditunjang dengan adanya gotong royong/ peran serta pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
2. Penanggulangan Bencana diarahkan pada upaya pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
3. Menekankan pembangunan kesiapsiagaan berbasis masyarakat dan peringatan dini.

4. Penanganan kedaruratan dengan segera yang melibatkan peran serta pemerintah, relawan dan pemerintah desa serta masyarakat.



Gambar 3.6. Top 10 Kompetisi Inovasi elayanan Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Kegagalan dalam penanggulangan bencana karena:

1. Masih kurangnya dokumen atau aturan terkait penanggulangan bencana yang sudah dilegalisasi dan peraturan yang belum disusun sebagai amanat Perda No. 3 Tahun 2014. Peraturan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang yang sudah dilegalikan adalah:

- a) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- b) Peraturan Bupati no. 18 Tahun 2016 Tentang Rincian Tahapan dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang
- c) Peraturan Bupati no. 48 Tahun 2018 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022.

Dokumen yang belum dilegalisasi adalah:

- a) Rencana Kontinjensi Erupsi Merapi
- b) Rencana Kontinjensi Tanah Longsor

Peraturan yang belum selesai di susun adalah:

- a) SOP penanggulangan bencana
- b) Peraturan terkait penanganan pengungsi
- c) Peraturan terkait tata cara pengelolaan bantuan masyarakat

2. Belum terselesaikannya pensertifikatan tanah hunian tetap

Alternatif Solusi adalah:

1. Gotong royong manajemen penanggulangan bencana agar dapat berjalan dengan efektif masih diperlukan pemahaman yang sama antara seluruh pemangku kepentingan, bagaimana mengimplementasikan manajemen penanggulangan bencana yang efektif.
2. Melegalisasi dokumen terkait penanggulangan bencana

3. Segera menyusun peraturan terkait penanggulangan bencana terutama SOP, penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan tatacara pengelolaan bantuan masyarakat.
4. Menyelesaikan pensertifikatan tanah hunian tetap dan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Magelang.

Program-program yang mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat dan Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat adalah:

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal;
- c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- d. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
- e. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan;
- f. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- g. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- h. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan sumberdaya maka perlu dilakukan analisis efesensi terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada. Dalam analisis efesensi dilakukan perbandingan antara pencapaian kinerja sasaran strategis dibandingkan dengan prosentase realisasi anggaran untuk yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut.

Penghitungan analisis efesensi dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja dengan tingkat capaian mencapai 100% atau lebih, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis dan capaian kinerja yang tidak mencapai 100% tidak dilakukan analisis efesensi.

Analisa efesensi dapat dilihat pada tabel 3.44 berikut ini :

Tabel 3.44
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2018			Tingkat Efisiensi	
					Anggaran	Realisasi	%		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	
ASPEK PELAYANAN UMUM									
A. MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama									
Urusan : Kesehatan									
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan	1	Kasus Kematian Ibu Melahirkan*)	145,45	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2.148.918.000	947.589.763	44,10	55,90
					Program Managemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	186.373.768.848	120.675.026.901	64,75	35,25
					Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan RS mata	105.015.249.070	100.467.427.786	95,67	4,33
					Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	3.000.000	1.228.000	40,93	59,07
		2	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran *)	112,00	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	3.000.000	1.228.500	40,95	59,05
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	191.672.000	185.963.400	97,02	2,98
		3	Persentase Balita Gizi Buruk *)	186,67	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	665.851.000	621.958.688	93,41	6,59
					Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	23.455.000	23.328.100	99,46	0,54
		4	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup *)	116,25	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	165.000.000	164.957.650	99,97	0,03
		5	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100,00	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	365.490.000	344.764.975	94,33	5,67
6	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	100,00	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	8.483.159.800	6.395.668.416	75,39	24,61		
7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100,00	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	16.918.768.500	14.572.905.316	86,13	13,87		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2018			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	2		3	4	5	6	7	8
		8	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	45,56	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	397.743.000	336.460.098	84,59	0,00
		9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	88,30	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	22.876.807.680	22.389.405.634	97,87	0,00
		10	Cakupan Kunjungan Bayi	104,09	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan praspuskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	23.069.380.010	20.413.374.771	88,49	11,51
Capaian Kinerja Sasaran :				109,83		366.701.262.908	287.541.287.998	78,41	21,59
2	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol	Urusan: Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
		11	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga *)	128,75	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	256.644.000	256.042.570	99,77	0,23
		12	Rasio Akseptor KB	89,72	Program Keluarga Berencana	7.402.160.000	6.318.708.159	85,36	0,00
		13	Cakupan Peserta KB Aktif	90,40	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	47.500.000	47.499.645	100,00	0,00
		14	Keluarga Pra Sejahtera *)	100,23	Program pelayanan Kontrasepsi	420.000.000	406.183.925	96,71	3,29
		15	Keluarga Sejahtera I *)	97,24	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	256.644.000	256.042.570	99,77	0,00
Capaian Kinerja Sasaran :				101,27		8.382.948.000	7.284.476.869	86,90	13,10
3	Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkat, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan	Urusan: Pendidikan							
		16	APK PAUD	115,17	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.011.476.000	722.211.845	71,40	28,60
		17	Angka melek huruf	100,83	Program Pendidikan Non Formal	1.684.000.000	1.594.440.600	94,68	0,00
		18	Angka rata-rata lama sekolah	82,22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	31.096.400.250	30.583.867.105	98,35	0,00
			Angka Partisipasi Murni :						
		19	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	95,73	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	137.987.468.074	37.532.691.908	27,20	0,00
		20	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82,67					
	21	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	NA						

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2018			Tingkat Efisiensi
					Anggaran	Realisasi	%	
1	2	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Angka partisipasi kasar</i>						
		22 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	103,86					
		23 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	91,06					
		24 Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	NA					
		<i>Angka Putus Sekolah:</i>						
		25 Angka Putus Sekolah SD/MI *)	164,29					
		26 Angka Putus Sekolah SMP/MTs *)	159,32					
		27 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA *)	NA					
		<i>Angka Kelulusan:</i>						
		28 Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,02					
		29 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,92					
		30 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	NA					
		<i>Rerata Nilai UN :</i>						
		31 Rerata Nilai UN SD/MI	91,06					
		32 Rerata Nilai UN SMP/MTs	92,28					
		33 Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK	NA					
		34 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	101,65	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.862.760.000	1.838.201.150	98,68	0,00
		<i>Angka Melanjutkan :</i>						
		35 Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	101,23					
		36 Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA	111,99					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2018			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	2		3	4	5	6	7	8
		37	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	86,44					
		38	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	86,98					
Capaian Kinerja Sasaran :				105,23		173.642.104.324	72.271.412.608	41,62	0,00
4	Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga	Urusan : Kepemudaan dan Olah Raga							
		39	Jumlah Organisasi Pemuda	103,85	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	457.599.000	443.647.455	96,95	3,05
					Program peningkatan peran serta kepemudaan	578.326.500	478.180.530	82,68	17,32
		40	Jumlah Organisasi Olah Raga	100,00	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	5.196.470.000	4.931.330.420	94,90	5,10
		41	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	111,11	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	126.910.000	126.755.760	99,88	0,12
					Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	89.720.000	89.694.770	99,97	0,03
		42	Jumlah Kegiatan Olah Raga	100,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	3.802.853.494	3.342.071.513	99,97	0,00
	43	Lapangan Olah Raga	83,33						
Capaian Kinerja Sasaran :				99,66		10.251.878.994	9.411.680.448	91,80	0,00
5	Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca	Urusan : Perpustakaan							
		44	Jumlah Perpustakaan	100,38	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.044.487.500	956.596.890	91,59	8,41
		45	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	172,22					
	46	Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	101,82						
Capaian Kinerja Sasaran :				124,81		1.044.487.500	956.596.890	91,59	8,41
6	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan	Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
	47	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	77,95	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	210.000.000	200.897.375	95,67	0,00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2018			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	2		3	4	5	6	7	8
	dalam Pembangunan	48	Rasio KDRT *)	108,00	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	267.819.000	254.063.470	94,86	5,14
		49	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	75,51	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	205.820.000	205.447.665	99,82	0,18
					Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	30.000.000	29.894.975	99,65	0,35
					Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	767.045.750	749.885.048	97,76	2,24
Capaian Kinerja Sasaran :				87,15		1.480.684.750	1.440.188.533	97,27	0,00
7	Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	Urusan : Sosial							
50		Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	114,71	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.510.952.000	1.441.089.783	95,38	4,62	
51		PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	250,38	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	426.356.000	380.752.810	89,30	10,70	
				Program pembinaan anak terlantar	100.000.000	97.901.530	97,90	2,10	
				Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	195.000.000	184.698.485	94,72	5,28	
				Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	35.923.000	29.386.055	81,80	18,20	
				Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	2.002.284.000	1.987.522.770	99,26	0,74	
Capaian Kinerja Sasaran :				182,54		4.270.515.000	4.121.351.433	96,51	3,49
8	Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta	Urusan : Kebudayaan							
52		Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	100,00	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.165.191.000	1.144.369.480	98,21	1,79	
53		Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	100,00	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.468.118.000	1.396.464.030	95,12	4,88	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2018			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	2		3	4	5	6	7	8
	Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila	54	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	149,37	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	330.473.000	325.633.960	98,54	1,46
Capaian Kinerja Sasaran :				116,46		2.963.782.000	2.866.467.470	96,72	3,28
9	Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan	Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
		55	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	117,65	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	6.119.403.450	5.525.096.597	90,29	9,71
		56	Cakupan Kelompok Binaan PKK	73,28	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.647.504.250	1.554.134.965	94,33	0,00
		57	Jumlah LSM (Bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat)	100,00	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	611.037.000	595.848.170	97,51	0,00
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			619.866.900	588.427.449	94,93	0,00	
Capaian Kinerja Sasaran :				96,98		8.997.811.600	8.263.507.181	91,84	8,16
B.	MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing								
1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja	Urusan: Ketenagakerjaan							
		58	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	105,78	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.265.000.000	1.105.334.425	87,38	12,62
		59	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun*)	-10,94	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.059.675.000	923.037.225	87,11	0,00
		60	Pencari Kerja yang Ditempatkan	88,70	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	202.840.000	202.584.070	99,87	0,00
		61	Tingkat Pengangguran Terbuka*)	106,13					
		62	Keselamatan dan Perlindungan	0,00					
	63	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	100,00	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	194.000.000	193.734.425	99,86	0,14	
Capaian Kinerja Sasaran :				64,94		2.721.515.000	2.424.690.145	89,09	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2018			Tingkat Efisiensi	
					Anggaran	Realisasi	%		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	
2	Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal	Urusan : Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
		64	Persentase Koperasi Aktif	120,59	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	638.064.000	504.704.861	79,10	20,90
		65	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	100,20	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	162.680.000	144.869.900	89,05	10,95
		66	Jumlah BPR/LKM	78,36	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	756.588.000	737.008.625	97,41	0,00
		67	Usaha Mikro dan Kecil	310,81	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	247.601.250	243.488.905	98,34	1,66
Capaian Kinerja Sasaran :			152,49		1.804.933.250	1.630.072.291	90,31	9,69	
3	Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah	Urusan: Penanaman Modal							
		68	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	110,05	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	525.981.800	297.024.560	56,47	43,53
		69	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	297,13	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	507.815.000	498.589.503	98,18	1,82
		70	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	111,49	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	390.840.000	374.557.940	95,83	4,17
		71	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	576,64	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	78.165.000	77.606.300	99,29	0,71
Capaian Kinerja Sasaran :			273,83		1.502.801.800	1.247.778.303	83,03	16,97	
4	Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat	Urusan: Ketahanan Pangan							
		72	Ketersediaan Pangan Utama Beras	117,11	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	935.908.075	905.875.835	96,79	3,21
		73	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	101,03					
Capaian Kinerja Sasaran :			109,07		935.908.075	905.875.835	96,79	0,00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2018			Tingkat Efisiensi	
					Anggaran	Realisasi	%		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	
5	Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	Urusan: Pertanian							
			Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar						
		74	Produktivitas Padi	106,01	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	17.264.886.000	14.861.053.662	86,08	13,92
		75	Produksi Padi	134,49	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	617.572.100	576.683.180	93,38	6,62
		76	Produktivitas Jagung	107,17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	368.291.975	366.452.940	99,50	0,50
		77	Produksi Jagung	69,23	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan	266.615.650	262.809.470	98,57	0,00
		78	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebu-nan Terhadap PDRB	104,26	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	737.143.900	732.490.680	99,37	0,63
		79	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)	99,85					
		80	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB	74,74					
		81	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	137,25					
		82	Cakupan Bina Kelompok Petani	496,80					
			Produksi Hewan ternak						
		83	Sapi potong	100,02	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	353.060.850	341.371.025	96,69	3,31
		84	Kerbau	130,79	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3.128.684.000	2.905.971.516	92,88	7,12
		85	Kambing	94,86					
86	Domba	95,38							
	Produksi Hewan Unggas								
87	Ayam Pedaging	100,00	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	9.366.279.125	9.147.185.870	97,66	2,34		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2018			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	2		3	4	5	6	7	8
		88	Ayam Ras Petelur	99,20	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan	48.026.000	47.216.750	98,31	0,00
		89	Ayam Buras	96,14					
		90	Itik	100,05					
		91	Sapi Perah	100,01					
			Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari)						
		92	Daging	100,17					
		93	Telur	91,95					
		94	Susu	50,00					
Capaian Kinerja Sasaran :				118,49		32.150.559.600	29.241.235.093	90,95	9,05
6	Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan	Urusan: Kelautan dan Perikanan							
		95	Produksi Perikanan (Benih)	114,75	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	441.030.000	438.508.000	99,43	0,57
		96	Produksi Perikanan Budidaya	137,48	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.432.254.349	1.396.467.717	97,50	2,50
		97	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	109,75					
		98	Konsumsi Ikan	128,10					
		99	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian (%)	87,40					
Capaian Kinerja Sasaran :				115,50		1.873.284.349	1.834.975.717	97,96	2,04
7	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	Urusan: Perdagangan							
		100	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	108,39	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	116.351.710.436	92.056.176.587	79,12	20,88
		101	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	57,29	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	497.533.000	491.907.662	98,87	0,00
		102	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	217,88	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	182.552.000	176.841.100	96,87	0,00
				Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan	217.263.000	210.143.650	96,72	3,28	
Capaian Kinerja Sasaran :				127,85		117.249.058.436	92.935.068.999	79,26	20,74

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2018			Tingkat Efisiensi
					Anggaran	Realisasi	%	
1	2	2	3	4	5	6	7	8
8	Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah	Urusan: Perindustrian						
103		Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	104,98	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	25.986.000	22.545.125	86,76	13,24
104		Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	108,43					
105		Pertumbuhan Industri.	98,40	Program Penataan Struktur Industri	705.245.000	663.329.800	94,06	0,00
				Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	849.500.000	826.177.338	97,25	0,00
Capaian Kinerja Sasaran :			103,94		1.580.731.000	1.512.052.263	95,66	4,34
9	Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah	Urusan: Pariwisata						
106		Kunjungan Wisata Manca Negara	49,60	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	19.218.103.920	16.920.652.942	88,05	0,00
107		Kunjungan Wisata Nusantara	100,24	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.445.945.000	1.442.899.392	99,79	0,21
108	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	76,92	Program Pengembangan Kemitraan	325.601.000	310.231.965	95,28	0,00	
Capaian Kinerja Sasaran :			75,59		20.989.649.920	18.673.784.299	88,97	0,00
C.	MISI III: Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah							
1	Aksesibilitas Antar Daerah Meningkat dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan	Urusan: Pekerjaan Umum						
109		Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	106,73	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	94.650.557.715	84.661.813.604	89,45	10,55
				Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan	62.376.706.500	56.655.008.041	90,83	9,17
				Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	50.000.000	26.632.000	53,26	46,74
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	599.400.000	576.507.380	96,18	3,82
				Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1.406.000.000	1.224.994.025	87,13	12,87
				Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	830.638.800	743.315.044	89,49	10,51
110	Rasio Jaringan Irigasi	142,89	Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong	7.294.629.700	6.622.283.114	90,78	9,22	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2018			Tingkat Efisiensi	
						Anggaran	Realisasi	%		
1	2	2		3	4	5	6	7	8	
	Pertumbuhan Baru	111	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	102,06	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	19.397.311.359	16.456.227.873	84,84	15,16	
					Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya	150.000.000	145.679.150	97,12	2,88	
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5.464.459.890	4.921.854.841	90,07	9,93	
					Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	320.066.699	309.466.575	96,69	3,31	
Capaian Kinerja Sasaran :				117,23		192.539.770.663	172.343.781.647	89,51	10,49	
2	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat	Urusan: Perumahan			106,59	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	23.772.425.000	21.642.806.478	91,04	0,00
		112	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	99,76						
		113	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	120,00						
		114	Rumah Layak Huni (%)	100,00						
Capaian Kinerja Sasaran :				106,59		27.835.387.025	25.017.041.060	89,87	10,13	
3	Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan	Urusan: Energi dan Sumber Daya Mineral			NA					
		115	Persentase Pertambangan Berijin	NA						
		116	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	NA						
Capaian Kinerja Sasaran :				NA						

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2018			Tingkat Efisiensi
					Anggaran	Realisasi	%	
1	2	2	3	4	5	6	7	8
4	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan	Urusan: Perhubungan						
117		Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	84,25	Program peningkatan pelayanan angkutan	1.661.711.000	1.406.805.970	84,66	0,00
118		Jumlah Ijin Trayek	92,34	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	444.403.000	424.547.106	95,53	0,00
119		Rasio Uji Kir Kendaraan	91,48					
120		Jumlah Terminal Bis	75,00	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	170.000.000	156.528.500	92,08	0,00
121		Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	100,00	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	818.525.000	766.120.090	93,60	6,40
122		Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji	100,00					
123	Pemasangan Rambu-Rambu	141,42	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	270.109.000	262.757.775	97,28	2,72	
Capaian Kinerja Sasaran :			97,78		3.364.748.000	3.016.759.441	89,66	10,34
D.	MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup							
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam	Urusan: Penataan Ruang						
124		Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	103,33	Program Perencanaan Tata Ruang	125.000.000	94.416.856	75,53	24,47
125		Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	93,51	Program Pemanfaatan Ruang	150.000.000	140.550.000	93,70	0,00
126		Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	100,00	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	600.000.000	562.027.097	93,67	0,00
127		Luas Kawasan Lindung (ha)	100,00					
128		Luas Kawasan Budidaya (ha)	100,00					
129	Jumlah IMB yang Dikeluarkan	53,64						

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2018			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	2		3	4	5	6	7	8
		130	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	84,21					
Capaian Kinerja Sasaran :				90,67		875.000.000	796.993.953	91,09	0,00
2	Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kesenambungan Sumber Daya	Urusan: Lingkungan Hidup							
		131	Persentase Penanganan Sampah	115,85	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	10.472.302.200	9.883.267.869	94,38	5,62
		132	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	215,96	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	3.630.005.837	3.313.640.227	91,28	8,72
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	265.000.000	262.544.770	99,07	0,93
		133	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	129,48	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.746.222.000	1.719.130.894	98,45	1,55
		134	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	130,41	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan	2.745.997.000	2.722.252.075	99,14	0,86
		135	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	12,93	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	118.696.101	117.878.601	99,31	0,00
					Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	650.000.000	645.987.800	99,38	0,00
					Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	45.105.000	41.463.180	91,93	0,00
					Program Pengembangan Kapasitas dan kemampuan Laboratorium lingkungan	121.452.000	99.670.475	82,07	0,00
Capaian Kinerja Sasaran :				120,93		19.794.780.138	18.805.835.891	95,00	5,00
3	Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan	Urusan: Kehutanan							
		136	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	NA					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2018			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	2		3	4	5	6	7	8
	yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana	137	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	NA					
Capaian Kinerja Sasaran :				NA					
E.	MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis								
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah	Urusan: Perencanaan Pembangunan							
		138	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	100,00	Program Pengembangan Data /Informasi	939.808.000	802.159.821	85,35	14,65
		139	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	100,00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.293.039.950	2.225.951.402	97,07	2,93
		140	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	100,00	Program Kerjasama Pembangunan	157.000.000	156.596.885	99,74	0,26
		141	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	94,57	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	289.705.000	260.116.919	89,79	0,00
					Program Perencanaan Sosial dan Budaya	801.446.900	776.118.387	96,84	0,00
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam				351.396.000	335.670.806	95,52	0,00	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana				155.364.500	147.118.594	94,69	0,00	
Capaian Kinerja Sasaran :				98,64		4.987.760.350	4.703.732.814	94,31	0,00
2	Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat	Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
		142	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	157,02	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.940.888.500	1.498.791.002	77,22	22,78
				Peningkatan Manajemen Kepegawaian	649.395.650	422.067.395	64,99	35,01	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2018			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	2		3	4	5	6	7	8
	dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	143	Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	88,45	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	44.600.000	41.779.050	93,68	0,00
		144	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah	100,00	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.418.619.850	2.278.712.225	94,22	5,78
					Program Penataan Daerah Otonomi Baru	39.861.000	1.832.948	4,60	95,40
					Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	19.959.606.500	18.093.487.737	90,65	9,35
					Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	81.312.000	72.561.035	89,24	10,76
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.169.213.360	4.877.562.695	94,36	5,64
					145	Penegakan PERDA	127,06	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1.707.515.600
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.115.570.000	980.776.726	87,92			12,08	
		146	Persentase Peningkatan PAD	148,84	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	16.837.848.915	14.912.642.069	88,57	11,43
					Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	553.446.500	530.000.150	95,76	4,24
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	22.092.520.938	20.349.366.766	92,11	7,89
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60.931.715.045	55.057.058.279	90,36	9,64
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	837.191.700	812.000.073	96,99	3,01
		147	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	100,00	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	636.364.800	600.387.400	94,35	5,65

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2018			Tingkat Efisiensi	
					Anggaran	Realisasi	%		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	
				Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	90.000.000	87.596.685	97,33	2,67	
		Capaian Kinerja :	120,23		135.105.670.358	122.226.448.603	90,47	9,53	
		Urusan : Statistik							
		148	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	100,00	Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	402.205.000	399.567.275	99,34	0,66
		149	Buku "PDRB Kabupaten"	100,00					
		Capaian Kinerja :	100,00		402.205.000	399.567.275	99,34	0,66	
		Urusan : Kearsipan							
		150	Pengelolaan Arsip Secara Baku	100,18	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	226.000.000	218.363.330	96,62	3,38
					Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	45.000.000	43.683.900	97,08	2,92
		151	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	319,50	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	41.050.000	36.238.975	88,28	11,72
					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	243.021.000	226.763.975	93,31	6,69
		Capaian Kinerja :	209,84		555.071.000	525.050.180	94,59	5,41	
		Capaian Kinerja Sasaran :	143,36		136.062.946.358	123.151.066.058	90,51	9,49	
3	Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak	Urusan : Komunikasi dan Informatika							
		152	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	133,33	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	2.640.571.000	2.318.823.960	87,82	12,18
		153	Web Site Milik Pemerintah Daerah	100,00	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	176.915.000	173.284.925	97,95	2,05
					Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.357.257.500	2.197.245.063	93,21	6,79
		154	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	100,00	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	4.244.702.000	4.090.287.001	96,36	3,64
		Capaian Kinerja Sasaran :	111,11		9.419.445.500	8.779.640.949	93,21	6,79	
4	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Capil	Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil							
		155	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	104,71	Program Penataan Administrasi Kependudukan	5.468.598.500	5.130.430.040	93,82	6,18
		156	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	95,46					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2018			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	2		3	4	5	6	7	8
		157	Rasio Pasangan Berakte Nikah	1.903,33					
		158	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	100,00					
		Capaian Kinerja :		550,88		5.468.598.500	5.130.430.040	93,82	6,18
		Urusan : Pertanahan							
		159	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	158,02	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	98.325.000	81.580.790	82,97	17,03
		160	Penyelesaian Izin Lokasi	100,00	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	42.496.000	40.164.460	94,51	5,49
		Capaian Kinerja :		129,01		140.821.000	121.745.250	86,45	13,55
		Capaian Kinerja Sasaran :		339,94		5.609.419.500	5.252.175.290	93,63	6,37
F.	MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat								
1	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat	Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
		161	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	100,00	Program pengembangan wawasan kebangsaan	444.561.000	432.208.930	97,22	2,78
		162	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	100,00	Program pendidikan politik masyarakat	162.900.000	162.900.000	100,00	0,00
					Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.153.941.000	1.141.758.055	98,94	1,06
					Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	232.788.000	231.308.340	99,36	0,64
					Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.896.643.500	3.717.091.920	95,39	4,61
					Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	121.780.000	120.469.825	98,92	1,08
					Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	24.157.500	24.157.400	100,00	0,00
		Capaian Kinerja Sasaran :		100,00		6.036.771.000	5.829.894.470	96,57	3,43
2	Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat	Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
		163	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	100,00	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	5.022.199.960	4.503.795.906	89,68	10,32

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2018			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	2		3	4	5	6	7	8
		164	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100,00	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	5.365.244.000	5.297.532.497	98,74	0,00
		165	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	95,83					
		166	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	96,66					
Capaian Kinerja Sasaran :				98,12		10.387.443.960	9.801.328.403	94,36	0,00
Rata-Rata Capaian Indiaktor Mikro :				122,91		1.091.339.317.317	845.586.284.663	77,48	6,53

Sumber : Bagian Organisasi, data diolah

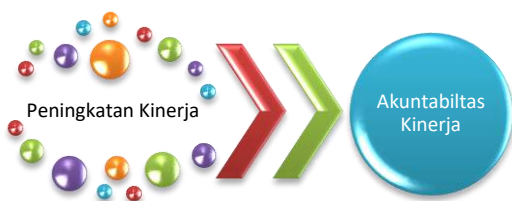
Penghitungan efisiensi dilakukan apabila capaian indikator kinerja atau kinerja sasaran $\geq 100\%$ (lebih besar atau sama dengan seratus persen), dimana tingkat efisiensi dihitung 100% (seratus persen) dikurangi persentase realisasi keuangan. Tingkat efisiensi tidak dihitung pada kegiatan yang tidak dilaksanakan atau kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sangat rendah.

Berdasarkan tabel efisiensi diatas rata-rata efisiensi capaian kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya sebesar 6,53%, tetapi tingkat efisiensi ini belum mencerminkan efektifitas penggunaan sumberdaya khususnya dalam penggunaan anggaran, perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik per kegiatan.

C. Prestasi

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magelang membuahkan hasil berupa prestasi pada beberapa bidang pembangunan, beberapa prestasi dan penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Magelang selama tahun 2018 antara lain:

1. Opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian”;
2. Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan HAM;
3. Kabupaten Layak Anak Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Penghargaan Inisiasi Pelaksanaan Model Kampung Anak Sejahtera (KAS) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Predikat “Pasar Tertib Ukur” dari Kementerian Perdagangan untuk Pasar Grabag dan Pasar Talun;
7. Penghargaan Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori “Baik Dengan Catatan” Tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
8. Penerimaan Penghargaan Program Kampung Iklim Utama Tingkat Nasional kepada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk Desa Wonosari Kecamatan Kajoran dan Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan dari Kementerian Lingkungan Hidup;
9. Anugerah Bunda PAUD Tingkat Nasional;
10. Selaku Pembina BUMD, beberapa penghargaan diraih oleh Bapas 69, PDAM dan PD BPR BKK dalam beberapa kategori;
11. Penganugerahan BPBD Kabupaten/Kota Tahun 2018, Terbaik II Tingkat BPBD Kabupaten/Kota Wilayah Barat;
12. TOP 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Jawa tengah Tahun 2018;
13. Piagam Penghargaan sebagai Juara III Penilaian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018; dan
14. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik /KIP Award dalam kategori Badan Publik Cukup Informatif Tahun 2018.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi serta dalam rangka mewujudkan *good governance* pada instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja atas akuntabilitas dilihat dari capaian kinerja organisasi maupun dilihat dari pemanfaatan sumberdaya termasuk didalamnya dalam pemanfaatan anggaran

P
e
n
u
t
u
p

Capaian kinerja sasaran pada indikator makro kepala daerah tahun 2018 rata-rata kinerja sasaran telah terlampaui yaitu sebesar 113,32% (Sangat Tinggi), demikian juga terhadap target akhir RPJMD pada tahun 2019 capaian kinerja sasaran telah terlampaui yaitu sebesar 111,45% (Sangat Tinggi), hal itu menunjukkan target pembangunan yang diukur dengan indikator makro telah terlampaui, baik pada target tahun 2018 maupun target akhir periode RPJMD pada tahun 2019.

Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2018 pada indikator mikro telah melampaui target dengan rata-rata kinerja sasaran telah tercapai 122,91% dengan kriteria sangat tinggi jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 tidak terlalu jauh dimana capaian kinerja sasaran telah tercapai 116,65% dengan kriteria sangat tinggi, hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator mikro sasaran strategis telah tercapai bahkan terlampaui pada target tahun 2018 dan target akhir periode RPJMD pada tahun 2019.

Realisasi anggaran Kabupaten Magelang pada tahun 2018 mencapai rata-rata 78,45% dengan kriteria Tinggi. Tingkat realisasi anggaran terbanyak adalah kriteria Sangat Tinggi (91% \leq 100%) dengan jumlah 105 (66,46%) program dan yang paling sedikit pada kategori capaian sedang (66% \leq 75%) sebanyak 1 (0,63%) program.

Tingkat efisiensi kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya sebesar 6,53%, tetapi tingkat efisiensi ini belum

mencerminkan efektifitas penggunaan sumberdaya khususnya dalam penggunaan anggaran, perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik per kegiatan.

Dalam penyusunan dokumen dijumpai permasalahan atau kendala, baik yang bersifat teknis maupun non teknis diantaranya :

1. Terlalu banyaknya sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019, sehingga menyulitkan dalam melakukan pengukuran dan pengumpulan data.
2. Masih banyaknya indikator kinerja sasaran strategis yang bersifat *output* dan berubah rumus pengukurannya, sehingga menyulitkan dalam proses analisa.
3. Kesulitan di dalam mengumpulkan data kinerja dari SKPD, terutama capaian kinerja yang bersifat makro, dan diperlukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Badan Pusat Statistik.

Alternatif solusi dari permasalahan di atas antara lain :

1. Menyederhanakan jumlah sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis pada RPJMD dan Renstra SKPD periode RPJMD berikutnya.
2. Menyusun indikator kinerja tingkat kabupaten minimal bersifat *outcome* serta memastikan rumus penghitungan indikator tidak berubah-ubah dan lebih terukur dengan menerapkan pola *Cascading*.
3. Meningkatkan fungsi koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dalam perolehan dan pengolahan indikator makro.

Harapan kami untuk tahun-tahun mendatang LKjIP Kabupaten Magelang selain berfungsi untuk mengukur keberhasilan dan atau kegagalan dalam menjalankan misi dan sasaran strategis organisasi, juga dapat digunakan sebagai upaya memacu usaha peningkatan kinerja dan pelayanan publik, dan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki keputusan dan kebijakan dari pemerintah.

Demikian LKjIP Kabupaten Magelang yang menggambarkan capaian kinerja sasaran srategis dan indikator kinerja utama dan pada tahun 2018 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magelang.



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.I.P.

Jabatan : BUPATI MAGELANG

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Kota Mungkid, 30 Oktober 2018

BUPATI MAGELANG

ZAENAL ARIFIN, S.I.P.



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
	MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama			
	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Agama Yang Semakin Meningkat			
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
	1.	Angka Usia Harapan Hidup	70,50	tahun
	2.	Indeks Gini	0,300	indeks
	3.	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,4056	indeks
	4.	Persentase penduduk miskin	9,00	persen
	5.	IPM	75,54	indeks
	MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing			
	Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah yang berdaya Saing dan Berbasis Pada Potensi Lokal Daerah			
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
	6.	Pertumbuhan PDRB	6,2 – 6,7	persen
	7.	PDRB per kapita	13,75	Juta Rp
	8.	Laju inflansi	4±1	persen
	9.	Rasio penduduk yang bekerja	97,57	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
	ASPEK DAYA SAING			
		10. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	35,30	Rp.(juta)
		11. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	36,56	persen
		12. Nilai tukar petani	106,85	
	MISI III : Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah			
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Daerah			
	ASPEK DAYA SAING			
		13. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,0019	
	MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup			
	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Maksimal dengan Berbasis Kelestarian Lingkungan			
	ASPEK DAYA SAING			
		14. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	76,60	persen
		15. Luas Wilayah Industri	0,37	persen
	MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis			
	Meningkatkan Manajemen Sistem Pemerintahan Daerah yang Baik, Modern dan Demokratis			
	ASPEK DAYA SAING			
		16. Lama Proses Perijinan (Hari)	9	hari
		17. Opini BPK 'WTP'	WTP	
		18. Nilai AKIP	B	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
	MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat			
	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Serta Kesadaran dan Kepatuhan Hukum			
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
		19. Angka kriminalitas	1,82	indek

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS					
ASPEK PELAYANAN UMUM					
A.	MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama				
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan	Urusan : Kesehatan			
		1.	Kasus Kematian Ibu Melahirkan	11	kasus
		2.	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran	6,50	kasus
		3.	Persentase Balita Gizi Buruk	0,15	persen
		4.	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	8,00	Permil
		5.	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	persen
		6.	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100	persen
		7.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	persen
		8.	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	90,00	persen
		9.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	persen
10.	Cakupan Kunjungan Bayi	95,00	persen		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
2.	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol	Urusan: Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
		11.	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1,60	persen
		12.	Rasio Akseptor KB	81,45	persen
		13.	Cakupan Peserta KB Aktif	80,84	persen
		14.	Keluarga Pra Sejahtera	21,28	persen
		15.	Keluarga Sejahtera I	14,88	persen
3.	Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkat, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan	Urusan: Pendidikan			
		16.	APK PAUD	54,39	persen
		17.	Angka melek huruf	93,85	persen
		18.	Angka rata-rata lama sekolah	9,00	persen
		Angka Partisipasi Murni :			
		19.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,79	persen
		20.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	81,96	persen
		21.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	64,06	persen
		Angka partisipasi kasar			
		22.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	101,94	persen
		23.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	97,06	persen
		24.	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	75,10	persen
		Angka Putus Sekolah:			
		25.	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,14	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan		
1	2	3	4	5		
		26.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,59	persen	
		27.	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,81	persen	
		Angka Kelulusan:				
		28.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,98	persen	
		29.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,99	persen	
		30.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,98	persen	
		Rerata Nilai UN :				
		31.	Rerata Nilai UN SD/MI	7,72	nilai	
		32.	Rerata Nilai UN SMP/MTs	6,48	nilai	
		33.	Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK	7,16	nilai	
		34.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	86,00	persen	
		Angka Melanjutkan :				
		35.	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	89,62	persen	
		36.	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA	70,70	persen	
		37.	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	84,68	persen	
		38.	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	90,00	persen	
4.	Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga	Urusan: Kepemudaan dan Olah Raga				
		39.	Jumlah Organisasi Pemuda	26	organisasi	
		40.	Jumlah Organisasi Olah Raga	35	organisasi	
		41.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	18	kegiatan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		42.	Jumlah Kegiatan Olah Raga	24	kegiatan
		43.	Lapangan Olah Raga	1,50	permil
5.	Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca	Urusan : Perpustakaan			
		44.	Jumlah Perpustakaan	794	unit
		45.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	44.447	orang
		46.	Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	2,20	persen
6.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		47.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2,54	persen
		48.	Rasio KDRT	0,025	persen
		49.	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	100	persen
7.	Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	Urusan : Sosial			
		50.	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	34	unit
		51.	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	18,50	persen
8.	Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai	Urusan : Kebudayaan			
		52.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	38	kali
		53.	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	18	unit

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
	Pancasila	54.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	66,75	persen
9.	Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan	Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
		55.	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	17,00	persen
		56.	Cakupan Kelompok Binaan PKK	33,87	persen
		57.	Jumlah LSM	4	LSM
B.	MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing				
1.	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja	Urusan: Ketenagakerjaan			
		58.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	75,65	persen
		59.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	1,28	persen
		60.	Pencari Kerja yang Ditempatkan	48,32	persen
		61.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,10	persen
		62.	Keselamatan dan Perlindungan	77,00	persen
		63.	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	100	persen
2.	Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal	Urusan : Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
		64.	Persentase Koperasi Aktif	77,95	persen
		65.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	106.387	UKM non BPR/ LKM UKM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		66.	Jumlah BPR/LKM	379	BPR/LKM
		67.	Usaha Mikro dan Kecil	0,37	persen
3.	Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah	Urusan: Penanaman Modal			
		68.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1.085	investor
		69.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	665.163	Juta rupiah
		70.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	28,19	persen
		71.	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	164	milyar rupiah
4.	Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat	Urusan: Ketahanan Pangan			
		72.	Ketersediaan Pangan Utama Beras	188,06	persen
		73.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	93,1	
5.	Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	Urusan: Pertanian			
		Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar			
		74.	Produktivitas Padi	60,09	Kw/ha
		75.	Produksi Padi	355.617	Ton/th
		76.	Produktivitas Jagung	59,28	Kw/ha
		77.	Produksi Jagung	74.307	Ton/th
		78.	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	20,89	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		79.	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)	72,22	persen
		80.	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB	7,60	persen
		81.	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	12,86	persen
		82.	Cakupan Bina Kelompok Petani	2,5	persen
		Produksi Hewan ternak			
		83.	Sapi potong	1.825.656	kg
		84.	Kerbau	530	kg
		85.	Kambing	777.711	kg
		86.	Domba	1.093.751	kg
		Produksi Hewan Unggas			
		87.	Ayam Pedaging	9.761,9	ton
		88.	Ayam Ras Petelur	999,59	ton
		89.	Ayam Buras	1.215,67	ton
		90.	Itik	92,260	ton
		91.	Sapi Perah	731,528	liter
		Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari)			
		92.	Daging	5,95	gr/kap/hr
		93.	Telur	4,35	gr/kap/hr

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		94.	Susu	0,08	gr/kap/hr
6.	Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan	Urusan: Kelautan dan Perikanan			
		95.	Produksi Perikanan (Benih)	1.750	juta ekor
		96.	Produksi Perikanan Budidaya	16.800	ton
		97.	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	253,43	ton
		98.	Konsumsi Ikan	15,30	Kg/kap/tahun
		99.	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian (%)	2,62	persen
7.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	Urusan: Perdagangan			
		100.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	10,01	persen
		101.	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	88,8	Juta US\$
		102.	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	1,79	persen
8.	Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah	Urusan: Perindustrian			
		103.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	2,81	persen
		104.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	18,03	persen
		105.	Pertumbuhan Industri.	3,76	persen
9.	Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah	Urusan: Pariwisata			
		106.	Kunjungan Wisata Manca Negara	723.151	orang
		107.	Kunjungan Wisata Nusantara	5.963.149	orang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		108.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	6.63	persen
C.	MISI III: Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah				
1.	Aksesibilitas Antar Daerah Meningkat dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru	Urusan: Pekerjaan Umum			
		109.	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	69,49	persen
		110.	Rasio Jaringan Irigasi	30,57	persen
		111.	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	64,60	persen
2.	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat	Urusan: Perumahan			
		112.	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	83,00	persen
		113.	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	2,50	persen
		114.	Rumah Layak Huni (%)	80,00	persen
3.	Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan	Urusan: Energi dan Sumber Daya Mineral			
		115.	Persentase Pertambangan Berijin	40	persen
		116.	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	2,64	persen
4.	Terpenuhinya Sarana dan	Urusan: Perhubungan			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
	Prasarana Penunjang Perhubungan	117.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	3.705.271	orang
		118.	Jumlah Ijin Trayek	1.057	ijin
		119.	Rasio Uji Kir Kendaraan	96,3	persen
		120.	Jumlah Terminal Bis	8	terminal
		121.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	32	menit
		122.	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji	ada	
		123.	Pemasangan Rambu-Rambu	79,00	persen
D.	MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup				
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam	Urusan: Penataan Ruang			
		124.	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	>30	persen
		125.	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	3,85	persen
		126.	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	0	persen
		127.	Luas Kawasan Lindung (ha)	25,886	ha
		128.	Luas Kawasan Budidaya (ha)	8,2687	Ha
		129.	Jumlah IMB yang Dikeluarkan	645	IMB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		130.	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	56,00	persen
2.	Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya	Urusan: Lingkungan Hidup			
		131.	Persentase Penanganan Sampah	29,00	persen
		132.	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	1,90	persen
		133.	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	30	persen
		134.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	1,78	persen
		135.	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	2.300.000	m ³
3.	Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana	Urusan: Kehutanan			
		136.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	2.680	ha
		137.	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	4,70	persen
E.	MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis				
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan	Urusan: Perencanaan Pembangunan			
		138.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada	
		139.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang	Ada	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
	Implementasi Pembangunan Daerah		telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		
		140.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	
		141.	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100	persen
2.	Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
		142.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	0,44	
		143.	Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	99,64	
		144.	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah	4	
		145.	Penegakan PERDA	75	persen
		146.	Persentase Peningkatan PAD	12,02	persen
		147.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	ada	
		Urusan : Statistik			
		148.	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	ada	
		149.	Buku "PDRB Kabupaten"	ada	
		Urusan : Kearsipan			
150.	Pengelolaan Arsip Secara Baku	89,61	persen		
151.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	89,61	orang		
3.	Meningkatnya Hubungan	Urusan : Komunikasi dan Informatika			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
	Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak	152.	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	6	penyiaran
		153.	Web Site Milik Pemerintah Daerah	Ada	
		154.	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	9/3	
4.	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Cakil	Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil			
		155.	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	91,81	Persen
		156.	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	98,77	Persen
		157.	Rasio Pasangan Berakte Nikah	1,80	Persen
		158.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	
		Urusan : Pertanahan			
		159.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	33,80	Persen
	160.	Penyelesaian Izin Lokasi	100	Persen	
F.	MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat				
1.	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat	Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
		161.	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	12	Kegiatan
		162.	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	12	Kegiatan
2.	Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat	Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
		163.	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	100	Persen
		164.	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100	Persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		165.	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	90	Persen
		166.	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	100	Persen

PROGRAM DAN ANGGARAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
	Urusan Pendidikan		
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.011.476.000	- Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak - Pendapatan Asli Daerah - Hibah - SILPA
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	137.987.468.074	
3	Program Pendidikan Non Formal	1.684.000.000	
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.862.760.000	
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	31.096.400.250	
	Urusan Kesehatan		
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	8.483.159.800	
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	16.918.768.500	
8	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	665.851.000	
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	365.490.000	
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	397.743.000	
11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	191.672.000	
12	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	22.876.807.680	
13	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan pras.puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	23.069.380.010	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
14	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	23.455.000	
15	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2.148.918.000	
16	Program Managemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	186.373.768.848	
17	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata	105.015.249.070	
18	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	165.000.000	
19	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	3.000.000	
20	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	3.000.000	
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
21	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	94.650.557.715	
22	Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong	7.294.629.700	
23	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan	62.376.706.500	
24	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	50.000.000	
25	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	599.400.000	
26	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi.Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	19.397.311.359	
27	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya	150.000.000	
28	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5.464.459.890	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
29	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	830.638.800	
30	Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	320.066.699	
31	Program Perencanaan Tata Ruang	125.000.000	
32	Program Pemanfaatan Ruang	150.000.000	
33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	600.000.000	
34	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1.406.000.000	
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
35	Program Pengembangan Perumahan	1.417.419.900	
36	Program Lingkungan Sehat Perumahan	2.645.542.125	
37	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	5.365.244.000	
38	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	23.772.425.000	
	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
39	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.896.643.500	
40	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.153.941.000	
41	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	121.780.000	
42	Program pengembangan wawasan kebangsaan	444.561.000	
43	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	232.788.000	
44	Program pendidikan politik masyarakat	162.900.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
45	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	5.022.199.960	
46	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	24.157.500	
	Urusan Sosial		
47	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.510.952.000	
48	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	426.356.000	
49	Program pembinaan anak terlantar	100.000.000	
50	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	195.000.000	
51	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	35.923.000	
52	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	2.002.284.000	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
	Urusan Tenaga Kerja		
53	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.265.000.000	
54	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.059.675.000	
55	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	202.840.000	
56	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	267.819.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
57	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	210.000.000	
58	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	205.820.000	
59	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	767.045.750	
	Urusan Pangan		
60	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	935.908.075	
	Urusan Pertanahan		
61	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	98.325.000	
62	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	42.496.000	
	Urusan Lingkungan Hidup		
63	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	3.630.005.837	
64	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	10.472.302.200	
65	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.746.222.000	
66	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	265.000.000	
67	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	118.696.101	
68	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	650.000.000	
69	Program Pengembangan Kapasitas dan kemampuan Laboratorium lingkungan	121.452.000	
70	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan.	2.745.997.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil		
71	Program Penataan Administrasi Kependudukan	5.468.598.500	
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
72	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	7.781.114.450	
73	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	619.866.900	
74	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	611.037.000	
75	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.647.504.250	
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
76	Program Keluarga Berencana	7.402.160.000	
77	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	47.500.000	
78	Program pelayanan Kontrasepsi	420.000.000	
79	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	256.644.000	
80	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	30.000.000	
	Urusan Perhubungan		
81	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	444.403.000	
82	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	270.109.000	
83	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	170.000.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
84	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	818.525.000	
	Urusan Komunikasi dan Informatika		
85	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	4.244.702.000	
86	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	2.640.571.000	
87	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	176.915.000	
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
88	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	162.680.000	
89	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	756.588.000	
90	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	638.064.000	
91	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	247.601.250	
	Urusan Penanaman Modal		
92	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	525.981.800	
93	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	390.840.000	
94	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	78.165.000	
	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
95	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	457.599.000	
96	Program peningkatan peran serta kepemudaan	578.326.500	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
97	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	3.802.853.494	
98	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	89.720.000	
99	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	126.910.000	
100	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	5.196.470.000	
	Urusan Statistik		
101	Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	402.205.000	
	Urusan Kebudayaan		
102	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.468.118.000	
103	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	330.473.000	
104	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.165.191.000	
	Urusan Perpustakaan		
105	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.044.487.500	
	Urusan Kearsipan		
106	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	41.050.000	
107	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	226.000.000	
108	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	45.000.000	
109	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	243.021.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
	Urusan Pilihan		
	Urusan Kelautan dan Perikanan		
110	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.432.254.349	
111	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	441.030.000	
112	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	45.105.000	
113	Pariwisata		
114	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.445.945.000	
115	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	19.218.103.920	
116	Program Pengembangan Kemitraan	325.601.000	
	Urusan Pertanian		
117	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	617.572.100	
118	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	368.291.975	
119	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan	266.615.650	
120	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	17.264.886.000	
121	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	737.143.900	
122	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	353.060.850	
123	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3.128.684.000	
124	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	9.366.279.125	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
125	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan	48.026.000	
	Urusan Perdagangan		
126	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	116.351.710.436	
127	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	497.533.000	
128	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	182.552.000	
129	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	507.815.000	
130	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan	217.263.000	
	Urusan Perindustrian		
131	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	849.500.000	
132	Program Penataan Struktur Industri	705.245.000	
133	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	25.986.000	
	Urusan Transmigrasi		
134	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	194.000.000	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
	Urusan Administrasi Pemerintahan		
136	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.115.570.000	
137	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	553.446.500	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
138	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	44.600.000	
139	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1.707.515.600	
140	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	81.312.000	
141	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	39.861.000	
142	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	19.959.606.500	
143	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.418.619.850	
	Urusan Pengawasan		
144	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	636.364.800	
145	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	90.000.000	
	Urusan Perencanaan		
146	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.293.039.950	
147	Program Pengembangan Data /Informasi	939.808.000	
148	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	155.364.500	
149	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	801.446.900	
150	Program Kerjasama Pembangunan	157.000.000	
151	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	289.705.000	
152	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	351.396.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER ANGGARAN
1	2	3	4
	Urusan Keuangan		
153	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	16.837.848.915	
	Urusan Kepegawaian		
154	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.940.888.500	
155	Peningkatan Manajemen Kepegawaian	649.395.650	
156	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	3.547.757.360	
	Urusan Penelitian dan Pengembangan		
157	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.357.257.500	
	JUMLAH :	1.091.339.317.317	

Kota Mungkid, 20 Oktober 2018

BUPATI MAGELANG

 ZAENAL ARIFIN, S.I.P.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
2019